HIMPUNAN FOKUS DAN ISU

ASPIRASI MASYARAKAT

[BERDASARKAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA MPR RI MASA JABATAN 2014-2019]

BADAN PENGKAJIAN MPR
2019

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HIMPUNAN FOKUS DAN ISU

ASPIRASI MASYARAKAT

(BERDASARKAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA MPR RI MASA JABATAN 2014-2019)

BADAN PENGKAJIAN MPR
2019

HIMPUNAN FOKUS DAN ISU ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA MPR RI MASA JABATAN 2014-2019

ISBN: 978-602-5676-47-5

Penasehat:
PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR
Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Pengarah:
Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Penanggung Jawab:
Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Tim Penyusun:
Tommy Andana, Endang Ita, Abdul Rafiq, Widhi Aditia Putra,
Dian Kartika Sari, Elias Petege, Bernadetta Widyastuti

Pengolah data:
Encep Sunjaya, Rio Reinaldo, Vanessa Meir Ayuningtyas, Dennys Advenino Pulo

Penerbit:
Badan Pengkajian MPR

Redaksi:
Gedung Bharana Graha Lt. 3
Kompleks MPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat

Cetakan pertama, Agustus 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salah satu tugas Badan Pengkajian MPR sebagaimana ditetapkan dalam Tata Tertib MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Penyerapan aspirasi dikoordinasikan oleh Badan Pengkajian MPR dengan bentuk kegiatan konsultasi maupun pertemuan dengan masyarakat yang secara khusus dilakukan untuk menyerap aspirasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan masukan dan gagasan yang penting bagi penataan sistem ketatanegaraan serta sebagai bahan kajian yang akan dipergunakan oleh Badan Pengkajian dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dibatasi dalam ruang lingkup fokus kajian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Fokus kajian tersebut terbagi menjadi 4 (empat) arah dan tahapan pembangunan yang di setiap bidangnya terdiri dari beberapa isu. Adapun fokus kajian tersebut, adalah:

1. Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mencakup gambaran kondisi saat ini dan arah kebijakan, meliputi: (a) Demografi, (b) Pendidikan, (c) Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (d) Kesehatan, dan (e) Kebudayaan.
2. Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan, mencakup gambaran kondisi saat ini dan arah kebijakan, meliputi (a) Pertumbuhan Ekonomi, (b) Infrastruktur dan Energi, (c) Investasi, (d) Ketenagakerjaan, (e) Industri dan Ekonomi Kreatif, (f) Pariwisata, (g) Maritim dan Kelautan, (h) Pangan, (i) Perdagangan, dan (j) Lingkungan.

3. Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan, mencakup gambaran kondisi saat ini dan arah kebijakan, meliputi: (a) Pemerataan Pendapatan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Pemerataan Pembangunan Daerah, (d) Pemerataan Infrastruktur, dan (e) Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
4. Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan, mencakup gambaran kondisi saat ini dan arah kebijakan, meliputi: (a) Pemantapan Kehidupan Beragama, (b) Pemantapan Ideologi Pancasila, (c) Penegakan Etika Kehidupan Berbangsa, (d) Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, (e) Politik Dalam Negeri, (f) Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan, (g) Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, (h) Pertahanan, (i) Keamanan, (j) Komunikasi dan Media Massa, dan (k) Politik Luar Negeri.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini sudah dilaksanakan oleh Badan Pengkajian MPR sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Adapun aspirasi yang berkembang sesuai dengan laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan dihimpun dalam buku ini dengan judul: "**Himpunan Fokus dan Isu Aspirasi Masyarakat (Berdasarkan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI Masa Jabatan 2014-2019)**".

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi pertimbangan bagi Badan Pengkajian MPR dalam pelaksanaan kajian terkait sistem ketatanegaraan Indonesia.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Biro Pengkajian MPR

ttd

Drs. Yana Indrawan, M.Si

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasal 3 Huruf e menyebutkan bahwa salah satu fungsi Sekretariat Jenderal MPR yaitu: *"Menyelenggarakan pelayanan* ***kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat,*** *perundang-undangan dan pertimbangan hukum, persidangan, dan kesekretariatan fraksi/kelompok anggota."* Adapun kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat tersebut dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Pengkajian, Biro Pengkajian MPR dan dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota MPR di Dapil masing-masing.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan dalam rangka merumuskan pokok-pokok pikiran tentang dinamika aspirasi yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat pada tingkat daerah. Aspirasi yang diterima kemudian diolah dan diformulasi sehingga menjadi informasi yang berdaya guna dalam rangka pelaksanaan tugas pengkajian di MPR. Pengkajian terhadap dinamika aspirasi masyarakat merupakan tahapan penting dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dimana hukum dasar pada prinsipnya harus mampu menampung seluruh dinamika aspirasi masyarakat sehingga dapat menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Buku ini secara umum menginformasikan berbagai aspirasi, gagasan, dan usulan yang berkembang di masyarakat yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi MPR dalam mengambil kebijakan di bidang ketatanegaraan. Secara khusus, diharapkan buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi MPR dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi masyarakat.

Akhir kata, semoga buku "**Himpunan Fokus dan Isu Aspirasi Masyarakat (Berdasarkan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI Masa Jabatan 2014-2019)"** dapat menyajikan garis besar gagasan masyarakat terkait berbagai isu pembangunan dan ketatanegaraan, serta dapat ditelaah secara kritis, konseptual, serta komprehensif oleh seluruh anggota MPR sebagai masukan dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Sekretaris Jenderal MPR,

ttd

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tugas MPR yaitu: *"**menyerap aspirasi masyarakat** berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Hal ini juga sejalan dengan visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, dimana MPR merupakan representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan. Adapun pada misi MPR ditekankan kembali bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tersebut perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan nasional.

Seperti yang kita ketahui, hukum nasional perlu dibangun secara demokratis dan nomokratis, yaitu mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi melalui mekanisme yang adil, transparan, dan akuntabel. Konstitusi sekalipun merupakan cerminan dari aspirasi politik yang berkembang. Masalah-masalah yang dialami di berbagai kelompok masyarakat pun hanya bisa dijembatani dengan pendekatan yang demokratis. Aspirasi yang berkembang tersebut perlu didokumentasikan sehingga kelak dapat dibahas dalam tataran politis sehingga dapat memperkaya bahan pertimbangan para pengambil keputusan.

Dasar hukum dan kondisi tersebut menekankan bahwa MPR diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, MPR harus mampu menjelma sebagai institusi yang merespon dinamika aspirasi dan menyediakan saluran aspirasi sehingga seluruh kehendak rakyat dan daerah

dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saluran aspirasi tersebut terwujud dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Pengkajian MPR.

Penerbitan buku **"Himpunan Fokus dan Isu Aspirasi Masyarakat (Berdasarkan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI Masa Jabatan 2014-2019)"** merupakan salah satu upaya Badan Pengkajian MPR untuk mendokumentasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat selama masa jabatan MPR 2014-2019. Diharapkan gagasan-gagasan yang dimuat dalam buku ini dapat diketahui oleh masyarakat luas dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Ketua,

ttd

Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS

Wakil Ketua,	**Wakil Ketua,**
ttd	ttd
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	**Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., MM**
Wakil Ketua,	**Wakil Ketua,**
ttd	ttd
Martin Hutabarat, S.H.	**Ir. Tifatul Sembiring**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **iv**
Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI ..... **vi**
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI ..... **viii**
Daftar Isi ..... **x**

Pelaksanaan Kegiatan Aspirasi Masyarakat **1**

Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat **7**

Himpunan Fokus, Isu, dan Hasil Aspirasi Masyarakat (Berdasarkan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI Masa Jabatan 2014-2019) **10**

Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Pendidikan 10
2. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 11
3. Kesehatan 12
4. Kebudayaan 12

Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan

1. Pertumbuhan Ekonomi 13
2. Investasi 15
3. Ketenagakerjaan 15
4. Industri dan Ekonomi Kreatif 15
5. Perdagangan 16

Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan

1. Pengentasan Kemiskinan 16
2. Pemerataan Pembangunan Daerah 16
3. Pemerataan Infrastruktur 17
4. Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 17

Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan

1. Pemantapan Kehidupan Beragama 17
2. Pemantapan Ideologi Pancasila 19
3. Penegakan Etika Kehidupan Berbangsa 29
4. Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional 30
5. Politik Dalam Negeri 33
6. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan 40
7. Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 42
8. Keamanan 44
9. Komunikasi dan Media Massa 44

Penutup **46**

LAMPIRAN **47**

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAPAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstruksi keindonesiaan pada dasarnya terbangun dari ruh dan elemen-elemen masyarakat yang heterogen baik secara suku, budaya, agama, bahasa, maupun alamnya. *The founding fathers* sangat menyadari bahwa kebijakan harus selalu didasarkan kepada prinsip demokrasi yang berbasis kebhinekaan.

Pada hakekatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun judikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tugas MPR yaitu: *"**menyerap aspirasi masyarakat** berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Hal ini juga sejalan dengan visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, dimana MPR merupakan representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat

konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan. Adapun pada misi MPR ditekankan kembali bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tersebut perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan nasional.

Pembangunan hukum nasional memerlukan keterlibatan partisipasi warga negara dan mengakomodir aspirasi secara menyeluruh dan akuntabel dengan berpegang pada prinsip penegakkan demokrasi. Konstitusi sekalipun merupakan cerminan dari aspirasi politik yang berkembang. Masalah-masalah yang dialami di berbagai kelompok masyarakat pun hanya bisa dijembatani dengan pendekatan yang demokratis. Aspirasi yang berkembang tersebut perlu didokumentasikan sehingga kelak dapat dibahas dalam tataran politis sehingga dapat memperkaya bahan pertimbangan para pengambil keputusan.

Dasar hukum dan kondisi tersebut menekankan bahwa MPR diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, MPR harus mampu menjelma sebagai institusi yang merespon dinamika aspirasi dan menyediakan saluran aspirasi sehingga seluruh kehendak rakyat dan daerah dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saluran aspirasi tersebut terwujud dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota MPR.

Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat serta implementasi pelaksanaan kewajiban anggota MPR sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain untuk mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; serta melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh anggota MPR diselenggarakan di daerah, baik secara individu maupun berkelompok untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang terkait langsung dengan bidang-bidang yang terkait dengan tugas dan wewenang MPR, baik dilakukan di daerah pemilihan maupun di daerah sesuai dengan penugasan kelembagaan. Adapun rincian anggota MPR yang melaksanakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	FRAKSI/KEL	KETERANGAN
1.	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.	PAN	Pimpinan MPR
2.	DR.H.M. Hidayat Nur Wahid, MA	PKS	Pimpinan MPR
3.	EE. Mangindaan, S.IP.	DEMOKRAT	Pimpinan MPR
4.	H. Mahyudin, S.T., M.M.	GOLKAR	Pimpinan MPR
5.	Dr. (H.C.) Oesman Sapta	KEL. DPD	Pimpinan MPR
6.	Dr. Ahmad Basarah, M.H.	PDIP	Pimpinan MPR
7.	H. Ahmad Muzani	GERINDRA	Pimpinan MPR
8.	Dr. (H.C.). H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.	PKB	Pimpinan MPR
9.	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS	KEL. DPD	Pimpinan Badan Pengkajian MPR
10.	Prof. Hendrawan Supratikno	PDIP	Pimpinan Badan Pengkajian MPR
11.	H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc	GOLKAR	Pimpinan Badan Pengkajian MPR
12.	Ir. H. Tifatul Sembiring	PKS	Pimpinan Badan Pengkajian MPR
13.	Martin Hutabarat	GERINDRA	Pimpinan Badan Pengkajian MPR
14.	Endro S Yahman	PDIP	Anggota Badan Pengkajian MPR
15.	Arif Wibowo	PDIP	Anggota Badan Pengkajian MPR
16.	Agustina Wilujeng Pramstuti	PDIP	Anggota Badan Pengkajian MPR
17.	Dr. Andreas Hugo Pareira	PDIP	Anggota Badan Pengkajian MPR
18.	Erwin Moeslimin Singajuru	PDIP	Anggota Badan Pengkajian MPR
19.	Daryatmo Mardiyanto	PDIP	Anggota Badan Pengkajian MPR
20.	Ahmad Zacky Siradj	GOLKAR	Anggota Badan Pengkajian MPR
21.	Syamsul Bachri, M.Sc	GOLKAR	Anggota Badan Pengkajian MPR
22.	Ir. Ahmadi Noor Supit	GOLKAR	Anggota Badan Pengkajian MPR
23.	Mujib Rahmat	GOLKAR	Anggota Badan Pengkajian MPR
24.	Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP,. M.Si.	GOLKAR	Anggota Badan Pengkajian MPR
25.	Prof. DR. Farouk Muhammad	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
26.	Sudirman	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
27.	Dr. H. Bambang Sadono, SH., MH	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
28.	Novita Anakotta, S.H., M.H.	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
29.	Abdul Aziz, S.H.	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
30.	Prof. Dr. H. Dailami Firdaus	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
31.	Pdt. Marthen, M.Th	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
32.	Drs. H. A. Budiono, M.Ed.	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
33.	Marwan Cik Asan	DEMOKRAT	Anggota Badan Pengkajian MPR
34.	H. Darizal Basir	DEMOKRAT	Anggota Badan Pengkajian MPR
35.	Muslim, SHI., MM	DEMOKRAT	Anggota Badan Pengkajian MPR
36.	Siti Mufattahah, P.Si., MBA	DEMOKRAT	Anggota Badan Pengkajian MPR
37.	Abdul Wachid	GERINDRA	Anggota Badan Pengkajian MPR
38.	Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.	GERINDRA	Anggota Badan Pengkajian MPR
39.	Aryo P.S. Djojohadikusumo	GERINDRA	Anggota Badan Pengkajian MPR
40.	Ir. H. Ahmad Riza Patria	GERINDRA	Anggota Badan Pengkajian MPR

NO.	NAMA	FRAKSI/KEL	KETERANGAN
41.	Dr. H. Abdul Fikri Fakih, M.M.	PKS	Anggota Badan Pengkajian MPR
42.	dr. H. Adang Sudrajat, MM., M.AV	PKS	Anggota Badan Pengkajian MPR
43.	H. Yanuar Prihatin	PKB	Anggota Badan Pengkajian MPR
44.	Zainul Arifin Noor	PKB	Anggota Badan Pengkajian MPR
45.	H. Dedi Wahidi	PKB	Anggota Badan Pengkajian MPR
46.	Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum, MA	PAN	Anggota Badan Pengkajian MPR
47.	Amran, SE	PAN	Anggota Badan Pengkajian MPR
48.	Hanafi Rais	PAN	Anggota Badan Pengkajian MPR
49.	Hj. Kasriyah	PPP	Anggota Badan Pengkajian MPR
50.	H. Muhammad Arwani Thomafi	PPP	Anggota Badan Pengkajian MPR
51.	H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH., MH	NASDEM	Anggota Badan Pengkajian MPR
52.	Zulfan Lindan	NASDEM	Anggota Badan Pengkajian MPR
53.	Moh. Arief Suditomo, S.H., MA	HANURA	Anggota Badan Pengkajian MPR
54.	Dr. Tb. Hasanuddin, SE., MM	PDIP	Pimpinan Badan Pengkajian
55.	TB. Soenmandjaja	PKS	Pimpinan Badan Pengkajian
56.	Dr. Junimart Girsang, SH., MBA	PDIP	Anggota Badan Pengkajian MPR
57.	M. Sarmudji, SE., M.Si	GOLKAR	Anggota Badan Pengkajian MPR
58.	Dr. H. Aziz Syamsudin	GOLKAR	Anggota Badan Pengkajian MPR
59.	Mervin I.S Komber, ST	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
60.	M. Syukur, SH., MH	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
61.	Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
62.	Hj. Asmawati, S.E., M.M.	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
63.	Hj. Nurmawanti Dewi Bantilan	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
64.	Abdul Aziz Kahar Muzakar	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
65.	Drs. H. Bahar Ngitung, MBA	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
66.	I Gede Pasek Suardika	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
67.	I Kadek Arimbawa	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
68.	Prof. Dr. John Pieris, SH., M.S	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
69.	Dr. (HC). A.M. Fatwa	KEL. DPD	Anggota Badan Pengkajian MPR
70.	Jefirston R. Riwu Kore	DEMOKRAT	Anggota Badan Pengkajian MPR
71.	Ruhut Sitompul	DEMOKRAT	Anggota Badan Pengkajian MPR
72.	Azikin Solthan	GERINDRA	Anggota Badan Pengkajian MPR
73.	Dr. Sukamta	PKS	Anggota Badan Pengkajian MPR
74.	Dr. Hj. Anna Mu'awanah	PKB	Anggota Badan Pengkajian MPR
75.	Dr. M. Ali Taher	PAN	Anggota Badan Pengkajian MPR
76.	H. M. Asli Chaidir	PAN	Anggota Badan Pengkajian MPR
77.	Hj. Okky Asokawati	PPP	Anggota Badan Pengkajian MPR
78.	A. Dimyati NataKusumah	PPP	Anggota Badan Pengkajian MPR
79.	Capt. Djoni Rollindrawan, SE., M.MAR., MBA	HANURA	Pimpinan Badan Penganggaran MPR
80.	Ir. H. M. Idris Laena	GOLKAR	Pimpinan Badan Penganggaran MPR

NO.	NAMA	FRAKSI/KEL	KETERANGAN
81.	Drs. H. Guntur Sasono, M.Si	DEMOKRAT	Pimpinan Badan Penganggaran MPR
82.	H. Ahmad Subadri	KEL. DPD	Pimpinan Badan Penganggaran MPR
83.	Neng Eem Marhamah Zulia Hiz	PKB	Pimpinan Badan Penganggaran MPR
84.	Muh. Asri Anas	PAN	Anggota Badan Penganggaran MPR
85.	Sarifuddin Sudding, S.H.,MH	HANURA	Anggota Badan Penganggaran MPR
86.	I Made Urip M.Si	PDIP	Anggota Badan Penganggaran MPR
87.	Andi Ridwan Wittiri, S.H	PDIP	Anggota Badan Penganggaran MPR
88.	Hj. Agati Sulie Mahyudin,SE	GOLKAR	Anggota Badan Penganggaran MPR
89.	H. Andi Iwan Darmawan A, S.E.	GERINDRA	Anggota Badan Penganggaran MPR
90.	Elnino M. Husein Mohi, ST.,M.SI	GERINDRA	Anggota Badan Penganggaran MPR
91.	H. Muslim Ayub, SH., MH	PAN	Anggota Badan Penganggaran MPR
92.	Dr. Andi Akmal P. SP.,MM	PKS	Anggota Badan Penganggaran MPR
93.	Drs. Irgan Chairul Mahfiz	PPP	Anggota Badan Penganggaran MPR
94.	Drs. Fadholi	NASDEM	Anggota Badan Penganggaran MPR
95.	Matheus Stevi Pasimanjeku, S.H.	KEL. DPD	Anggota Badan Penganggaran MPR

Penyerapan aspirasi masyarakat dimaksudkan antara lain untuk: Menghimpun pendapat masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dalam penyelenggaraan ketatanegaraan; Meningkatkan peran anggota MPR dalam rangka mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Upaya MPR untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; Memberikan informasi yang komprehensif tentang nilai-nilai kebangsaan dan menggali aspirasi masyarakat terhadap implementasi nilai-nilai luhur bangsa tersebut dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 2014-2019, pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan dalam ruang lingkup fokus kajian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Fokus kajian tersebut terbagi menjadi 4 (empat) arah dan tahapan pembangunan yang di setiap bidangnya terdiri dari beberapa isu. Adapun fokus kajian tersebut, adalah:

1. Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mencakup gambaran kondisi saat ini dan arah kebijakan, meliputi: (a) Demografi, (b) Pendidikan, (c) Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (d) Kesehatan, dan (e) Kebudayaan.

2. Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan, mencakup gambaran kondisi saat ini dan arah kebijakan, meliputi (a) Pertumbuhan Ekonomi, (b) Infrastruktur dan Energi, (c) Investasi, (d) Ketenagakerjaan, (e) Industri dan Ekonomi Kreatif, (f) Pariwisata, (g) Maritim dan Kelautan, (h) Pangan, (i) Perdagangan, dan (j) Lingkungan.
3. Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan, mencakup gambaran kondisi saat ini dan arah kebijakan, meliputi: (a) Pemerataan Pendapatan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Pemerataan Pembangunan Daerah, (d) Pemerataan Infrastruktur, dan (e) Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
4. Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan, mencakup gambaran kondisi saat ini dan arah kebijakan, meliputi: (a) Pemantapan Kehidupan Beragama, (b) Pemantapan Ideologi Pancasila, (c) Penegakan Etika Kehidupan Berbangsa, (d) Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, (e) Politik Dalam Negeri, (f) Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan, (g) Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, (h) Pertahanan, (i) Keamanan, (j) Komunikasi dan Media Massa, dan (k) Politik Luar Negeri.

HASIL PENYERAPAN

ASPIRASI MASYARAKAT

Aspirasi yang berkembang sepanjang tahun 2014-2019, antara lain ditindaklanjuti dengan penyampaian pokok-pokok pikiran yang menjadi masukan MPR kepada para penyelenggara negara, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui penyelenggaraan kegiatan dalam forum bersama.

Sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, aspirasi yang diperoleh MPR sepanjang tahun 2014-2019 telah dikategorisasikan berdasarkan fokus bahasan dan isu yang telah ditentukan. Dari segi fokus bahasan, dapat dilihat pada grafik 1 bahwa sebagian besar hasil penyerapan aspirasi masyarakat membahas fokus bahasan terkait Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan, yaitu sebesar 79 persen. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang mengikuti kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ini cenderung menyampaikan aspirasi terkait ruang lingkup MPR, yaitu sistem ketatangeraan.

Grafik 1

Kategorisasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan fokus bahasan

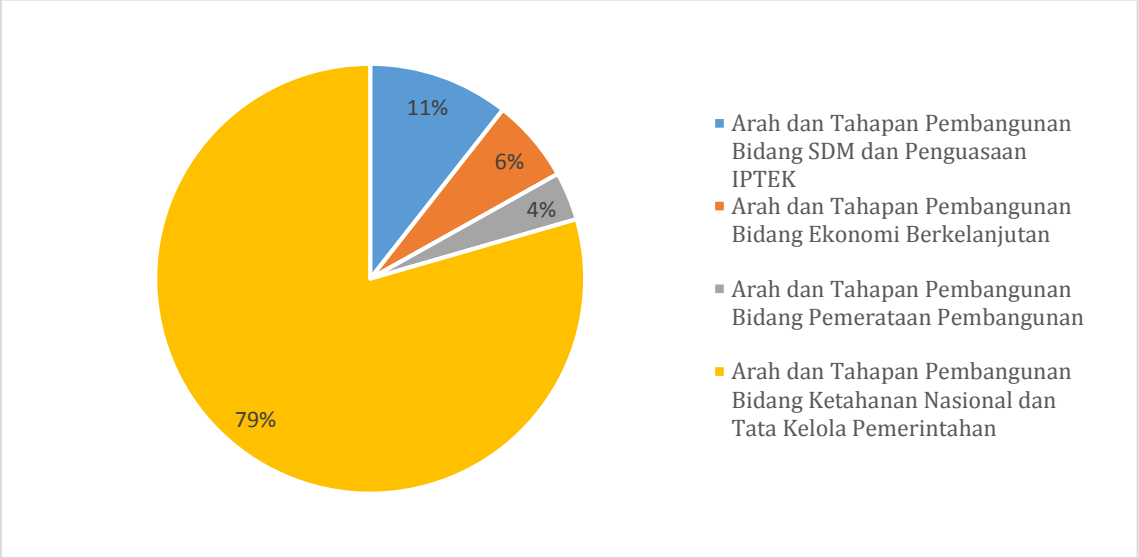

Dari segi isu, dapat dilihat pada grafik 2 bahwa sebagian besar hasil penyerapan aspirasi masyarakat membahas isu terkait Pemantapan Ideologi Pancasila yaitu sebesar 27 persen, Politik Dalam Negeri yaitu sebesar 20 persen, dan Pemantapan Persatuan dan

Kesatuan Nasional yaitu sebesar 8 persen. Adapun untuk isu Pemantapan Ideologi Pancasila, aspirasi yang disampaikan berbicara mengenai pengamalan Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila sebagai dasar negara mendapat tantangan bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Tantangan ini perlu diantipasi dengan memahami bahwa nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi dapat diterapkan di kehidupan masyarakat karena ideologi tersebut bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif, dalam arti Pancasila mampu beradaptasi pada perubahan sesuai dengan situasi, kondisi, dan aspirasi bangsa. Selain masyarakat yang perlu terus mengamalkan Pancasila, MPR juga memilliki tugas untuk terus mengawal ideologi tersebut.

Grafik 2

Kategorisasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan isu

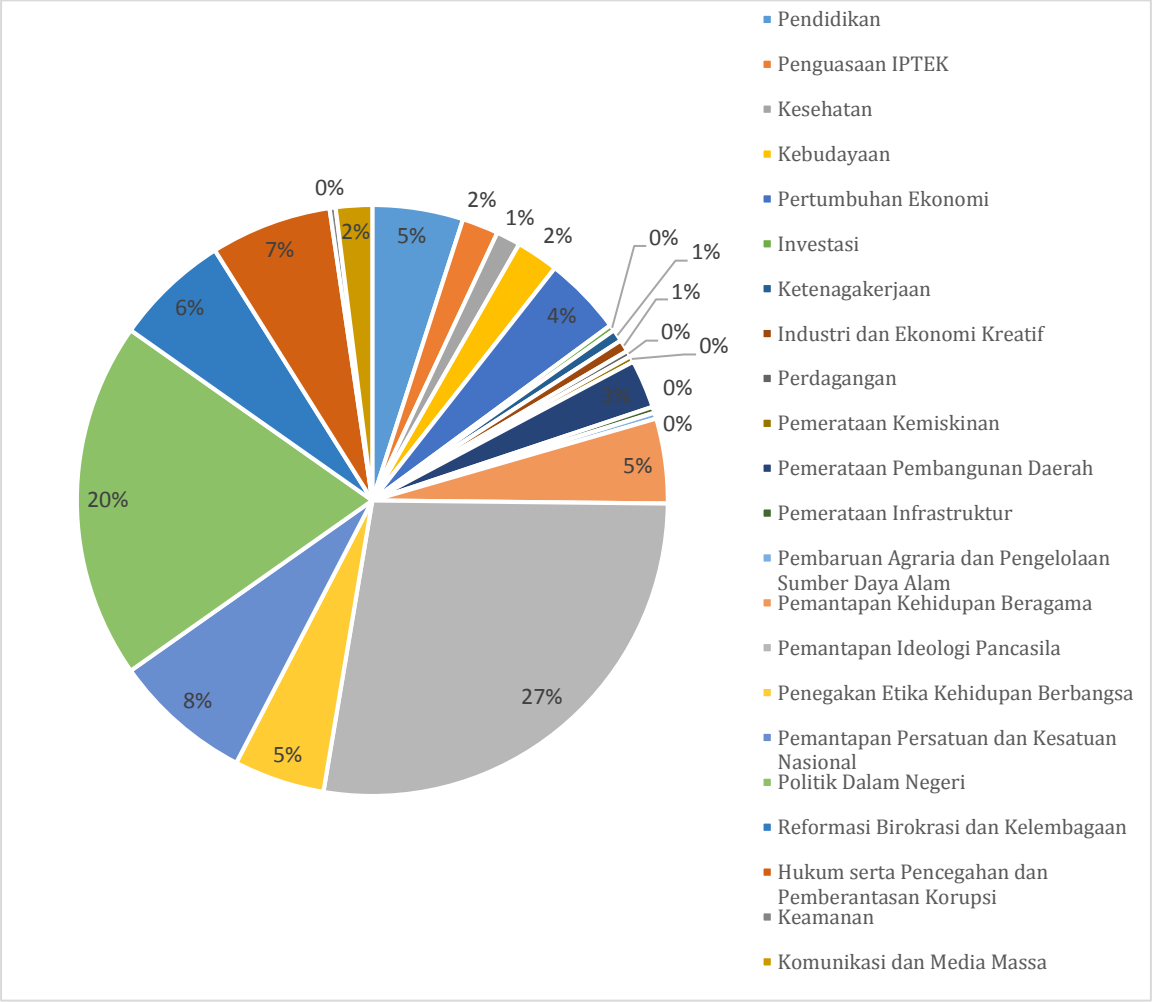

Isu	Persentase	Isu	Persentase
Pendidikan	5%	Pemerataan Infrastruktur	0.3%
Penguasaan IPTEK	2.0%	Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	0.3%
Kesehatan	1.3%	Pemantapan Kehidupan Beragama	4.6%
Kebudayaan	2.3%	Pemantapan Ideologi Pancasila	27.5%
Pertumbuhan Ekonomi	4.3%	Penegakan Etika Kehidupan Berbangsa	5.0%
Investasi	0.3%	Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional	7.6%
Ketenagakerjaan	0.7%	Politik Dalam Negeri	19.5%
Industri dan Ekonomi Kreatif	0.7%	Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	6.3%
Perdagangan	0.3%	Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.6%
Pemerataan Kemiskinan	0.3%	Keamanan	0.3%
Pemerataan Pembangunan Daerah	2.6%	Komunikasi dan Media Massa	2.0%

Isu selanjutnya yang banyak diaspirasikan oleh masyarakat adalah terkait Politik Dalam Negeri. Aspirasi terkait isu ini mayoritas berbicara mengenai reformulasi perencanaan pembangunan nasional melalui penghidupan kembali GBHN. Wacana ini bertujuan agar pembangunan nasional menjadi lebih terarah dan konsisten, namun tetap bertegang teguh pada kerangka sistem presidensial Indonesia. Reformulasi GBHN ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) amandemen UUD NRI Tahun 1945; (2) penetapan melalui TAP MPR dengan terlebih dahulu menyusun UU MPR; dan (3) perubahan UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang menjadi UU GBHN.

Isu lainnya yang banyak diaspirasikan oleh masyarakat adalah terkait Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Aspirasi di sekitar isu ini adalah keinginan masyarakat agar pemerintah mampu melihat kondisi dan situasi negara Indonesia secara komprehensif. Perbedaan dan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah sebuah kekuatan yang perlu dioptimalkan oleh seluruh unsur bangsa. Pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta/asing perlu menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah menjadi amanah konstitusi secara bersama-sama. Semua pihak perlu memposisikan diri secara cermat dan tidak memaksakan kehendak pribadi maupun golongan. Persatuan dan kesatuan nasional dapat terwujud jika ada sinergitas antara semua pihak sehingga hubungan baik tersebut saling memberikan kontribusi serta manfaat satu sama lain.

HIMPUNAN FOKUS, ISU, DAN HASIL
ASPIRASI MASYARAKAT
(berdasarkan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI masa jabatan 2014-2019)

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
1	Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
	1	Pendidikan	1	Pendidikan berbasis karakter merupakan pendekatan yang betujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan persoalan hidup, tetapi tetap peka terhadap nilai keramahan sosial. Penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan pada berbagai jenjang, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Diharapkan pendidikan karakter ini dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada melalui metode pengajaran atau cara penyajian bahan pengajaran.	Kab. Indramayu, Jawa Barat
			2	Dalam perannya pendidikan tinggi menjadi salah satu penentu. Karena dalam konteks daya saing global, peranan pendidikan tinggi sangat penting dalam mendorong percepatan kemajuan bangsa. Lulusan perguruan tinggi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.	Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara
			3	Pondok pesantren selain mengajarkan pendidikan agama Islam, perlu memberikan pendidikan umum termasuk kondisi kekinian bangsa. Hal ini penting agar para santri yang belajar mampu membedakan mana yang sesuai dengan nilai Pancasila dan NKRI, juga sebagai alat untuk memfilter paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Para santri juga harus mampu memahami secara utuh kondisi kebangsaan kekinian sehingga pihak yang tidak bertanggungjawab tidak mudah mempengaruhi mereka.	Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat
			4	Pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk pendidikan usia dini yang harus segera dilaksanakan pada saat ini dan untuk di masa akan datang.	Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah
			5	Masyarakat masih mengeluhkan kondisi pendidikan di Indonesia, antara lain biaya pendidikan yang dirasa sangat memberatkan dan model pendidikan yang sangat sulit untuk diikuti. Hal ini menyebabkan daya saing bagi sekolah yang memiliki tingkat pengajaran untuk anak didiknya masih belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.	Kota Kendal, Jawa Tengah
			6	Masyarakat merasa pendidikan pesantren masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Masyarakat berharap pendidikan pesantren bisa disejajarkan dengan pendidikan umum serta bisa mendapatkan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.	Kota Semarang, Jawa Tengah
			7	Perluasan akses ke perguruan tinggi diperlukan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan pemberian akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki kemampuan akademik.	Kota Bogor, Jawa Barat

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			8	Negara adalah pemikul tanggung jawab utama dalam hal pendidikan karakter bagi warga negara dengan merumuskan serta mengimplementasikan model pendidikan karakter bangsa yang sesuai dengan kondisi kekinian dengan berdasarkan pada putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013. Pemerintah perlu memikirkan alternatif untuk membentuk sebuah lembaga khusus guna merumuskan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa.	Kab. Bireuen, Aceh
			9	Penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan (Formal dan non formal) di Indonesia yang tidak merata dan tak terlayani sebagian warga menyebabkan lemahnya daya saing warga dalam mencari lapangan kerja karena itu diminta kepada pemerintah dan DPR untuk memperjuangkan terpenuhinya hak warga untuk memperoleh pendidikan yang layak.	Kab. Garut, Jawa Barat
			10	Agar Pemerintah mengevaluasi kembali penyaluran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan data penerima KIP karena penerapannya tak sesuai dengan sasarannya. Selain itu perlu ada sosialisasi mekanisme dan kriteria penerima (pelajar dan mahasiswa) KIP.	Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat
			11	Pendidikan di Indonesia, perlu terus di tingkatkan dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dari tingkat pra Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi	Kab. Poso, Sulawesi Tengah
			12	Pendidikan di Indonesia perlu dibuat semacam GBHN yang mengatur *road map* pendidikan Indonesia dimasa mendatang. Perlu dilakukan upaya dan strategi inovasi dalam sistem pendidikan yang hendaknya diletakkkan dalam GBHN.	Kab. Rembang, Jawa Tengah
			13	Salah satu masalah mutu pendidikan di Indonesia adalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan para guru yang masih membutuhkan perhatian lebih serius oleh pemerintah. Kondisi di Nganjuk sendiri, rata-rata lembaga pendidikan di jenjang SD masih kekurangan guru berstatus pegawai negeri, sehingga tingkat rasionya tidak seimbang.	Kab. Nganjuk, Jawa Timur
			14	Perlu meninjau kembali pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia yang menggunakan Pembangunan paradigma pendidikan nasional berorientasi kerakyatan agar mampu berkompetisi secara global dengan cara menyediakan kurikulum dan infrastruktur pendidikan yang terstandarisasi.	Kota Bima, NTB
			15	Permasalahan sistem ketatanegaraan Indonesia dapat terjadi di lingkup sekolah dan masyarakat. di lingkup sekolah permasalahannya adalah bentuk pembelajaran yang keliru oleh guru karena kompetensi yang tidak memadai, bahan ajar yang keliru, dan kurikulum yang kurang mendukung. Permasalahan di masyarakat adalah penyimpangan pelaksanaan tugas dan wewenang oleh pejabat negara, anggota DPR dan DPRD, serta para penegak hukum.	Bali
	2	Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1	Penyediaan fasilitas broadband selain menumbuhkan sarana kreatifitas juga menaikkan pertumbuhan ekonomi (*technopreneur*).	Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
			2	Untuk membangun dan mendayagunakan IPTEK diperlukan nilai-nilai luhur agar dapat dipertanggungjawabkan, yaitu: 1. *Accountable*, penerapan IPTEK harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, finansial maupun politik. 2. *Visionary*, pembangnan IPTEK memberikan solusi strategis dan jangka panjang. 3. *Innovative*, temuan baru yang bermanfaat.	Kab. Mojokerto, Jawa Timur
			3	Modernisasi menyediakan kemudahan untuk mengakses segala macam pengetahuan. Generasi milenial dituntut untuk	Kab. Cianjur, Jawa Barat

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				berpikir kreatif dan inovatif agar bisa bersaing dalam dunia kerja.	
			4	Pemerintah perlu menyusun peraturan atau konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Inovasi perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kerja sama di luar lingkup pemerintah perlu dijalin, misalkan dengan menggandeng ABG (Academician Businessmen Government) dan menggunakan sistem insentif, antara lain lewat keringanan pajak.	Kota Bogor, Jawa Barat
			5	Untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif kemajuan teknologi, maka perlu dibuat secara global peraturan-peraturan atau suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna teknologi.	
			6	Dalam mendayagunakan Iptek diperlukan nilai-nilai; Accountable: penerapan Iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak politis; Visionary: pembangunan Iptek memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi taktis di masa kini, tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberi implikasi terbatas; Innovative: Nilai luhur pembangunan Iptek adalah berorientasi pada segala sesuatu yang baru; Excellence: keseluruhan tahapan pembangunan Iptek mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, implikasi pada bangsa harus baik, yang terbaik atau berusaha menuju yang terbaik.	Kab. Cianjur, Jawa Barat
	3	Kesehatan	1	Para Petugas Kesejahteraan Rakyat (Kesra)/Modin dan Perawat jenazah menghapi kendala dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diminta kepada Anggota MPR agar menyampaikan kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk memberikan pendidikan dan pelatihan penguatan kapasitas tenaga modin dan perawat Jenazah.	Semarang, Jawa Tengah
			2	Profesi kebidanan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya mengenai regulasi yang dapat melindungi tenaga kebidanan ketika berada di lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Kota Palu, Sulawesi Tengah
			3	Terbatasnya Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Puskesmas yang berada di Desa Tomata dan keberadaan Rumah Sakit yang jauh dari Desa Tomata menyulitkan warga untuk mengakses pada pelayanan Kesehatan, terabai hak atas kesehatan karena itu diminta kepada MPR (sebagai Anggota DPR dan DPD RI) dan Pemerintah untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang baik bagi Masyarakat Desa Tomata dan Warga Molowali pada umumnya	Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah
			4	Profesi Tenaga kesehatan (Bidan dan Dokter) merupakan jasa yang semakin berkembang dan sangat kompetitif antar Negara paskah terbukanya era perdagangan bebas, kerjasama ekonomi antar negara, untuk menghadapi persaingan (terutama dalam bidang kesehatan) tersebut diperlukan pelatihan dan kursus bersertifikat bagi tenaga kesehatan guna memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, penguatan basis ilmu pengetahuan (kesehatan) dan teknologi kesehatan agar tenaga kesehatan (Bidan dan dokter) menjadi tenaga yang handal dan profesional di bidangnya.	Kab. Poso, Sulawesi Tengah
	4	Kebudayaan	1	Setiap keluarga perlu menyadari pentingnya ketahanan keluarga untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai ideologi yang merusak. Perlu dibangun suasana yang teduh di masyarakat agar terus terjaga dan dipelihara karena saat ini sedang tahun politik, pilihan boleh berbeda namun kebersamaan harus tetap dipelihara.	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			2	Masyarakat merasa masih banyak kelompok yang menggunakan simbol kedaerahan dan membuat resah karena dirasa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, jika dilihat menggunakan perspektif Bhinneka Tungal Ika, hal ini bukanlah menjadi tantangan melainkan menjadi ciri khas dalam kemajemukan bangsa. Perlu ditekankan bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 juga dicantumkan hak berkumpul dan berserikat, sehingga penting bagaimana adat budaya tetap ada dalam negara kesatuan, dan terikat dalam nilai-nilai Pancasila.	Kota Cirebon, Jawa Barat
			3	Keterlibatan warga negara (terutama perempuan) secara aktif di dalam proses penegakkan hukum dan konstitusi negara merupakan hal yang sangat penting. Keterlibatan tersebut perlu diawali dengan pemahaman mereka tentang 'diri' mereka sendiri dan tentang kesadaran berkonstitusi itu sendiri. Pemahaman diri yang ditandai dengan kemampuan memaknai perbedaan diri (siklus kesehatan sepanjang hidup) akan menjadi variabel yang memoderasi peningkatan peran perempuan dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi.	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
			4	Desa Sawangan Kecamatan Tombulu kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi kekuatan dalam kehidupan budaya dan sampai saat ini masyarakatnya masih memelihara dan melestarikan musik Kolintang sebagai salah satu musik asli daerah Sulawesi Utara. Pemerintah perlu meningkatkan ketahanan nasional berbasis desa dengan cara penyediaan lahan yang representatif dan akses masuk yang baik, sehingga Desa Sawangan dapat menjadi objek wisata yang memilki dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.	Kab. Minahasa, Sulawesi Utara
			5	Partisipasi wanita dalam pembangunan partisipatif masih belum maksimal karena masih terkendala seperti kebiasaan, kesiapan, dan kesediaan melibatkan diri dalam proses pembangunan partisipatif.	Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
			6	Menurut Paula Freire, perubahan selalu dimulai dari sebuah kata, namun kata yang baik dan efektif itu haruslah mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu: refleksi dan aksi. Untuk itu ditawarkan konsep praksis (praxis) sebagai gabungan keduanya dalam satu kata (word). Karena itu menurutnya, revolusi hanya dapat dilakukan bukan dengan kata-kata yang verbalis maupun aktivistis melainkan kata-kata yang mengandung aksi (praksis).	Kota Lhokseumawe, Aceh
			7	Konflik Sosial Budaya sering terjadi karena kemajemukan Suku, Budaya, dan Agama yang tidak teratasi dengan baik dan adil sehingga diperlukan Pilar yang mampu memahami dan mempersatukan kemajemukan bangsa secara baik dan adil untuk mewujudkan toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan, dan kesetaraan Bangsa.	Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan
2	Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan				
	1	Pertumbuhan Ekonomi	1	Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, membangun birokrasi yang bersih dan kompeten, menggeser Sumber Daya Asing dari kelimpahan faktor produksi kedaya tarik investasi dan inovasi, serta membangun modal sosial kuat dan tahan dari rongrongan berbasis SARA.	Kota Pekalongan, Jawa Tengah
			2	Arah kebijakan pembangunan tidak hanya didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya bidang ekonomi, tetapi juga berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya asing.	Jawa Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			3	Usulan arah dan kebijakan ekonomi yang perlu ditempuh pemerintah Indonesia, meliputi: 1) mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar; 2) mengembangkan persaingan yang sehat, adil, serta menghindari pasar monopolitik; 3) mengoptimalkan pinjaman luar negeri; 4) membudayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi; 5) mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan profesional; 6) mempercepat pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi; dan 7) penyehatan APBN degan mengurangi defisit negara.	Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung
			4	Pertumbuhan ekonomi global 2018 diperkirakan meningkat dan diikuti dengan kenaikan harga komoditas dunia. Kenaikan ini bersumber dari perbaikan ekonomi negara maju dan negara berkembang yang lebih kuat dari perkiraan semula. Kondisi ini perlu dirasakan adil dan merata oleh berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu diberdayakan, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangan sistem ekonomi kerakyatan.	Kab. Way Kanan, Lampung
			5	Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami pasang surut karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan taraf hidup yang rendah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Diharapkan anggota MPR selaku wakil rakyat dapat terus menyuarakan suara rakyat dan menjalankan fungsi pengawasan untuk turut mengawasi kebijakan pemerintah agar kondisi ekonomi dapat terjaga.	Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara
			6	Arah kebijakan pembangunan ekonomi tidak sekedar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan berorientasi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing dari masyarakat itu sendiri.	Kab. Gunung Kidul, DIY
			7	Arah kebijakan pembangunan ekonomi tidak sekedar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing. Untuk membangun struktur perekonomian yang kokoh perlu penekanan lebih dalam pengembangan ekonomi rakyat dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi yang didominasi oleh usaha besar dan konglomerat. Masalah kekurangan kapital (investasi) bisa dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja, sehingga bisa menciptakan lebih banyak unit usaha dan dapat menyerap tenaga kerja sebagai pelaku ekonomi.	Jawa Tengah
			8	Arah dan kebijakan ekonomi nasional yang bercorak liberal telah mengabaikan asas dan prinsip ekonomi Pancasila sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, masyarakat mengusulkan untuk menegaskan dan menghidupkan kembali Ekonomi Pancasila di Indonesia.	Sulawesi Tengah
			9	Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Struktur perkenomian ini dperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, pertambangan, dan jasa-jasa pelayanan yang efektif.	D. I. Yogyakarta

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			10	Prinsip-prinsip dimensi ekonomi pembangunan perlu terus menjadi ciri dalam proses pembangunan bangsa. Dimensi-dimensi pembangunan ekonomi berkelanjutan antara lain: (1) pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial; (2) pembangunan yang menghargai keanekaragaman; (3) pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif; dan (4) pembangunan yang menuntut perspektif jangka panjang.	Kab. Sleman, D. I. Yogyakarta
			11	Pembangunan ekonomi berkelanjutan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut: (1) terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jas menjadi perekat ketahanan ekonomi; (2) pendatan perkapita dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5%; dan (3) kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.	Kab. Magelang, Jawa Tengah
			12	Perlunya GBHN atau model lain yang maknanya seperti GBHN untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi berasaskan kekeluargaan.Tahapan pelaksanaan dan sasaran akhir lebih jelas difahami untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat khususnya di daerah, untuk menopang keberhasilan pembangunan perekonomian nasional.	Kab. Temanggung, Jawa Tengah
			13	Ekonomi pembangunan merupakan proses solutif guna membentuk sistem ekonomi yang stabil dengan pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Interaksi antar wilayah perlu didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan yang kokoh, serta peningkatan produktivitas melalui inovasi IPTEK, kelembagaan ekonomi, dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.	Jawa Tengah
	2	Investasi	1	Permodalan bagi usaha kecil dan menengah harus dipermudah, sehingga masyarakat menjadi mudah dalam menjalankan usaha-usaha kecil. Jika hal itu dilakukan maka masyarakat akan berani melakukan usaha kreatif, berlandaskan kemandirian, sehingga mampu mensejahterakan kehidupan masing-masing keluarga dan siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia.	Kab. Cianjur, Jawa Barat
	3	Ketenagakerjaan	1	Banyaknya lapangan kerja dapat membantu pemerintah untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Pembangunan ekonomi yang Pancasilais dapat membantu menciptakan lapangan kerja karena lebih mengedepankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berientasi kerakyatan.	Kab. Ciamis, Jawa Barat
			2	Generasi muda adalah generasi emas penerus bangsa yang menentukan wajah masa depan Indonesia. Globalisasi menyediakan segala sesuatu secara instan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga akan memupuk rasa malas. Penanganan yang konkret dapat dilakukan dengan cara yang lebih persuasif seperti meningkatakan ketersediaan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.	Kab.Aceh Tamiang, Aceh
	4	Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Fondasi industri kreatif adalah sumber daya insani Indonesia. Untuk itu, pembangunan industri kreatif perlu difokuskan pada pengembangan potensi SDM agar terlatih dan terberdayakan dalam menumbuhkembangkan	Kota Malang, Jawa Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				pengetahuan dan kreativitas. Perlu juga dibangun rantai nilai, yaitu rantai proses penciptaan nilai yang akan mengatur input berupa akusisi dan konsumsi produk fisikal (tangible) sebagai sumber daya (bahan baku).	
			2	Pancasila sebagai patokan regulasi pada kegiatan industri rumahan terhadap ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya bidang pariwisata, tidak bertujuan untuk mematikan perkembangan industri tenaga kerja di Indonesia, melainkan sebaliknya, menstimulus industri tersebut agar berkembang terarah dan selaras dengan lingkungannya, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.	Palembang, Sumatera Selatan
	5	Perdagangan	1	Masyarakat Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara merasa hasil pertanian dan hasil nelayan sulit untuk dipasarkan sehingga berdampak pada terhambatnya aktivitas perekonomian. Masyarakat berharap MPR dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini.	Kab. Batu Bara, Sumatera Utara
3	Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan				
	1	Pengentasan Kemiskinan	1	Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat kepada Masyarakat seperti program Keluarga Harapan (PHK), Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak tepat sasaran. Banyak penerima yang tidak memenuhi syarat dan ada pula warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut karena kekurangan informasi, menggunakan data kelompok sasaran yang tidak valid karena itu kami meminta kepada anggota MPR (anggota DPR RI) untuk mengingatkan kepada kementerian terkait untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	Lampung
	2	Pemerataan Pembangunan Daerah	1	Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah sangat penting sebagai upaya pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan dasar. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa dan daerah.	NTT
			2	Masyarakat merasa pembangunan tidak merata di segala bidang, terbukti dengan begitu gencarnya pembangunan di segi infrastruktur jalan tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang SDM. Angka pengangguran semakin meningkat, sebaiknya program di bidang kesejahteraan masyarakat semakin difokuskan.	Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan
			3	Masyarakat mengharapkan peran MPR untuk terus mengawal Undang-Undang Desa guna penguatan pembangunan desa. Hal ini merupakan salah satu langkah pembangunan ekonomi bangsa yang selama ini terlalu fokus pada pembangunan kota.	Kab. Way Kanan, Lampung
			4	Masyarakat berharap kesejahteraan dapat lebih ditingkatkan, terutama terkait pelayanan kesehatan BPJS dan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk.	Kab. Way Kanan, Lampung
			5	Pemerintah pusat perlu memikirkan sebuah kebijakan dalam upaya perekrutan CPNS, khususnya terakit dengan mengutamakan perekrutan bagi putera daerah. Hal ini menjadi penting, karena dengan semakin banyaknya putera daerah yang memiliki kemampuan direkrut sebagai pegawai pemerintah, maka secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran yang secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Kab. Sitaro, Sulawesi Utara

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			6	Terkait beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, diharapkan anggota MPR melalui mekanisme yang ada di MPR, hendaknya menyampaikan kepada pemerintah - cq. Kementerian Dalam Negeri, agar pemerintah memberikan pemahaman dan peningkatan kepada masyarakat dan pemerintahan desa agar paham betul bagaimana caranya mengajukan usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan secara terus menerus sampai betul-betul paham dan mampu melakukannya.	Kab. Pesawaran, Lampung
			7	Kesenjangan yang terjadi Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor lambannya respon dari pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat. Masih terjadi kesenjangan pembangunan yang sangat tinggi antara pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, terutama di Maluku. Diharapkan pemerintah dapat memenuhi nawacita, yaitu pembangunan yang dimulai dari pinggiran wilayah nusantara, sehingga tidak ada daerah terpencil yang tertinggal.	Kab. Maluku Tengah, Maluku
			8	Saat ini, ketimpangan ekonomi antar daerah sangat terasa, tidak terkecuali Bali. Masalah tersebut memperlihatkan demokrasi di tingkat lokal yang kurang berjalan. Pemerintah daerah tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan, tidak memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat, dan tidak adanya perlindungan atas kerentanan masyarakat. Diharapkan untuk ke depannya, salah satu aspek demokrasi dapat diterapkan, yaitu akses masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.	Kab. Cianjur, Jawa Barat
	3	Pemerataan Infrastruktur	1	Generasi muda adalah generasi penerus bangsa sehingga dapat menentukan nasib Indonesia kedepannya. Fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga olahraga, dan akomodasi antar desa diperlukan untuk mempermudah akses sesama pemuda untuk melakukan kegiatan yang melatih softskill seperti turnamen olahraga dan lain sebagainya.	Kab. Tangerang, Banten
	4	Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	1	Sosialisasi pemerintah ke masyarakat agar lebih di tingkatkan antara lain mengenai bagaimana hasil pertanian dapat lebih meningkat, ketersediaan air untuk lahan pertanian dalam mengantisipasi datangnya musim kemarau, dan memohon kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan agar warga yang hidup dari sektor pertanian tidak kekurangan lahan dari kegiatan pembangunan untuk perumahan, serta pensertifikasian tanah warga dalam program Prona dan membantu dengan bertindak cepat dan cermat dalam proses penyelesaian konflik pertanahan.	Kab. Pringsewu, Lampung
4	Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan				
	1	Pemantapan Kehidupan Beragama	1	Bersikap toleran merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun ardi dalam kehidupan umat manusia ini.	Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
			2	Indonesia bukan negara Islam, dan Islam pun tidak memerintahkan untuk menciptakan negara Islam. Pancasila pada dasarnya mampu untuk mengakomodir semua lini kehidupan, sehingga tidak mungkin dipaksakan konsep khilafah untuk diterapkan di negeri ini.	Kota Sukabumi, Jawa Barat
			3	Negara-negara muslim seperti Indonesia dan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam perlu membangun kerjasama yang lebih produktif untuk mengkaji secara	Kab. Sukabumi, Jawa Barat

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				mendalam dan serius bagaimana relasi Islam dan demokrasi dalam kehidupan mendatang. Jangan sampai kelompok fundamentalisme dan radikalisme yang menggunakan agama sebagai simbol memanfaatkan instrumen demokrasi untuk membajak dan memperlemah demokrasi tersebut.	
			4	Secara normatif, dalam ajaran Islam terdapat prinsip dan elemen dalam demokrasi, meskipun secara generik. Namun secara umum nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dan memberikan kontribusi pada banyak negara. Oleh karena itu, gagasan yang menyatakan bahwa secara empirik Islam tidak compatible dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar, sebab di negara non-Muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan.	Kab. Bogor, Jawa Barat
			5	Aksi intoleransi dan kekerasan atas nama agama semakin meningkat dan meluas di Indonesia, aksi tersebut merusak toleransi, kekerabatan dan hubungan antar umat beragama karena itu diminta kepada pemerinta melalui kementerian terkait, terutama kepada aparat Kepolisian untuk menindak tegas aktor-aktor yang memprovokasi, menghasut dan memobilisasi warga melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.	Kab. Sleman, DIY
			6	Dengan Keragaman, Indonesia selalu menjadi acuan bagi berbagai pihak terutama negara-negara lain untuk mempelajari dinamika hubungan antar umat beragama. kerukunan antar pemeluk beragama di indonesia menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan dan ahli. Supaya dialog antar-umat beragama mest dari latar belakang agama yang eksklusif dan kehendak untuk mendominasi pihak lain, untuk itu butuh relasi harmonis tanpa apriori, ketakutan dan penilaian yang dimutlakan. untuk itu, yang harus dibangun adalah persaudaraan yang saling menghargai tanpa kehendak untuk mendominasi dan eksklusif.	Kab. Grobogan, Jawa Tengah
			7	Permasalahan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah: pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai; pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama di kalangan peserta didik juga kurang memuaskan; pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai; kehidupan beragama disebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama; kehidupan harmoni didalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antar umat beragama.	Kab. Mojokerto, Jawa Timur
			8	Sosialisasi dialog antar agama perlu terus dilakukan sebagai benteng pertahanan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai aliran sesat.	Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
			9	Negara perlu memberikan upaya perbaikan dalam menyikapi kondisi saat ini yaitu semakin maraknya kekerasan yang kadangkala mengatasnamakan agama, namun justru bertentangan dengan nilai luhur agama itu sendiri serta semakin maraknya tingkat kriminalitas yang di lakukan remaja.	Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
			10	Bangsa Indonesia perlu menghilangkan "*apriori primordial*", guna menghilangkan rasa emosi dan kesadaran membangun kerukunan umat beragama.	Kab. Sragen, Jawa Tengah
			11	Negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama warganya, namun sesama warga wajib memegang prinsip hormat terhadap kemerdekaan beragama, yaitu mengimani Tuhan dan memeluk nilai-nilai	Kota Palu, Sulawesi Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				kemanusiaan. Untuk pemantapan kehidupan beragama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat membina dan diteladani. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas kehidupan umat beragama melalui kebijakan dan sebagai penengah apabila terjadi pertentangan antar pemeluk agama.	
			12	Meningkatnya kasus kekerasan atas nama agama, perusakan fasilitas Ibadah dan pelarangan serta pembatasan aktifitas ibadah telah meresahkan warga serta merusak hubungan antar agama dan keyakinan di Indonesia. Oleh karena itu, diminta kepada anggota MPR untuk mengevaluasi kembali kebijakan (dalam bidang keagamaan) yang diskriminatif dan atau merugikan kelompok agama dan kepercayaan lainnya serta melindungi hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.	Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
			13	Langkah-langkah strategis yang diperlukan supaya pesantren dan pemuda berperan dalam menjaga konstitusi NKRI, yaitu: (1) pada kebijakan makro nasional, regional, dan global diperlukan rekonstruksi instrumen hukum yang adil, fair, dan transparan atas tindakan kekerasan, khususnya menyangkut kelompok masif agama, dimana tekanan global atas gerakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok jaringan muslim hendaknya tidak menyudutkan masyarakat muslim secara luas; dan (2) diperlukan pendidikan alternatif bagi pelajar dan komunitas pesantren dalam mengembangkan nilai pluralitas.	Kab. Rembang, Jawa Tengah
			14	Umat Kristen sebagai warga Negara Indonesia bertanggung jawab secara politis bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, Negara, dan masyarakat Indonesia. Umat Kristen antara lain perlu meningkatkan kegiatan pendidikan politik warga, kritis terhadap ketimpangan pembangunan dan penyalahgunaan wewenang, melawan penebaran ujaran kebencian, menjadi provokator damai, dan menyelenggarakan kehidupan beragama yang bebas namun toleran, saling menghormati, dan menghargai.	Kab. Mamasa, Sulawesi Barat
	2	Pemantapan Ideologi Pancasila	1	Pancasila tidak diragukan memiliki dimensi yang memperkuat identitas bangsa Indonesia, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memang senyatanya, secara riil terdapat dalam kehidupan diberbagai pelosok tanah air, sehingga nilai dasar tersebut benar bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa.	Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
			2	Keberadaan Pancasila telah terbukti mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tergabung dalam satu ikatan "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya biar berbeda-beda tetapi tetap satu.	Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
			3	Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.	Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
			4	Perlu implementasi dan penyelarasan kembali paradigma Pancasila dalam tata hukum Indonesia dengan mempertimbangkan relasi heuristik mulai dari dasar negara, UUD 45 sampai dengan peraturan perundang-undangan.	Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara
			5	Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai luhurnya menjadi suatu kesatuan integral-integratif dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jika itu diletakkan kembali, maka kita akan menemukan landasan berpijak yang sama, menyelamatkan persatuan dan kesatuan nasional yang kini sedang mengalami tantangan-tantangan zaman. Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				Pancasila harus diletakan utuh dengan pembukaan, di-eksplorasi-kan dimensi-dimensi yang melekat padanya.	
			6	Setelah era reformasi berakhir, Indonesia mengalami banyak masalah termasuk kesenjangan, baik di bidang ekonomi, pendidikan hingga sosial. Pancasila merupakan pegangan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk agar bisa hidup tentram dan damai.	Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara
			7	Dewasa ini, pengelolaan masalah keberagaman dan perbedaan di Indonesia semakin minim. Pancasila telah berhasil menjawab persoalan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yakni memberikan identitas bersama dalam kemajemukan kita yang sangat kompleks. Diharapkan ke depannya pun Pancasila tetap terus merekatkan NKRI.	Kab. Asahan, Sumatera Utara
			8	Indonesia merupakan negara dengan beragam suku dan budaya. Kita harus belajar dari pengalaman Uni Soviet dan Yugoslavia yang pecah menjadi dua negara karena konflik agama, dimana Indonesia jangan sampai mengalami hal tersebut. Indonesia harus berpegang pada Pancasila agar NKRI tetap utuh dan berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika agar masyarakat Indonesia bisa terus saling menghargai satu sama lain.	Kab. Karo, Sumatera Utara
			9	Setiap warga Indonesia berkewajiban melestarikan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan MPR sebagai lembaga aspiratif harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengkajian sistem ketatanegaraan dan penyelesaian setiap konflik maupun isu berdasarkan nilai-nilai Pancasila.	Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara
			10	Radikalisme dan terorisme masih menjadi pergumulan kebangsaan kita. Konflik karena kebijakan pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dirasakan belum berkeadilan masih sering terjadi. Pancasila telah mempertahankan baik kesatuan maupun kemajemukan Indonesia secara dinamis. Pancasila merekatkan NKRI.	Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara
			11	Dengan diaturnya Pancasila pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan negara serta menjiwai ketentuan-ketentuan di dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945.	Kab. Karo, Sumatera Utara
			12	Ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi instrumen kebangsaan dan kenegaraan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan ke-Indonesiaan, sehingga hampir semua konflik dan kekerasan di Indonesia dapat teratasi dengan baik.	Kab. Asahan, Sumatera Utara
			13	Pancasila telah memastikan bahwa negara bangsa ini berhasil keluar dari segala ancaman yang berpotensi memporak porandakan negara persatuan karena kebersamaan semua anak bangsa yang majemuk. Pancasila telah memastikan bahwa pembangunan dan modernisasi Indonesia bisa berjalan karena adanya kerjasama dari semua elemen bangsa yang beragam.	Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara
			14	Penyamaan persepsi tentang Pancasila menjadi hal penting untuk mengawali langkah kedepan dalam menjalankan lima prinsip dasar Pancasila yang diwujudkan dalam setiap langkah kebijakan negara. Penyamaan persepsi atas Pancasila perlu terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara partisipatif dan jauh dari kesan dogmatis akan lebih memperkuat pemahaman penyelenggaraan negara dan masyarakat atas nilai-nilai yang menjadi arah perjalanan bangsa ini.	Kab. Demak, Jawa Tengah
			15	Situasi bangsa saat ini rawan terhadap perpecahan SARA, ancaman dari kelompok radikal, kepentingan pemilik modal dan orang-orang pragmatis yang banyak disebar sampai ke daerah. Oleh karena itu, penyampaian materi sosialisasi 4	Kab. Sikka, NTT

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				pilar dapat dikemas dalam berbagai bentuk sesuai kearifan lokal dan perkembangan teknologi informasi daerah masing-masing sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi.	
			16	MPR bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila sesuai Keputusan MPR RI Nomor 1 Tahun 2010. Dalam menjaring aspirasi, MPR harus memahami apa yang dikeluhkan masyarakat dan menjadi jalan untuk memberikan solusi. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, sehingga pengkajian nilai Pancasila juga harus diselaraskan seiring perkembangan jaman namun tidak menyalahi kaidah yang sesungguhnya.	Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
			17	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kabupaten Garut dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga, mencegah peredaran narkoba, membatasi penyebaran ajaran radikal dan isu-isu identitas yang dapat memecah belah persatuan warga. Untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkan penguatan kapasitas dan penguatan pemahaman hukum dan nilai-nilai Pancasila bagi anggota FKPM karena itu diminta kepada Pemerintah dan DPR untuk memberikan pelatihan pendidikan hukum dan Pancasila.	Kab. Garut, Jawa Barat
			18	Penguatan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan sekolah masih belum maksimal karena pendidikan Pancasila belum menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, seperti sebelumnya mata pelajaran khusus 'Pendidikan Pengamalan Pancasila' (PMP). Perlu disusun konsep dan metode pendidikan Pancasila yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif dalam kurikulum sekolah.	Kab. Garut, Jawa Barat
			19	Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi Negara Indonesia yang pluralistik. Pancasila menjunjung kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan.	Kab. Jepara, Jawa Tengah
			20	Pemerintah diharapkan berperan aktif memberikan materi sosialisasi penegasan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara kepada pelajar dan mahasiswa agar mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan dapat dipraktikannya dalam setiap perilaku para pelajar dan mahasiswa.	Kab. Garut, Jawa Barat
			21	Peran pemerintah pusat perlu diwujudkan dalam masyarakat yang berjiwa Pancasila dan menghargai kebhinnekaan.	Kab. Garut, Jawa Barat
			22	Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamental) untuk mengatur pemerintah negara atau dasar untuk mengatur peneyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosbud, pendidikan, maupun hankam).	Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat
			23	Pemerintah diharapkan bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk memasyarakatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa dan negara.	Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
			24	Sebagai negara kesatuan, masyarakat Indonesia sangat heterogen. Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan pedoman dalam berbangsa. Sejak era reformasi, bangsa Indonesia masih belum mencapai titik kesejahteraan hingga saat ini, meskipun terus ada perkembangan yang signifikan.	Kab. Indramayu, Jawa Barat

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				Dengan kedudukan Pancasila sebagai pedoman hidup, nilai Pancasila harus disosialisasikan lebih konkret mulai dari sila pertama mengenai ketuhanan hingga sila kelima yaitu mengenai keadilan sosial sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia bisa segera terealisasikan.	
			25	Penting menanamkan nasionalisme kepada para generasi muda melalui pengamalan Pancasila. Pendidikan karakter sangat diperlukan atas dasar : adanya kebutuhan nyata dan mendesak, proses transisi nilai sebagai proses peradaban, peranan sekolah sebagai pendidik moral yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat, tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang sarat konflik nilai, kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral, kenyataan yang sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai, persoalan moral sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan, dan adanya landasan dan dukungan terhadap moral di sekolah.	Kota Cirebon, Jawa Barat
			26	Para pendiri bangsa menegaskan Indonesia menganut Demokrasi Pancasila namun pada praktiknya kita menerapkan dan mengikuti pola dan tradisi demokrasi liberal, karena itu diminta kepada MPR untuk menegaskan kembali Demokrasi Pancasila di Indonesia.	Kab. Bogor. Jawa Barat
			27	Kebanggaan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan suatu keharusan. Selagi identitasnya masih tertulis sebagai warga negara Indonesia, Pancasila harus menjadi bagian dari kehidupan. Selain rakyat yang menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan pemerintah juga terus membangun kebanggaan terhadap Pancasila tersebut.	Kab. Garut, Jawa Barat
			28	Kebanggaan akan kepemilikan dasar negara Pancasila harus dimiliki setiap orang. Termasuk pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus menempatkan eksistensi dari kelima bulir Pancasila sehingga mampu mewudkan Pancasila sebagai pedoman hidup.	Kab. Bandung, Jawa Barat
			29	Pancasila sebagai pandangan hidup adalah keharusan. selagi identitasnya masih tertulis sebagai warga negara Indonesia, Pancasila haruslah menjadi bagian dari kehidupan.	Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
			30	Sila ke 5 yang berbunyi 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' belum tercapai karena masih banyak ketimpangan yang terjadi mulai dari bidang hukum hingga bidang pendidikan. Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari diterapkannya nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke 5.	Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
			31	Penyebaran paham radikal yang mengatasnamakan agama di Indonesia semakin meluas karena kurang pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa oleh karena itu setiap warga negara wajib menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Kab. Blora, Jawa Tengah
			32	Ada urgensi kuat bagaimana membumikan kembali nilai nilai Pancasila. sebelum orde reformasi ada kesan kuat tentang "formalisasi" Pancasila dimana Pemerintah memegang kendali kuat dalam upaya membumikan dasar negara sampai ke akar rumput. Kita selaku bangsa dan negara memang sudah saatnya kembali ke Pancasila dan UUD 1945 sebagai upaya menyelamatkan negeri dan bangsa ini dari potensi kehancuran.	Jambi
			33	MPR berpendapat bahwa seluruh persoalan yang dihadapi bangsa saat ini tidak terlepas dari faktor semakin memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Atas dasar pertimbangan ini pula, MPR menegaskan tugas kepada	Kab. Bireun, Aceh

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				seluruh anggota MPR untuk menggalakan dan memperkuat kembali nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat. salah satu bentuk kongkrit dari upaya tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara disetiap daerah pemilihan anggota MPR RI.	
			34	Liberalisme menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ketimuran. Sistem pendidikan harus menyediakan kurikulum yang memuat pendidikan nilai Pancasila agar dapat memupuk rasa nasionalisme, sehingga dapat memperkuat kembali nilai kebangsaan dan norma agama.	Kab. Aceh Timur
			35	Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila serta menjadikan Pancasila sebagai patokan untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah negara. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus selalu menjadikan Pancasila sebagai sumber kehidupan.	Makassar, Sulawesi Selatan
			36	Ragam budaya agama dan ras membuat bangsa Indonesia rentan dengan konflik horisontal. Perbedaan harus disikapi sebagai sebuah fakta bernegara yang memiliki ribuan pulau. Perlu adanya wadah pemersatu agar masyarakat yang majemuk tetap hidup rukun dan damai, Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah bangsa menjadi salah satu alat yang ampuh menyatukan keberagaman kita dalam berdemokrasi.	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
			37	Anggota MPR di harapkan terus melakukan sosialisasi 4 pilar dan ketetapan MPR, Bukan saja kepada Ormas tetapi diharapkan juga kepada pelajar.	Kab. Lumajang, Jawa Timur
			38	Pancasila merupakan salah satu dari empat pilar negara yang berfungsi sebagai pedoman hidup rakyat Indonesia. Sebagai negara yang heterogen, Pancasila menjadi satu kesatuan dengan Bhineka Tunggal Ika untuk membangun integritas Indonesia.	Kab. Tangerang, Banten
			39	Para pendiri bangsa menyepakati Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Namun melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR, terkesan mereduksi kedudukan Pancasila, dimana Kedudukan Pancasila disamakan dengan Konstitusi (UUD 1945), NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini jelas mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Bangsa karena itu diminta kepada MPR untuk tidak mengubah kedudukan Pancasila demi politik anggaran. Selain itu, MPR perlu u ntuk menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara.	Kab. Tangerang, Banten
			40	Perlu ditingkatkan daya saing bangsa (national competitiveness) untuk menjadi bangsa yang mandiri dengan berlandaskan pada Pancasila. Aktualisasi kemandirian tersebut dapat dilakukan melalui character enabler, character builders, dan character engineer oleh generasi muda Indonesia. Dengan dukungan dari seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah, diharapkan generasi muda dapat berperan sebagai komponen bangsa yang paling strategis dalam memainkan proses transformasi karakter dan tata nilai Pancasila di era globalisasi.	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
			41	Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfugsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia tidak boleh bersifat pragmatis, tidak boleh bersifat ideologis, harus menghormati	Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				HAM, dilaksanakan secara demokratis, dan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial.	
			42	Pancasila diarahkan utk menumbuhkan kepercayaan dan daya juang agar pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar-sila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Pancasila harus menjadi ideologi yg hidup, membawa manfaat riil bagi kehidupan warga, dan melayani baik kepentingan vertical (negara) maupun kepentingan horisontal (warga).Mengatasi krisis multidimensional yang melanda Indonesia, perlu dilakukan revolusi dalam tiga ranah diantaranya mental kultural, ranah political, dan ranah material. Dengan tiga revolusi ini, Pancasila akan menjadi sumber energi untuk melakukan perubahan dan trasnformasi sistem sosial mendasar.	Kab. Pekalongan, Jawa Tengah
			43	Ideologi tanpa pelaksanaan akan hilang makna. Atas dasar itu Pancasila harus dipertegas dalam pasal-pasal dan ayat-ayat UUD serta undang-undang dan peraturan turunannya agar dapat menjadi panutan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.	Kab. Pemalang, Jawa Tengah
			44	Indonesia masuk sebagai salah satu negara berpenduduk besar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yg cukup tinggi. Tantangan saat ini adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, membangun birokrasi yang bersih dan kompeten, menggeser sumber daya saing dari kelimpahan faktor produksi ke daya tarik investasi dan inovasi serta membangun modal sosial yang kuat dan tahan dari rongrongan berbasis SARA sesuai Pancasila.	Kab. Pemalang, Jawa Tengah
			45	NIlai-nilai Pancasila tidak dapat menjadi sumber acuan sikap dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini lambat laun, Pancasila akan kehilangan maknanya sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Didorong oleh keprihatinan yang meluas terhadap kondisi ini, muncul berbagai gagasan untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila.	Kab. Pekalongan, Jawa Tengah
			46	Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup, membawa manfaat riil bagi kehidupan warga, dan melayani baik kepentingan vertical (negara) maupun kepentingan horisontal (warga).Dalam kontestasi antarideologi yg terjadi saat ini, Pancasila harus memiliki peran vital untuk tetap menjadi sumber pemersatu bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pacuan peradaban antar bangsa. Salah satunya adalah lembaga MPR yang terus diperjuangankan eksistensinya dalam menyebarkan ideologi Pancasila.	Kab. Batang, Jawa Tengah
			47	Praktek politik Identitas telah memutuskan semangat kekeluargaan, persatuan, dan rasa solidaritas serta mengikisnya semangat nasionalisme menjadi ancaman eksistensi negara karena itu segera mengambil tindakan secepatnya untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi Negara Republik melalui jalan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila.	Sumatera Utara
			48	Dalam konteks pembangunan nasional, pendekatan yang dianggap dapat memperkuat ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan adalah wacana menghidupkan kembali GBHN. Pendekatan GBHN dianggap dapat menjadi payung ke-Indonesiaan dan koridor ketatanegaraan dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.	Kab. Asahan, Sumatera Utara
			49	Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia serta bersumber dari pandangan hidup bangsa. Oleh karena	Kab. Karo, Sumatera Utara

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				itu, ideologi Pancasila milik semua rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, rakyat Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	
			50	Pancasila sebagai dasar negara mendapat tantangan bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, melalui gerakan bersenjata maupun pergulatan di lembaga-lembaga yang secara konstitusional dibentuk oleh negara. Salah satu solusinya adalah Pancasila bukan hanya harus dijiwai saja, tetapi juga harus tercermin dalam setiap peraturan hukum di Indonesia.	Kab. Nagekeo, NTT
			51	Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas bentuk pendidikan moral ala penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang tidak bersifat doktrinasi/propaganda seperti saat masa pemerintahan Orde Baru. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga merasa bahwa kegiatan penataran P4 masih penting untuk diberikan di sekolah formal dan untuk pasangan yang mau menikah di KUA, sehingga gagasan ini menjadi penting untuk segera direalisasikan.	Jawa Barat
			52	Pancasila pada dasarnya jangan disejajarkan dengan Islam, karena Agama Islam adalah Wahyu Allah. Meskipun nilai-nilai Pancasila ada sebagian di dalam ajaran Islam, namun pemahaman ini tidak boleh salah ditempatkan agar tidak terjadi penyimpangan seperti kelompok orang yang anti terhadap Pancasila.	Jawa Barat
			53	Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai identitas dan jati diri. Pancasila tersebut turut membentuk cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun saat ini, keadilan dianggap belum merata. Hal ini bukan dikarenakan pemerintah tidak mengusahakannya, namun karena banyak faktor. Salah satunya adalah keterbatasan yang perlu dibenahi, termasuk penegakan hukum yang juga masih dianggap belum adil dan menyeluruh.	Jawa Barat
			54	Adat sunda mengenal rasa silih asah, silih asih, dan silih asuh, yang dipahami bahwa merawat kebhinekaan maka merawat Negara juga. Masyarakat sebaiknya tidak saling menghujat dan mencela kelompok atau golongan yang berbeda. Terkhusus untuk umat Islam, jika dicermati pada sebagian perumus Pancasila pada sidang BPUPKI merupakan ulama, sehingga sila-sila Pancasila begitu selaras denga nilai-nilai ajaran Islam dan menjadi penting untuk terus dihayati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Jawa Barat
			55	Jati diri adalah keyakinan dan cita-cita, seperti halnya dalam kehidupan bangsa kita terdapat cita-cita bangsa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dan harus kita rawat dan perjuangkan terus. Berkaitan dengan cita-cita kita dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga, terdapat cita-cita yang harus diperjuangkan juga yaitu mewujudkan ketahanan keluarga yang baik.	Jawa Barat
			56	Semua bangsa di dunia memiliki Ideologi yang secara sederhana merupakan nilai dasar sebuah cita-cita. di Indonesia, cita-cita bangsa tersebut dapat diukur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat perlu terus mengamalkan nilai Pancasila tersebut agar tercermin kebersamaan yang menghormati perbedaan.	Jawa Barat
			57	Pemerintah dengan dukungan MPR terus meningkatkan program membumikan dan memasyaratkan Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal Ika). Hal ini dilakukan dengan harapan rakyat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung	Sulawesi Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				dalam dasar negara tersebut dan menolak ideologi lain yang dapat mengancam Persatuan dan Kesatuan Indonesia.	
			58	Kualitas nilai Pancasila sebagai suatu ideologi tidak perlu diragukan. Agar tetap mengakar dalam kehidupan, maka: (a) ideologi tersebut harus difahami, dan bagaimana sikap dan perilaku masyararakat terhadapnya; (b) terdapat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan ideologi tersebut tanpa menghilangkan jatidiri ideologi dimaksud, dan; (c) seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu membudaya dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara masih memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan, memantapkan, memapankan, dan mengokohkan Pancasila. Untuk itu perlu adanya usaha secara serius, dengan jalan mengimplementasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	Kab. Bireuen, Aceh
			59	Sejauh mengenai Pancasila sebagai suatu ideologi faktor pertama mengenai kualitas nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak perlu diragukan, tetapi faktor: (a) bahwa ideologi tersebut difahami, dan bagaimana sikap dan perilaku masyararakat terhadapnya; (b) terdapat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan ideologi tersebuttanpa menghilangkan jatidiri ideologi dimaksud, dan; (c) seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu membudaya dan diamalkan dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; masih memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan, memantapkan, memapankan, dan mengokohkan Pancasila. untuk itu perlu adanya usaha secara serius, dengan jalan mengimplementaskan Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	Kota Langsa, Aceh
			60	Sekolah perlu diberi materi sosialisasi penegasan Pancasila sebagai dasar negara agar mampu mengamalkannya dalam setiap perilaku para siswanya dalam keseharian.	Kab. Garut, Jawa Barat
			61	Mengakar dan meluasnya ideologi radikal di luar Ideologi Pancasila yang berpotensi memecah belah integrasi sosial politik perlu dicegah. Oleh karena itu, diminta untuk mempertegas dan membatasi setiap upaya penyebaran ideologi radikal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diminta pro aktif menegaskan dan membumikan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.	Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
			62	Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses pembentukan Pancasila sangat lama, Pancasila memuat aspek keagamaan dan keduniawian, Pancasila berkembang dari pemikiran-pemikiran baru dalam kehidupan bernegara.	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
			63	Peran bersama antar komponen bangsa, pemerintah, swasta dan masyrakat benar-benar diperlukan untuk membangun dan menggiring semangat dan wawasan kebangsaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang didesain untuk menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan ditunjang oleh pandangan wasantara.	Kab. Balangan, Kalimantan Selatan
			64	Pengamalan Pancasila bagi generasi muda dapat dilakukan dengan cara 'Menunjukkan Sikap Positif terhadap Pancasila", melalui refleksi sejarah; upacara bendera; memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa; pembelajaran pendidikan kewarganegaraan; pengenalan tokoh sejarah;	Kab. Indramayu, Jawa Barat

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				dan memakai serta mencintai produk hasil produksi dalam negeri.	
			65	Pengamalan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia tak terlepas dari upaya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sifat Nasionalisme dan Patriotisme adalah kunci untuk mempersatukan seluruh kalangan masyarakat Indonesia	Kab. Indramayu, Jawa Barat
			66	Pendidikan Pancasila penting untuk dipahami oleh anak didik. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik akan mampu memanusiakan manusia Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki IPTEK dan seni yang dipelajarinya. Diharapkan bahwa negara Indonesia unggul dalam penguasaan IPTEK dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya bahwa ia lahir dari keragaman budaya bangsa.	Kab. Kuningan, Jawa Barat
			67	Pancasila sebagai dasar negara menjiwai pembentukan pembukaan dan pasal-pasal dari UUD NRI Tahun 1945. Sebagai konstitusi tertulis, UUD menjadi sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan UUD yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.	Kab. Tegal, Jawa Tengah
			68	Pengamalan Pancasila harus menjalankan nilai-nilai yang bewujud norma etik secara pribadi dan kelompok dalam bertingkah laku dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.	Kab. Tegal, Jawa Tengah
			69	UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dan sumber hukum tertinggi dengan muaranya adalah Pancasila. Konstitusi bagi kehidupan bernegara berfungsi memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.	Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
			70	Pancasila sebagai dasar negara menjiwai pembentukan pembukaan pasal-pasal dari UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai konstitusi tertulis, UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi. Produk-produk hukum seperti ketetapan MPR, Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang muaranya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.	Kab. Bandung, Jawa Barat
			71	Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peratutan yang lebih tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara.	Kab. Bandung, Jawa Barat
			72	Perlu dipahami secara memadai makna Empat Pilar, Sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif, dan bijaksana terhadap Empat Pilar dimaksud, dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara singkat perlu disampaikan makna arti Pilar Pancasila, Pilar UUD 1945, Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pilar Bhineka Tunggal Ika yang dilukiskan secara indah dan nyata dalam lambang negara Garuda Pancasila.	Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan
			73	Gerakan membumikan Pancasila sangat penting untuk terus dilakukan karena Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa selalu menghadapi ancaman. Bangsa Indonesia tidak dapat menghindari dinamika globalisasi, termasuk kelompok penyebar paham radikal, sehingga perlu peran komponen bangsa, termasuk masyarakat untuk dapat terus	Jawa Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	
			74	Nilai sebuah ideologi dapat diterapkan di kehidupan masyarakat dengan memahami bahwa ideologi terutama Pancasila bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif, dalam arti mampu mengadaptasi perubahan sesuai dengan aspirasi bangsa. Selain masyarakat yang perlu terus mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, MPR juga memiliki tugas untuk mengawal ideologi tersebut.	Kab. Rembang, Jawa Tengah
			75	Secara luas makna Pancasila sebagai ideologi ini merupakan sebuah visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemaunisaan, persatuan, kerakyatan dan kedailan. Selain itu, Pancasila juga bisa digunakan sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Tindakan yang menentang Pancasila sebagai dasar negara harus mendapat sanksi hukum	Kalimantan Barat
			76	Kegiatan sosialisasi 4 pilar penting untuk dilakukan terutama bagi generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan sekaligus mampu melawan gerakan radikalisme yang berkembang di masyarakat. Waktu sosialisasi pun perlu ditambahkan supaya masyarakat maupun pelajar lebih memahami dengan benar empat konsensus kebangsaan tersebut.	Kota Ambon, Maluku
			77	Dalam menangkal aksi-aksi radikalisme yang terjadi di masyarakat haruslah melakukan penguatan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu penguatan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sehingga tidak ada paham apapun yg masuk ke negara kita.	Kota Ambon, Maluku
			78	Sosialisasi 4 pilar perlu dilaksanakan dengan strategi khusus untuk mengantisipasi situasi bangsa yang saat ini rawan terhadap perpecahan SARA. Ancaman dari kelompok radikal, kepentingan pemilik modal, dan orang-orang pragmatis yang banyak disebar melalui media sosial yang bertujuan merusak kebangsaan dan kebhinekaan tampak semakin tidak terbendung dan sampai ke daerah. Oleh karena itu, metode penyampaian materi dapat dikemas dalam berbagai bentuk sesuai kearifan lokal daerah masing-masing sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi.	Kec. Golewa, NTT
			79	Sosialisasi 4 pilar kepada seluruh elemen bangsa perlu untuk memperkuat integrasi bangsa. Kebiasaan yang sudah berkembang seperti gotong royong, kerukunan umat beragama, kesadaran akan keragaman suku, kesadaran akan perbedaan potensi daerah, dan kesadaran akan banyaknya partai politik perlu terus menjadi identitas bangsa sehingga akan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.	Kab. Cianjur, Jawa Barat
			80	Dengan mengakarnya nilai 4 pilar di dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan tercipta sistem kehidupan yang teratur dan terarah. Sebagai nilai instrumental, nilai-nilai kebangsaan tersebut melandasi pengelolaan pemerintahan negara maupun dalam membangun hubungan dengan negara lain. Sebagai jati diri bangsa, nilai tersebut berwujud sikap dan perilaku yang nampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Gorontalo
			81	Pancasila haruslah menjadi pijakan dan membantu untuk mewujudkan tujuan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan seluruh masyarakat.	Lampung
			82	Sejak dicabutnya TAP MPR Nomor II/ MPR/1978, sebenarnya kita mengalami masa kekosongan konsepsional mengenai pengembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa	Lampung

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				dan negara. Sampai saat ini, belum ada peraturan perundangan yang menjelaskan isi, makna atau kandungan Pancasila. Kekosongan ini menyebabkan tafsir Pancasila hanya sebatas pada UUD 1945 dan hasil-hasil amandemennya. Pokok-pokok pikiran dalam amandemen UUD 1945 dan TAP MPR sebenarnya sudah jelas, namun pokok-pokok pikiran tersebut menjadi sirna tatkala memasuki wilayah UU. sejauh ini belum ada upaya serius untuk mensosialisasikan Pancasila.	
			83	Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pada tahap implementasinya masih sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang belum sesuai dengan harapan. Penyebabnya masih banyak yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, kelompok maupun golongannya sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak.	Kota Palu, Sulawesi Tengah
	3	Penegakan Etika Kehidupan Berbangsa	1	Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan.	Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
			2	Identitas Bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan dan terus menerus berkembang atau seperti yang telah dirumuskan Bung Karno merupakan ekspresi dari roh kesatuan Indonesia, kemauan untuk bersatu dan mewujudkan sesuatu yang bermuatan nyata. Perwujudan identitas bangsa Indonesia tersebut jelaslah merupakan hasil proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan in-formal.	Jawa Tengah
			3	Pemerintah Pusat diharapkan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang arti penting kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kebhinnekaan.	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
			4	Fungsi dan manfaat UUD 1945 bagi warga negara, bangsa dan negara adalah sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.	Kab. Indramayu, Jawa Barat
			5	Adalah penting membuat gerakan cinta tanah air disegala lini agar terjalin kerjasama dalam menghalau ideologi yang berasal dari luar negeri.	Kab. Ciamis, Jawa Barat
			6	Penyebab memudarnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia antara lain karena faktor internal yaitu kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah dan tertinggalnya Indonesia dari bangsa lain dalam banyak bidang; faktor eksternal adanya pengaruh negatif dari arus globalisasi dan modernisasi.	Jawa Tengah
			7	Penguatan Wawasan Nusantara sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu terus dilakukan.	Kota Bogor, Jawa Barat
			8	Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai lluhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.	Kab. Maluku Tengah, Maluku
			9	Membina bangsa Indonesia yang multikultural memerlukan upaya yang berkesinambungan serta berkaitan dengan aspek agar tercapai integrasi nasional melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu dengan mengadakan proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan informal tentang prinsip bersatu dalam perbedaan karena individu dalam masyarakat majemuk haruslah memiliki kesetiaan ganda terhadap bangsa-negaranya. Mereka juga tetap memiliki keterikatan terhadap identitas kelompoknya, namun mereka	Makassar, Sulawesi Selatan

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				menunjukan kesetiaan yang lebih besar pada bangsa Indonesia.	
			10	Krisis terhadap nasionalisme merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Bangsa Indonesia. Ada banyak isu yang menumbuhkan rasa sentimen daripada rasa toleransi khususnya isu agama. Bangsa Indonesia harus merefleksi ulang makna dari NKRI bahwa keberagaman dan perbedaan merupakan nyawa dari NKRI itu sendiri.	Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan
			11	Penguatan jati diri dan karakter bangsa membutuhkan gerakan nasional yang diikuti oleh seluruh anggota masyarakat secara berkesinambungan yang disertai dengan komitmen yang tinggi. Jati diri dan karakter bangsa tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi pada taraf wacana, melainkan tercermin dari perilaku seluruh elemen masyarakat.	Kab. Aceh Utara, Aceh
			12	Peranan Konstitusi bagi kehidupan negara untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan Pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.	Kab. Bandung, Jawa Barat
			13	Generasi muda perlu menguatkan semangat kebangsaan dengan memahami substansi dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan merupakan pemahaman rakyat atau masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang telah diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Ags 1945. Paham kebangsaan itu tidak menampatkan bangsa Indonesia lebih dari bangsa lain, tetapi menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban manusia.	Kab. Grobogan, Jawa Tengah
			14	Terjadinya perubahan UUD 1945, berdampak terhadap perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR. Nilai-nilai kebangsaan pada hari ini semakin memudar dan ditinggalkan sebagai panduan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. persoalan utama yang muncul adalah degradasi moral dan nasionalisme sehingga berimplikasi berbagai masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak terlepas dari faktor semakin memudarnya nilai-nilai kebangsaan.	Kab. Aceh Utara, Aceh
			15	Karakter bangsa yang terangkum dalam Pancasila menjadi sangat penting untuk terus dihayati, diamalkan, dan dikembangkan supaya terus menjadi pemandu arah pembangunan Indonesia di masa kini, maupun masa yang akan datang.	Kota Bekasi, Jawa Barat
	4	Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional	1	Peningkatan pemahaman terhadap kemajemukan sosial budaya sebagai pencitraan dari budaya bangsa Indonesia yang semakin dewasa merupakan upaya membangun citra diri didasarkan aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke bhinnekaan yang dimiliki. untuk merealisasikan harapan ini, masyarakat dan segenap komponen bangsa harus lebih dewasa dalam mengaktualisasikan pemahaman nilai-nilai kebhinnekaan.	Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
			2	Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki banyak masyarakat tradisional yang belum berpikir modern dan cenderung primordialis dan intoleran. di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh baik maupun buruk. Pemahaman dan implementasi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam "empat pilar" harus dijaga demi keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.	Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			3	Upaya strategis yang perlu dilakukan dalam melaksanakan koordinasi gerakan revitalisasi kebangsaan: 1. Character builder (pembangun-kembali karakter bangsa) 2. Character enabler (pemberdaya karakter) 3. Character engineer (perekayasa karakter)	Kota Sibolga, Sumatera Utara
			4	Kesamaan nasib sebagai warga Nusantara di masa penjajahan harus menjadi modal bagi rasa persatuan masyarakat sebuah bangsa dan negara.	Kab. Langkat, Sumatera Utara
			5	Dari masukan-masukan yang diperoleh selama ini mengerucut pada solusi mendasar bangsa ini untuk meluruskan kembali arah perjuangannya dengan mengembalikan sistem pengelolaan negara kepada tujuan awal didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. hal ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang ahistoris (melupakan sejarah pendiriannya).	Kab. Demak, Jawa Tengah
			6	Arah kebijakan dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah menjadikan nilai-nilai agama dan nila-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka, dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga menjawab tantangan sesuai dengan visi indonesia masa depan.	Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
			7	NKRI Harga Mati adalah Nasionalisme Absolut. Tekad tersebut menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah digoyahkan atau diadu domba oleh cara apapun.Sudah saatnya pemikiran bangsa kita harus berorintasi kedepan dalam artian tidak berpikiran ke arah kepentingan yang sifatnya sementara, sampai harus merelakan saudaranya sendiri untuk dimusuhi. Kepentingan Negara atau kepentingan Bangsa itu harus diatas segalanya, sehingga jangan sampai pesta demokrasi merusak sendi-sendi kebangsaan kita.	Kab. Indramayu, Jawa Barat
			8	Indonesia adalah sebuah novum, yang terdiri dari kemajemukan yang berkeinginan menyelesaikan persoalan bersama. Hal itu yang perlu terus-menerus dibina.	Kab. Kuningan, Jawa Barat
			9	Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dituntut untuk menghormati agama dan kepercayaan lain yang ada di Indonesia, menjaga dan merawat toleransi antar umat beragama; Bersama-sama pula menjaga persatuan Indonesia.	Kab. Rembang, Jawa Tengah
			10	Jika masyarakat mampu menggabungkan antara negara integralistik dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala aspek niscaya bangsa Indonesia akan mampu menuju taraf hidup yang sejahtera.	Jawa Tengah
			11	Pemahaman wawasan kebangsaan yang benar merupakan syarat mutlak untuk dapat mengelola perubahan yang terjadi baik di dalam negeri maupun dunia. Kemampuan itulah yang menjadi pembeda antara bangsa yang maju dan bangsa yang tertinggal.	Jawa Tengah
			12	NKRI tebentuk karena adanya kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerokhanian. Sebagai negara Pancasila, Indonesia menjunjung tinggi agama dan tuhan sebagai sang pencipta segala sesuatu. Ideologi Pancasila juga mengamalkan nilai-nilai yang menghormati keanekaragaman sehingga kehidupan berbangsa dan negara dapat berjalan sesuai konstitusi khususnya NKRI.	Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
			13	Pada dasarnya, unsur-unsur yang bisa mengobarkan semangat nasionalisme sehingga NKRI tetap terjaga yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan,	Kab. Mempawah,

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				kesatuan wilayah, dan kesatuan asa kerohanian. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa NKRI merupakan negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa.	Kalimantan Barat
			14	Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikulturisme perlu terus diperdalam dan diaplikasikan.	Maluku
			15	Berbagai permasalahan bangsa yang terjadi dsebabkan semakin lunturnya toleransi atas perbedaan dan kemajemukan diatara komponen bangsa. oleh karena itu, seluruh komponen bangsa dalam susunan suprastruktur, infrastruktur dan substruktur politik harus mampu membangun kembali komunikiasi politik yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa untuk mempertahankan nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan.	Kab. Jombang, Jawa Tengah
			16	Pemerintah harus mampu melihat secara komprehensif. Perbedaan dan keragaman adalah sebuah kekuatan yang harus mampu dimaksimalkan dan juga dioptimalkan. Menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah menjadi amanah Undang-undang Dasar 1945 secara bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta/asing, mampu memposisikan diri dan tidak memaksakan kehendak pribadi maupun golongan. Sinergritas antara swasta , pemerintah dan masyarakat harus tersusun dengan utuh, rapih dan saling memberikan kontribusi serta manfaat satu sama lain.	Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
			17	Walaupun selama era reformasi keberagaman mengalami banyak masalah, tetapi lambat laun terlihat semakin minimal. Harus diakui tidak mudah mengelola keberagaman dan perbedaan, apalagi dengan kompleksitas keberagaman Indonesia. Akan tetapi, Pancasila berhasil menjawab persoalan pokok tersebut, yakni memberikan identitas bersama dalam kemajemukan yang sangat komplek.	Kab. Dairi, Sumatera Utara
			18	Perlu upaya terus menerus untuk mewujudkan dan memperkuat serta mempertahankan keragaman bangsa Indonesia dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air.	Kab. Indramayu, Jawa Barat
			19	Keanekaragaman bangsa harus didudukan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman harus dinilai sebagai aset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralitas ini merupakan Sunnatullah. Dalam menegakkan pluralitas, hendaknya selalu mengacu pada prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945, bahwa yang diutamakan adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan individu.	Kab. Luwu, Sulawesi Selatan
			20	Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia selalu mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain.	Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan
			21	Realitas Rakyat Indonesia yang beragam suku, agama dan ras telah bersepakat untuk membentuk Negara Bangsa Indonesia dan bersepakat pula untuk hidup bersama dengan semangat persaudaraan dan kesetaraan. Namun demikian, semangat kebersamaan itu mulai terkikis seiring politisasi identitas demi kepentingan politik pragmatis. Untuk menghindari keterpecahan antar warga berbasis identitas, kami mengusulkan kepada MPR untuk merancang sistem Pemilu yang membatasi politisasi identitas (mengatur tata	Kalimantan Barat

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				cara kampanye dan pembatasan isu SARA dalam kampanye serta mengatur sanksi yang tegas kepada para pihak yang memprovokasi dan memecah belah warga dengan isu SARA. Selain itu, kami juga meminta kepada anggota MPR untuk pro aktif memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai perekat Bangsa kepada masyarakat.	
			22	Semboyan Bhineka Tunggal Ika mempunyai peran terhadap bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional ditengah masyarakat yg majemuk.	Kab. Berau, Kalimantan Timur
			23	Rasa nasionalisme harus dimiliki tiap-tiap anak bangsa. Jangan biarkan derasnya arus globalisasi membuat kita melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia, hingga menghilangkan rasa nasionalisme yang ada dalam diri kita.	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
	5	Politik Dalam Negeri	1	Diminta kepada MPR untuk meninjau ulang wacana penguatan kewenangan MPR dalam menetapkan TAP MPR dan menyusun GBHN karena wacana itu akan mengurangi kewenangan pemerintah (Presiden) untuk membuat program perencanan pembangunan nasional sesuai janji politiknya serta memperlemah sistim presidensial yang dianut.	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
			2	Teori hierarki memudahkan untuk menemukan keaseimbangan hukum dan keharmonisan hukum yang selasras dan serasi. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.	Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara
			3	Terkait isu menghidupkan kembali GBHN, pada prinsipnya RPJP serupa dengan GBHN, namun yang menjadi persoalan RPJP tidak pernah disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Meskipun RPJM sebenarnya lebih detail, namun hanya aparatur pemerintah saja yang paham mengenai dokumen tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi terkait RPJP perlu terus digencarkan agar semua pihak paham mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan.	Kab. Batu Bara, Sumatera Utara
			4	Pentingnya GBHN dalam pembangunan nasional. GBHN dalam fungsinya sebagai visi misi bangsa Indonesia berguna untuk menentukan arah pembangunann nasional. Jadi, semua pembangunan Indonesia terarah dan terancang jelas di dalam GBHN.	Kab. Dairi, Sumatera Utara
			5	Bagaimana sistem ketatanegaraan di Indonesia apabila GBHN di hidupkan kembali.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
			6	Pemerintah kurang mendengar dan memperhatikan aspirasi Rakyat terutama saat musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan nasional karena itu, diminta kepada pemerintah untuk mendengar aspirasi dan usulan rakyat serta mendorong persolan rakyat menjadi agenda pokok pembahasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
			7	Dengan adanya rencana pembangunan, para penyelenggara negara mempunyai pegangan dan sasaran serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. MPR telah membuat rancangan GBHN yang diganti nama menjadi PHN. Diharapkan perbaikan PHN dapat menjadikan arah arus pembangunan lebih jelas dan tegas, memiliki kontinuitas atau fungsi yang berkelanjutan pada setiap periode kepemimpinan.	Kota Semarang, Jawa Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			8	Indonesia perlu menerapkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta lingkungan hidup dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral kegiatan pembangunan. Proses pembangunan tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa.	Kab. Indramayu, Jawa Barat
			9	Ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamis yang meliputi segala aspek kehidupan nasional dengan terintegrasi. Fungsi ketahanan nasional tersebut dapat diwujudkan apabila ketahanan nasional dapat menjamin pembangunan nasional berjalan lancar menuju tujuan yang hendak dicapai. Diharapkan pemerintah senantiasa meningkatkan pembangunan sumber daya manusia karena merupakan salah satu bagian penting dari unsur pembentukan ketahanan nasional.	Kab. Sleman, DIY
			10	Pada dasarnya, hierarki peran pimpinan nasional dalam komponen bangsa adalah sebagai penggerak untuk menjalankan kehidupan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpinan nasional dilandasi paradigma nasional dengan kemampuan: (1) memantapkan integrasi bangsa dan solidaritas nasional; (2) mementingkan stabilitas nasional untuk meningkatkan rasa kebangsaan; (3) memahami perubahan dan melaksanakan pembaharuan dalam manajemen pemerintahan; dan (4) menggunakan pendekatan politik dalam upaya pencarian solusi untuk menangani permasalahan dalam kehidupan masyarakat.	Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur
			11	Politik pemilu pasca 2014 ditandai dengan menguatnya politisasi identitas. Isu Suku, Agama, Ras dan Ideologi tertentu digunakan oleh politisi tertentu untuk membangun citra negatif kepada lawan politknya. Politisasi identitas tersebut berpeluang memperlemah nilai demokrasi, merusak integrasi sosial dan mengganggu stabilitas sosial politik karena itu diminta kepada MPR untuk mendorong penguatan demokrasi di Indonesia dengan cara memberikan pendidkan politik kepada kader Partai Politik dan anggota organisasi masyarakat yang berafliasi dengan partai politik tertentu.	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
			12	Menurut konstitusi, Indonesia adalah negara kesatuan. Namun terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci di dalam UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Wewenang pemerintah pusat ada di 6 urusan wajibnya yaitu: pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter, agama, dan pendidikan.	Jawa Barat
			13	Kecurangan pemilu dapat dihindari jika prasyarat demokrasi diperkuat lebih awal, antara lain menggunakan pendidikan yang relatif memadai untuk memilih wakil rakyat dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat untuk menghindari money politics.	Kel. Kenali Asam, Jambi
			14	Sebagai negara yang ideal, Indonesia harus memiliki 3 landasan, yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Reformulasi atau penghidupan kembali GBHN merupakan landasan operasional yang bertugas melaksanakan landasan idiil dan landasan konstitusional. Penguatan MPR dengan pemberian kewenangan membentuk GBHN akan memudahkan terbentuknya negara yang ideal.	Semarang, Jawa Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			15	Dengan adanya GBHN dimaksudkan bisa diberikan arah penyelenggaraan dan pembangunan negara untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyrakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera.	Semarang, Jawa Tengah
			16	Penataan MPR walaupun diwarnai perdebatan mengenai mengembalikan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara atau tidak, tetapi ada aspirasi kuat untuk memberikan kewenangan kepada MPR membuat ketetapan MPR yang bersifat mengatur. Dengan kewenangan ini MPR bisa menetapkan haluan negara seperti GBHN.	Semarang, Jawa Tengah
			17	Pemberlakuan kembali GBHN adalah hal yang tidak bertentangan dgn UUD 1945 bahkan GBHN dapat mengoptimalkan penggunaan keuangan negara sehingga keuangan negara dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. GBHN perlu dihidupkan kembali guna mencapai tujuan bangsa.	Semarang, Jawa Tengah
			18	Negara seluas Indonesia memerlukan GBHN sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. GBHN dapat dirumuskan melalui 3 cara yaitu, sepenuhnya disusun oleh MPR, disusun oleh lembaga lain namun tetap bersumber pada UUD, dan dipecah dalam dua bagian, yaitu sebagian ditetapkan oleh MPR dan sebagian menjadi bagian dari SPPN. Salah satu dari skenario tersebut harus berjalan agar dapat mewujudkan negara yang ideal.	Kab. Blora, Jawa Tengah
			19	GBHN dapat membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi dan misi negara. Penghidupan kembali GBHN menimbulkan pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, secara substansional, aspirasi rakyat mengehendaki reformasi GBHN.	Kota Salatiga, Jawa Tengah
			20	MPR perlu kembali diberikan kewenangan untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat mengatur, sehingga MPR bisa menetapkan haluan negara.	Kab. Blora, Jawa Tengah
			21	Sebagai negara yang ideal, Indonesia harus memiliki 3 landasan, yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Reformasi atau penghidupan kembali GBHN merupakan landasan operasional yang bertugas melaksanakan landasan idiil dan landasan konstitusional. Penguatan MPR dengan pemberian kewenangan membentuk GBHN dapat membantu mewujudkan negara yang ideal.	Semarang, Jawa Tengah
			22	Negara sebaiknya memperbaiki sistem pembangunan agar terarah dan mencapai tujuan bangsa, sehingga perlu berfokus pada haluan negara menuju Indonesia 2045 dengan istilah Tri Jangka. Isi dari Tri Jangka yaitu: 1) Ekonomi - pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang adil, mandiri dan memanfaatkan teknologi; 2) Politik - memantapkan sistem negara yang bersatu, demokratis, etis, dan ideologis; 3) sosial budaya - menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, dengan SDM yang manusiawi, berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.	Semarang, Jawa Tengah
			23	Untuk menata ulang tugas dan wewenang lembaga Tinggi Negara terutama antara lembaga MPR dan Mahkamah Konstitusi serta Lembaga Kepresidenan (dalam hal kewenangan penafsiran Konstitusi dan Penyusunan Haluan Pembangunan Nasional) serta antara DPR dan DPD RI (dalam hal penguatan fungsi legislasi DPD) maka diperlukan perubahan kelima UUD 1945 dengan cara adendum.	Kab. Grobogan, Jawa Tengah
			24	Karena arah bahwa reaktivasi GBHN disertai dengan penguatan MPR, Maka diperlukan persiapan langkah-langkah untuk mempersiapkan amandemen Undang-undang	Kab. Blora, Jawa Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				Dasar, sehingga keputusan ini merupakan domain MPR. Kalau merunut proses yang sudah dipersiapkan sejak MPR periode 2009-2014, yang akhirnya dirumuskan dalam rekomendasi yakni keputusan MPR nomor 4 tahun 2014, secara prosedural sebenarnya sudah berjalan. Bahkan dengan dibentuknya Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR, sudah mempersiapkan dan mengantisipasi jika ada aspirasi yang ditangkap oleh anggota MPR dan diteruskan sebagai usulan amandemen Undang-undang Dasar.	
			25	GBHN sangat diperlukan karena saat ini acuan dari sistem pembangunan di daerah saling berbenturan dengan pusat sehingga menjadi tidak efektif. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan terhambat dan kesenjangan sosial ekonomi daerah masih terasa. Pemberlakuan kembali GBHN merupakan solusi karena dapat mengoptimalkan penggunaan keuangan negara secara lebih efektif dan efisien.	Kab. Rembang, Jawa Tengah
			26	Saat ini anggota DPD kurang pro aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah, baik berupa usulan program maupun usulan RUU yang berkaitan dengan urusan daerah kepada DPR karena terbatasnya kewenangan legislasi. Oleh karena itu, diminta kepada Anggota MPR untuk mendorong penguatan kewenangan DPD RI melalui perubahan ke 5 UUD 1945.	Kota Solo, Jawa Tengah
			27	Salah satu arah pembangunan saat ini adalah mengembalikan posisi dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan mereaktivasi GBHN sebagai model atau sistem perencenaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari berbagai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai konstitusi pembangunan, model GBHN akan lebih mempertegas tujuan akhir pembangunan, serta tahapan pencapaian, skala prioritas, apa dan bagaimana pelaksanannya. Selain itu, karena dikonstruksikan sebagai konstitusi, maka GBHN akan bersifat mengikat dan absolut sehingga diharapkan akan dijalankan secara konsisten bagi seluruh pengemban amanat kedaulatan rakyat.	Kota Magelang, Jawa Tengah
			28	Untuk memperkuat lembaga parlemen, terutama memperkuat lembaga DPD sebagai lembaga perwakilan yang anggotanya merepresentasikan rakyat di daerah diperlukan untuk melakukan perubahan ke-5 UUD 1945.	Maluku Tengah, Maluku
			29	Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi penting untuk dilakukan karena sangat berkaitan dengan wewenang sebagai anggota DPD yang terbatas. Selain usul penguatan lembaga DPD, pokok-pokok usul perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 yaitu penguatan sistem presidensial, penguatan lembaga perwakilan, penguatan otonomi daerah, calon presiden perseorangan, pemilihan umum nasional dan pilkada, forum previlegiatum, optimalisasi peran MK, penambahan pasal HAM, penambahan bab Komisi Negara, serta penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian.	Kota Ambon, Maluku
			30	Kerjasama yang baik antara komunitas intelejen, pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik serta masyarakat menghasilkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap potensi konflik sehingga tidak akan terjadi perpecahan.	Kab. Klungkung, Bali
			31	Amandemen UUD NRI 1945 telah mengubah sistem presidensial sesuai dengan dinamika politik dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	Prov. DKI Jakarta
			32	Keniscayaan amandemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu hal yang mendesak untuk segera dilakukan dalam rezim reformasi yang mengakomodasi transformasi	Kota Balikpapan,

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				struktural sistem dan bangunan ketatanegaraan, demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih demokratis. Bangunan sistem ketatanegaraan Indonesia dan sistem politik merupakan urat nadi dalam memutar roda pemerintahan, sehingga perubahan merupakan langkah urgent sebagai upaya menjaga tatanan ideal bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan produktif.	Kalimantan Timur
			33	Wacana memperkuat kewenangan MPR terutama untuk memberikan kewenangan membuat naskah Arah Perencanaan pembangunan nasional semacam GBHN perlu dipertimbangkan ulang karena wacana itu berpotensi memperlemah kedudukan dan kewenangan Presiden (eksekutif) dan memperkuat kewenangan parlemen.	Sumatera Utara
			34	Wacana penataan dan memperkuat kewenangan MPR untuk meminta pertanggungjawaban pimpinan lembaga negara, khususnya Presiden tidak relevan karena Presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR.	Sumatera Utara
			35	Reformulasi GBHN dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: 1) amandemen UUD; 2) penetapan melalui TAP MPR dengan terlebih dahulu membuat UU MPR; dan 3) perubahan UU RPJP menjadi UU GBHN.	Sumatera Utara
			36	Dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan, sebagian besar aspirasi menyetujui menghidupkan kembali perencanaan nasional model GBHN. Dalam penyusunan GBHN (dalam kewenangan MPR) dapat melibatkan semua elemen masyarakat Indonesia. MPR dianggap sebagai lembaga yang paling tepat untuk kembali diberi wewenang menetapkan sistem perencanaan nasional model GBHN.	Sumatera Utara
			37	GBHN penting untuk dihidupkan kembali karena proses penyusunannya dapat melibatkan semua elemen masyarakat Indonesia. Selain itu, GBHN mempunya kekuatan hukum yang mengikat seluruh lembaga negara, dan karenanya seluruh lembaga negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai kewenangannya. Selain itu, muatan GBHN haruslah penjabaran dari seluruh sektor pembangunan yang mencerminkan kedaulatan di segala bidang berdasarkan Pancasila.	Sumatera Utara
			38	Melalui saluran-saluran komunikasi yang dimiliki, anggota MPR hendaknya mampu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk dapat menjaga situasi dan kondisi sosial politik Negara kita agar tetap kondusif untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persaingan dalam Pemilu tidak perlu menjadi permusuhan yang dapat merusak hubungan persaudaraan sebangsa.	Kab. Pringsewu, Lampung
			39	Reformasi telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan perubahan sistem politik dan ketatanegaraan dalam bentuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan hingga 4 (empat) kali amandemen.	Kab. Sragen, Jawa Tengah
			40	Sistem ketatanegaraan merupakan suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Perlu diterapkan sistem yang adil dan bijaksana sehingga ambisi pemerintah terhadap negara ini dapat terwujud dengan optimal.	Kab. Wajo, Sulawesi Selatan
			41	Seiring berjalannya waktu dan Indonesia mengalami berbagai sistem pemerintahan saat ini, Indonesia yakin bahwa Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial dirasa masih cocok untuk diterapkan, akan tetapi kenyataannya dalam UUD 1945 merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem parlementer, sehingga para ahli menyatakan bahwa	Sulawesi Selatan

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				Indonesia cenderung merupakan sistem quasi presidensial (presidensial semu). organ negara di Indonesia pada masa reformasi mengalami pergeseran, dari yang semula menganut sistem pembagian kekuasaan, bergeser kearah Distribution of power.	
			42	Sistem ketatanegaraan sebelum Amandemen UUD 1945 memiliki Kelebihan dari sistem ketatanegaraan setelah amandemen ialah sistem ketatanegaraannya lebih terarah dan pemerintah hanya fokus pada target yang telah ditentukan sebelumnya serta kekurangannya tidak ada campur tangan rakyat dalam menentukan kebijakan sehingga dalam pembuatan sistem ketatanegaraan hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa. Sedangkan, sesudah amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Republik Indonesia lebih mengutamakan aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa.	Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan
			43	Ketika pemerintah dihadapkan pada suatu pilihan dalam menentukan kebijakan yang begitu besar pengaruhnya pada negeri ini, diharapkan lebih fokus implementasinya pada suatu target sehingga pemerintah lebih mudah dalam implementasinya. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menerapkan sistem ketatanegaraan yang adil dan bijaksana, serta memusatkan tujuan pada suatu target yaitu Negara Republik Indonesia menjadi lebih baik.	Kab. Bone, Sulawesi Selatan
			44	Pokok-pokok pikiran haluan negara perlu mencantumkan desain arah pembangunan hukum, salah satunya adalah sistem peraturan perundang-undangan yang terencana dan terpadu dengan pembangunan nasional. Adapun pra-syarat dalam pembangunan materi hukum nasional yaitu: 1) dasar atau landasan pembangunan materi hukum adalah 4 pilar; 2) orientasi pembangunan materi hukum adalah Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee); dan 3) tujuan pembangunan hukum adalah terwujudnya keadilan sosial, penghargaan akan kemanusiaan, terwujudnya kesejahteraan umum, dan terjaminnya kepastian hukum. Selain itu, pembangunan hukum juga perlu melakukan adaptasi dengan kondisi terkini, salah satunya adalah perlu dibuka ruang bagi transplantasi hukum modern, hukum adat, dan hukum agama ke dalam hukum nasional, sejauh tidak mengusik eksistensi hukum nasional yang berorientasi Pancasila dan berwawasan Nusantara.	Kota Salatiga, Jawa Tengah
			45	Maju tidaknya sebuah negara dilihat dari pembangunan nasionalnya. Pembangunan nasional yang baik akan mempengaruhi kesejahteraan rakyatnya di segala sektor. Sedangkan dalam penerapannya di Indonesia, pembangunan nasional masih belum mencerminkan negara maju karena masih banyak masyarakat yang kesejahteraannya rendah.	Kab. Aceh Utara, Aceh
			46	Indonesia sebagai negara hukum menggunakan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini juga menjadi dasar sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mengatur tentang lembaga negara serta organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara.	Kab. Way Kanan, Lampung
			47	Masyarakat perlu diberikan pemahaman kembali mengenai peran dan fungsi keberadaan lembaga-lembaga baru hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan tugas serta wewenang lembaga yang sudah ada.	Kab. Way Kanan, Lampung
			48	Perlu dipikirkan penggunaan kembali GBHN dan penguatan peran MPR guna menjaga stabilitas program pembangunan, tanpa berbenturan dengan visi misi Presiden terpilih. Hal	Kab. Luwu, Sulawesi Selatan

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				yang dapat ditempuh adalah dengan membuka peluang untuk dilakukan kembali amandemen UUD.	
			49	Mazhab Historis sudah mengajarkan bahwa suatu negara tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya dan belajar dari pengalaman itu. Dalam kajian ketatanegaraan, generasi muda tidak perlu terjebak dalam sentimen politik Orde Lama, Orde Baru atau asal tampil beda. Kita pahami dan tarik pelajaran sejarah masa lalu dan sisi-sisi yang baik kita pertahankan. Sisi buruk harus dikoreksi dan sisi baiknya harus diadopsi.	Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
			50	Wacana untuk menggunakan kembali GBHN seiring upaya menguatkan peran MPR, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut; pertama, harus diatur secara jelas siapa yang berwenang membuatnya. Kedua, dalam bentuk hukum apa GBHN dituangkan. Ketiga, jika menggunakan GBHN akan ada pertanggungjawaban Presiden kepada MPR maka akan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang selama ini dianut. Ada baiknya jika menggunakan GBHN sebab jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan dan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai amanat konstitusi, maka Presiden dan Wakil Presiden "pilihan MPR" dapat melanjutkan program pembangunan yang bersumber dari GBHN tanpa adanya benturan visi dan misi. untuk itu, pengaturannya harus dikembalikan ke UUD NRI 1945, amandemen ulang merupakan keniscayaan.	Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
			51	Reformulasi perencanaan pembangunan nasional yang tepat saat ini adalah mengembalikan kembali GBHN. Wacana menghidupkan kembali GBHN oleh MPR semata-mata hanya untuk memberikan pedoman pembenagunan nasional agar menjadi lebih terarah dan konsisten, namun tetap berpegang teguh pada kerangka sistem presidensial di Indonesia. Artinya, bagaimanapun nanti kedudukan GBHN yang baru tidak menimbulkan pengaruh terhadap kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara seperti di masa UUD Tahun 1945 sebelum perubahan, dan tidak mempengaruhi pertanggungjawaban politik Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR. Hal ini dikarenakan bahwa hierarki norma hukum tidak selalu berkorelasi dengan hierarki organ negara. karena kalau seperti itu, tentunya sistem presidensial Indonesia menjadi lemah. Dengan TAP MPR yang berkedudukan di atas Undang-undang,GBHN yang baru nanti harus menjadi acuan dalam pembentukan dokumen perencanaan pembangunan di bawahnya.	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
			52	Pelaksanaan demokrasi perlu semakin dikuatkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan demokrasi semakin ditentukan oleh 'kekuatan uang' sehingga demokrasi dalam pengertian kedaulatan rakyat semakin tereliminasi. Rakyat semakin menjadi 'pembeli demokrasi' dalam 'pasar pemilihan' sehingga pemimpin yang lahir lebih didominasi para pemilik modal tanpa mempertimbangkan akhlak dan perulaku sosial serta komitmen kebangsaannya.	Kab. Rembang, Jawa Tengah
			53	MPR adalah lembaga politik yang pasti mengakomodir usulan dari berbagai pihak tetapi keputusannya sangat politis. hak kita sebagai rakyat adalah mengevaluasi mereka setiap lima Tahun, apakah layak untuk terus menerima mandat dari kita sebagai rakyat yang berdaulat.	Kab. Mamasa, Sulawesi Barat
			54	Perencanaan model GBHN diperlukan sebagai integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. GBHN dipandang urgen untuk memastikan bahwa proses pembangunan nasional merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila.	Kab. Batang, Jawa Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			55	Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di lembaga Parlemen tingkat Nasional sebagai langkah mengakomodir kepentingan masyarakat daerah. Namun demikian, kewenangannya dibatasi sehingga anggota DPD kurang pro aktif memperjuangkan kepentingan daerah karena itu diperlukan penguatan kewenangan DPD RI.	Kab. Nganjuk, Jawa Timur
			56	Pelaksanaan pemilu serentak merupakan upaya untuk membangun sistem demokrasi yang efektif. Dalam jangka panjang, pemilu serentak juga dapat menguatkan sistem presidensial karena kemenangan calon presiden cenderung diikuti perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya.	Banten
			57	Kedudukan MPR telah sama dengan lembaga negara lain, sehingga dalam sistem ketatanegaran tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi dari yang lain. MPR tetap memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar.	Lampung
			58	Dampak dari era demokrasi yang menjurus kepada tuntutan sebuah kebebasan yang berlebihan tanpa diimbangi atau diiringi dengan pengetahuan tentang prinsip demokrasi yang memadai, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan masyarakat luas dan sering berkembang menjadi ketegangan antar kelompok yang ada dalam masyarakat. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam "empat pilar" kehidupan berbangsa dan bernegara inilah yang menjadi pengokoh tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.	Lampung
			59	Sistem pemerintahan Indonesia cenderung pada presidensial. Namun, sedikit banyak ada unsur sistem pemerintahan parlementer yang digunakan di Indonesia. Dalam perkembangan sistem pemerintahan presidensil di negara Indonesia (setelah amandemen UUD 1945) terdapat perubahan dalam sistem ketatanegaraan (kedudukan lembaga-lembaga negara), sistem politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan keamanan, dan sebagainya.	Bangka
	6	Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	1	Sejumlah lembaga telah melakukan berbagai kajian untuk mengggambarkan visi dan peta jalan Indonesia menuju 2045. Namun, rumusan tersebut dianggap lebih sering berisi daftar impian yang tidak didasarkan atas kondisi dan kemampuan objektif negara dan keberhasilannya tergantung pada banyak faktor yang berada di luar kendali dan otoritas suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan semangat para penyelenggara negara dan pemerintahan yang lahir dari investasi terhadap martabat, harga diri, dan greget suatu negara bangsa.	Kab. Batang, Jawa Tengah
			2	Untuk mencapai tujuan pembangunan ada pra-kondisi yang harus dicapai lebih dahulu, yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.	Jawa Tengah
			3	Pasang surut eksistensi lembaga MPR pasca kemerdekaan hingga era reformasi dipengaruhi oleh kepentingan politik rezim penguasa. Perubahan kedudukan dan kewenangannya berimplikasi pada pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan amanah rakyat. Kondisi ini harus dipullihkan kembali dengan cara menguatkan kembali esensi demokrasi Indonesia dan diterapkan secara menyeluruh dalam struktur pemerintahan negara dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah yaitu pemerintah.	Kota Sibolga, Sumatera Utara
			4	Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga yang setara dengan lembaga negara lainnya.	Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
			5	MPR RI melaksanakan Sidang Tahunan pasca amandemen UUD 1945 bukanlah merupakan forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara terhadap institusi MPR, melainkan sebagai sebuah media formal ketatanegaraan sebagai media lembaga-lembaga tinggi negara melalui presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.	Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara
			6	DPD sabagai lembaga yang mewakili daerah harus menjadi lembaga yang bisa mempunyai kekuatan memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan rakyat daerah dalam menyalurkan aspirasinya	Kab. Merangin, Jambi
			7	Perlunya penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar tercipta suatu sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan Pancasila dan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.	Kota Padang, Sumatera Barat
			8	Pembagian kekuasaan penyelenggara negara di Indonesia berdasarkan 3 cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif (presiden dan wakilnya), legislatif (DPR,DPD,MPR) serta kekuasaan yudikatif (MA,MK,KY). Dengan tiga cabang kekuasaan tersebut idealnya dapat menciptakan prinsip check and balances sehingga dapat membentuk ketatanegaraan demi mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.	Aceh
			9	Terjadi pergeseran pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya menjadi dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.	Kota Medan, Sumatera Utara
			10	Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu saluran pertanggungjawaban pemerintah pada rakyat atas kinerjanya. Hal ini dapat memastikan lembaga publik akuntabel dan kredibel, serta membantu perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).	Kab. Demak, Jawa Tengah
			11	Masyarakat merasa anggota legislatif sebagai wakil dari masyarakat masih kurang menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat masih belum merasakan keberadaan wakilnya baik di tingkat nasional maupun daerah.	Kab. Way Kanan, Lampung
			12	Masyarakat berharap anggota legislatif yang mewakili daerahnya dapat melakukan terobosan agar tercipta parlemen yang bersih, beintegritas, bebas korupsi, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, diharapkan anggota terpilih juga dapat memiliki kiat dan strategi untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah Blambangan Pagar.	Kab. Lampung Utara, Lampung
			13	Sistem Ketatanegaraan harus terus di evaluasi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga pada akhirnya kesejateraan rakyat secara merata dapat dicapai. harus diakui bahwa cukup banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi harus diakui pula bahwa masih banyak yang harus diperbaiki.	Kab. Mamasa, Sulawesi Barat
			14	Penetapan sistem pemilu, baik Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota serta legislatif perlu dituangkan dalam GBHN sebagai bentuk pola pembinaan demokrasi di Indonesia, sekaligus menghindari politik uang sebagai pintu masuk pejabat korup.	Kab. Pekalongan, Jawa Tengah
			15	Penguatan MPR dengan Pemberian kewenangan untuk membentuk ketetapan, bisa dibarengi dengan penguatan DPD sebagai bagian yang tak terpisahkan dari MPR, dan menyempurnakan posisi MPR sebagai gabungan dari DPR,	Kab. Purworejo, Jawa Tengah

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				lembaga perwakilan dibidang politik, dengan DPD yang merupakan perwakilan dari segi teritorial atau kewilayahan.	
			16	Dalam penyelenggaraan Pemilu terutama Pilkada, sebagian penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) dalam menjalankan tugasnya tidak netral, mandiri dan idependen dan serta melanggar asas dan prinsip Pemilu. Ketidaknetralan ini terjadi karena dalam proses penyeleksiannya tidak transparan dan mudah diintervensi oleh penguasa untuk meloloskan calonnya karena itu diperlukan mengevaluasi dan menata ulang tata cara penyeleksian penyelenggara Pemilu.	Jakarta Timur, DKI Jakarta
			17	Kontradiktif kedudukan MPR sebagai lembaga permusyawaratan karena anggota hanya terdiri dari unsur wakil rakyat terpilih melalui mekanisme politik formal, tokoh masyarakat melalui mekanisme kearifan lokal tidak terwadahi. Perlu dipikirkan juga penyesuaian wewenang MPR sebagai consultative assembly menjadi joint session.	Kab. Sumbawa, NTB
			18	Perlunya mengkaji kembali makna permusyawaratan dalam praksis sistem ketatanegaraan kita agar kekhasan demokrasi Indonesia dapat terpelihara. Oleh karena itu, agenda amandemen UUD dapat menghadirkan kembali MPR yang benar-benar dapat merupakan lembaga "permusyawaratan" yang dalam pengambilan keputusannya senantiasa dijiwai "hikmat kebijaksanaan".	Kota Bima, NTB
			19	DPD perlu dioptimalisasi perannya sebagai representasi daerah dengan memperkuat kedudukannya sebagai kamar kedua dan melakukan penyeimbang (double check) dalam proses-proses legislasi, penganggaran dan pengawasan yang berpersfektif daerah dan menjadi jembatan harmonisasi hubungan pusat dan daerah.	Kota Bima, NTB
	7	Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Masyarakat Kelurahan Way Dadi kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung menuntut kepastian hukum karena tidak mendapat perlakuan yang adil atas tanah garapan. Konflik atas tanah dengan PT. Way Halim Permai ini sudah berlangsung lama dan mengalami kendala terkait persertifikatan tanah yang diperuntukkan kepada masyarakat. Melalui mekanisme yang ada di DPR, anggota MPR hendaknya dapat menyampaikan kepada pemerintah - cq. Kementerian ATR/BPN dan K/L terkait agar dapat menyelesaikan konflik pertanahan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Kota Bandar Lampung, Lampung
			2	Bagaimana penegakkan supremasi hukum dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana peran Pemerintah Pusat dalam mewujudkan masyarakat yang berjiwa Pancasila dan menghargai kebhinnekaan.	Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat
			3	Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, terutama saat pemilihan Kepala Daerah, terkesan aparat Polisi dan Tentara tidak netral dan independen serta memihak kepada kandidat calon Kepala daerah tertentu sehingga timbul konflik antar para pendukung dan aparat, guna mencegah politisasi lembga Kepolisian dan TNI diminta kepada anggota DPR untuk mengatur sangsi yang tegas dalam Undang-Undang Kepemiluan, Kepolisian dan TNI.	Kab. Bogor, Jawa Barat
			4	Masyarakat butuh adanya campur tangan pemerintah dalam mengurangi dan membatasi tindak kriminal yang dilakukan oleh anak muda dengan suatu kebijakan yang benar-benar dapat di rasakan oleh masyarakat dari segi kenyamanan.	Kab. Parigi Mautong, Sulawesi Tengah
			5	Reposisi TAP MPR RI perlu dilakukan melalui rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjamin konsistensi dan keselarasan norma pada berbagai tingkatan peraturan perundangan. Hal ini dikarenakan TAP	Kab. Labuse, Sumatera Utara

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				MPR pada dasarnya tidak bersifat mengatur (regeling), melainkan penetapan (beschikking). Selain itu, terdapat norma di luar hierarki yang sesungguhnya bersifat mengatur seperti peraturan lembaga negara utama, peraturan menteri dan lembaga negara setingkat kementerian, dan peraturan kepala daerah.	
			6	Wacana Amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan kajian mendalam dan meminta sumbangan pemikiran dan pendapat dari masyarakat terutama para akademisi.	Sumatera Utara
			7	Prinsip dan asas beberapa UU (UU BUMN dll) yang disahkan di DPR tidak konsisten dan koheren dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu dilakukan evaluasi dan penataan sistim Peraturan Perundang-Undangan.	Sumatera Utara
			8	Pemerintah berkewajiban melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan menghukum para pelaku kekerasan karena itu diminta kepada pemerintah dan anggota DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan produk hulum lainnya yang bertujuan untuk melindungi Perempuan dan Anak dari kekerasan.	Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat
			9	Perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum di Indonesia, agar masyarakat mengerti bahwa hukum adalah panglima dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.	Kab. Indramayu, Jawa Barat
			10	Perlunya implementasi Undang-Undang sebagai tata laksana jalannya kehidupan bernegara sehingga ada kontrol yang kuat dari masyarakat pada pelaksanaan ketatanegaraan dari elemen terkecil sampai pusat.	Kab. Bandung, Jawa Barat
			11	Pentingnya Konstitusi dipahami oleh masyarakat agar mampu secara efektif memberikan kontrol kepada pemerintah sehingga Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tegas diimplementasikan.	Kab. Bandung, Jawa Barat
			12	Harmonisasi perundang-undangan: Harmonisasi Vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi Horisontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijk regelgeving*).	Kab. Berau, Kalimantan Timur
			13	Dalam UUD 1945 sebelum di amandemen terdapat pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir sebab terlalu "luwes" dan "fleksibel". Salah satu pasal yang bisa multitafsir adalah pasal 7 tentang Presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, setuju apabila masa jabatan dibatasi hanya 2 (dua) kali masa jabatan.	Kab. Mamasa, Sulawesi Barat
			14	UUD merupakan hukum tertinggi dan juga ditegaskan tentang prinsip negara berdasarkan Hukum. kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD sehingga pada akhirnya kesejahteraan Rakyat secara merata dapat dicapai.	Kab. Mamasa, Sulawesi Barat
			15	UUD NRI 1945 yang telah diamandemen 4 kali dirasa masih memiliki beberapa kekurangan seperti pasal-pasal yang multi interpretatif sehingga menimbulkan instabilitas	Kab. Nganjuk, Jawa Timur

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				hukum dan politik, serta besarnya kekuasaan yang dimiliki DPR.	
			16	Hasil amandemen UUD 1945 harus diamandemen ulang (kembali ke khittah Indonesia 1945) karena tidak sesuai dengan Muktamar NU 1984 di Situbondo bahwa NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final perjuangan bangsa Indonesia.	Jawa Timur
			17	Terdapat beberapa pemikiran berkembang terkait wacana UUD NRI Tahun 1945, yaitu: (1) pemikiran yang setuju kembali ke UUD 1945 dengan varian tanpa ada kompromi, dengan sedikit penyempurnaan dan amandemen 1 hingga 4 dianggap tidak ada; dan (2) melanjutkan amandemen ke-5, tinggal perbaikan pelaksanaan saja yang perlu dilakukan.	Kab. Nganjuk, Jawa Timur
			18	Untuk menjaga jarak antara demokrasi dan korupsi, pembatasan akses para pelaku alias koruptor kembali ke alam demokrasi menjadi sebuah pilihan yang menarik. di satu sisi, pembatasan dapat menjaga demokrasi tetap steril, di sisi lain juga diharapkan mampu memunculkan kejeraan bagi si pelaku. Perlu dijaga keteguhan serta keselarasan ritme penegakan hukum kasus korupsi di semua lini, diawali dengan jaksa KPK yang secara konsisten memasukkan pencabutan hak politik dalam tuntutannya, dan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi menghasilkan vonis yang senafas.	Kota Bekasi, Jawa Barat
			19	Perbuatan "penyebaran kebencian" atau biasa yang dikenal hate speech, memang tidak terkait langsung dengan kegiatan mengganti ideologi negara, namun tidak dipungkiri terkait dengan masalah national security. KUHP sudah mengaturnya, namun perlu diperkuat dan diperluas cakupannya. Perlunya pengaturan yang lebih jelas dan tepat mengenai aktifitas-aktifitas publik masyrakat, seperti berorganisasi, berkumpul dan berekspresi.	Lampung
			20	Perubahan dinamika masyarakat dan bangsa menuntut penyesuaian atas segala sendi hukum dan politik Negara Indonesia, termasuk adaptasi UUD 1945. Amandemen ke-5 UUD merupakan suatu hal yang mendesak untuk segera dilakukan dalam rezim reformasi guna mengakomodasi transformasi struktural sistem dan bangunan ketatanegaraan, demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.	Kota Bontang, Kalimantan Timur
	8	Keamanan	1	Ancaman saat ini terhadap sebuah negara tidak mengenal batas negara, bersifat transnasional, non-fisik (ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam), berbentuk asimetris, non linear dan extra-ordinary serta selalu mengeksploitasi kerawanan-kerawanan mnasyarakat (ras, suku, agama). Oleh karena itu, sistem kemanan nasional harus memiliki paradigma baru tentang sistem pertahanan kemanan (one integrated nasional effort)	Kota Ambon, Maluku
	9	Komunikasi dan Media Massa	1	Trend penyebaran berita palsu (*hoax*) di media massa oleh kelompok tertentu terutama saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sangat meresahkan rakyat; Dinilai KUHP dan UU ITE yang ada saat ini berlaku tidak mampu menyasar dan atau menindak para produsen dan menyebar kabar bohong karena itu diminta kepada pemerintah untuk membuat UU yang mengatur tentang perilaku di dunia maya. Selain itu, diminta kepada pimpinan media untuk memperhatikan asas dan prinsip jurnalistik dalam pemberitaannya.	Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
			2	Rakyat dapat aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, menyebarkan masalah yang dialami dan dirasahkannya kepada Wakil rakyat di Parlemen dan Pemerintah. Dalam penyampaian Aspirasi tersebut, terutama aspirasi yang berkaitan dengan kritik dan atau	Sulawesi Selatan

NO	ISU		ASPIRASI MASYARAKAT		KET.
(1)	(2)		(3)		(4)
				protes kepada Pemerintah (Penguasa), dapat dengan mudah dikirminalisasi oleh penguasa atau aparat keamanan bahkan dapat memblokir dan atau membatasi penggunaan media sosial dengan dalih melanggar UU ITE. Sehubungan dengan itu, agar MPR (sebagai anggota DPR dan DPD) untuk mengingatkan kepada pihak terkait agar menghormati hak warga atas kebebasan menggunakan media sosial, kemerdekaan menyampaikan pendapat, hak warga atas memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar dan hak warga atas keadilan.	
			3	Generasi muda perlu meningkatkan literasi media sebagai bekal diri untuk mengadapi kemajuan teknologi di era globalisasi. Literasi media tersebut diharapkan dapat membuat pemuda turut serta menyebarkan konten-konten informasi positif dan mengandung manfaat bagi kehidupan kegamaan, berbangsa dan bernegara, terutama juga untuk mencegah penyebaran konten-konten anti Pancasila.	Kab. Grobogan, Jawa Tengah
			4	Perlu dibudayakan upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga berkualitas melalui Internet Sehat dan Aman.	Padang, Sumatera Barat
			5	Penggunaan Internet sehat perlu ditanamkan semenjak dini melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat agar menghindari kebiasaan jelek di dunia nyata akan terbawa di dunia maya dan tidak menimbulkan efek negatif di masyarakat	Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
			6	Selain berdampak positif, Internet mempunyai dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa yang berlandaskan Ideologi Pancasila.	Kota Medan, Sumatera Utara

PENUTUP

Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh anggota MPR masa jabatan 2014-2019 telah diselenggarakan di daerah, baik secara individu maupun berkelompok untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang terkait langsung dengan bidang-bidang yang terkait dengan tugas dan wewenang MPR dan dilakukan di daerah pemilihan maupun di daerah sesuai dengan penugasan kelembagaan.

Adapun sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, aspirasi yang diperoleh MPR sepanjang tahun 2014-2019 telah dikategorisasikan berdasarkan fokus bahasan dan isu yang telah ditentukan. Dari segi fokus bahasan, mayoritas aspirasi masyarakat termasuk pada fokus bahasan Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan, yaitu sebesar 79 persen, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang mengikuti kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ini cenderung menyampaikan aspirasi terkait ruang lingkup MPR, yaitu sistem ketatangeraan. Sedangkan untuk fokus bahasan lainnya membahas Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang SDM dan Penguasaan IPTEK sebesar 11 persen, Arah dan Tahapan Pembangunan Bidan Ekonomi Berkelanjutan sebesar 6 persen, dan Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan sebesar 4 persen.

Dari segi isu, sebagian besar hasil penyerapan aspirasi masyarakat membahas isu terkait Pemantapan Ideologi Pancasila yaitu sebesar 27 persen, Politik Dalam Negeri yaitu sebesar 20 persen, dan Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yaitu sebesar 8 persen. Adapun untuk isu Pemantapan Ideologi Pancasila, aspirasi yang disampaikan berbicara mengenai pengamalan Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Untuk isu Politik Dalam Negeri, aspirasi terkait isu ini mayoritas berbicara mengenai reformulasi perencanaan pembangunan nasional melalui penghidupan kembali GBHN. Sedangkan untuk isu Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, aspirasi di sekitar isu ini adalah keinginan masyarakat agar pemerintah mampu melihat kondisi dan situasi negara Indonesia secara komprehensif, dimana persatuan dan kesatuan nasional dapat terwujud jika ada sinergitas antara semua pihak sehingga hubungan baik tersebut saling memberikan kontribusi serta manfaat satu sama lain.

LAMPIRAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEHPIMPINAN DAN ANGGOTA MPR RI MASA JABATAN 2014-2019

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	21 Januari 2018	Semarang	Paguyuban Modin dan Perawat Jenazah Kota Semarang	Para Petugas Kesejahteraan Rakyat (Kesra)/Modin dan Perawat jenazah menghapi kendala dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diminta kepada Anggota MPR agar menyampaikan kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk memberikan pendidikan dan pelatihan penguatan kapasitas tenaga modin dan perawat Jenazah.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
2	26 Januari 2018	Semarang	DPD Golkar Kabupaten Semarang	Sebagai negara yang ideal, Indonesia harus memiliki 3 landasan, yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Reformulasi atau penghidupan kembali GBHN merupakan landasan operasional yang bertugas melaksanakan landasan idiil dan landasan konstitusional. Penguatan MPR dengan pemberian kewenangan membentuk GBHN akan memudahkan terbentuknya negara yang ideal.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
3	26-28 Januari 2018	Kec. Teluti Kab.Maluku Tengah, Maluku	Tokoh Masyarakat di Kec Teluti	Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai lluhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th
4	30 Januari 2018	Bojonegoro	Masyarakat Bojonegoro	Arah kebijakan dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah menjadikan nilai-nilai agama dan nila-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka, dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga menjawab tantangan sesuai dengan visi indonesia masa depan.	Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM (*ANNA MUAWANAH**)

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	30 Januari 2018	Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor	Yayasan Masyarakat Peduli Insani, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, terutama saat pemilihan Kepala Daerah, terkesan aparat Polisi dan Tentara tidak netral dan independen serta memihak kepada kandidat calon Kepala daerah tertentu sehingga timbul konflik antar para pendukung dan aparat, guna mencegah politisasi lembga Kepolisian dan TNI diminta kepada anggota DPR untuk mengatur sangsi yang tegas dalam Undang-Undang Kepemiluan, Kepolisian dan TNI.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM (*TB.SOENMANDJAJA**)
6	30 Januari 2018	Tanjungsaleh, Kuburaya, Pontianak, kalimantan Barat	Pemuda dan Pemudi Desa Tanjungsaleh	Politik pemilu pasca 2014 ditandai dengan menguatnya politisasi identitas. Isu Suku, Agama, Ras dan Ideologi tertentu digunakan oleh politisi tertentu untuk membangun citra negatif kepada lawan politknya. Politisasi identitas tersebut berpeluang memperlemah nilai demokrasi, merusak integrasi sosial dan mengganggu stabilitas sosial politik karena itu diminta kepada MPR untuk mendorong penguatan demokrasi di Indonesia dengan cara memberikan pendidkan politik kepada kader Partai Politik dan anggota organisasi masyarakat yang berafliasi dengan partai politik tertentu.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH
7	30 Januari 2018	Makassar	Masyarakat Kelurahan Pampang, Makassar	Membina bangsa Indonesia yang multikultural memerlukan upaya yang berkesinambungan serta berkaitan dengan aspek agar tercapai integrasi nasional melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu dengan mengadakan proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan informal tentang prinsip bersatu dalam perbedaan karena individu dalam masyarakat majemuk haruslah memiliki kesetiaan ganda terhadap bangsa-negaranya. Mereka juga tetap memiliki keterikatan terhadap identitas kelompoknya, namun mereka menunjukan kesetiaan yang lebih besar pada bangsa Indonesia.	DRS. H. BAHAR NGITUNG, MBA / ABDUL AZIS, S.H.
8	30 Januari 2018	Semarang	Karang Taruna Banowati Semarang	Dengan adanya GBHN dimaksudkan bisa diberikan arah penyelenggaraan dan pembangunan negara untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyrakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	05 Februari 2018	Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Lampung	Masyarakat Kec. Gunung Agung	Usulan arah dan kebijakan ekonomi yang perlu ditempuh pemerintah Indonesia, meliputi: 1) mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar; 2) mengembangkan persaingan yang sehat, adil, serta menghindari pasar monopolitik; 3) mengoptimalkan pinjaman luar negeri; 4) membudayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi; 5) mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan profesional; 6) mempercepat pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi; dan 7) penyehatan APBN degan mengurangi defisit negara.	IR. MARWAN CIK ASAN, MM
10	05 Februari 2018	Kab Merangin Jambi	Tokoh Masyarakat Kab Merangin	DPD sabagai lembaga yang mewakili daerah harus menjadi lembaga yang bisa mempunyai kekuatan memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan rakyat daerah dalam menyalurkan aspirasinya	M. SYUKUR, SH., MH / SUDIRMAN
11	06 Februari 2018	Bojonegoro	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pkbm (Pkbm) Bahagia Bojonegoro	Pemerintah diharapkan bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk memasyarakatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa dan negara.	Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM (*ANNA MUAWANAH**)
12	12-14 Februari 2018	Grobogan-Jateng	Bersama Masyarakat, Kiai dan Santri Pondok Pesantren Mamba'UL A'LAA , Purwodadi,Grobogan, Jawa Tengah	Dengan Keragaman, Indonesia selalu menjadi acuan bagi berbagai pihak terutama negara-negara lain untuk mempelajari dinamika hubungan antar umat beragama. kerukunan antar pemeluk beragama di indonesia menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan dan ahli. Supaya dialog antar-umat beragama mest dari latar belakang agama yang eksklusif dan kehendak untuk mendominasi pihak lain, untuk itu butuh relasi harmonis tanpa apriori, ketakutan dan penilaian yang dimutlakan. untuk itu, yang harus dibangun adalah persaudaraan yang saling menghargai tanpa kehendak untuk mendominasi dan eksklusif.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
13	13 Februari 2018	Kelurahan Kenali Asam Jambi	Ketua RT dan Masyarakat Kel. Kenali	Kecurangan pemilu dapat dihindari jika prasyarat demokrasi diperkuat lebih awal, antara lain menggunakan pendidikan yang relatif memadai untuk memilih wakil rakyat dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat untuk menghindari *money politics*.	M. SYUKUR, SH., MH / SUDIRMAN

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	14 Februari 2018	Makassar	Lsm Generasi Pemuda Peduli Tanah Air (Gempita) Sulsel	Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila serta menjadikan Pancasila sebagai patokan untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah negara. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus selalu menjadikan Pancasila sebagai sumber kehidupan.	DRS. H. BAHAR NGITUNG, MBA / ABDUL AZIS, S.H.
15	15 Februari 2018	Kab. Klungkung Bali	Yayasan Kesenian Bali	Kerjasama yang baik antara komunitas intelejen, pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik serta masyarakat menghasilkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap potensi konflik sehingga tidak akan terjadi perpecahan.	I KADEK ARIMBAWA / Prof. Dr. H. DAILAMI FIRDAUS
16	25 Februari 2018	Sukabumi	Dpd Pks Kota Sukabumi	Indonesia bukan negara Islam, dan Islam pun tidak memerintahkan untuk menciptakan negara Islam. Pancasila pada dasarnya mampu untuk mengakomodir semua lini kehidupan, sehingga tidak mungkin dipaksakan konsep khilafah untuk diterapkan di negeri ini.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM (*TB.SOENMANDJAJA**)
17	4 Maret 2018	Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi Jawa Barat	DPD PKS Kab. Sukabumi	Negara-negara muslim seperti Indonesia dan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam perlu membangun kerjasama yang lebih produktif untuk mengkaji secara mendalam dan serius bagaimana relasi Islam dan demokrasi dalam kehidupan mendatang. Jangan sampai kelompok fundamentalisme dan radikalisme yang menggunakan agama sebagai simbol memanfaatkan instrumen demokrasi untuk membajak dan memperlemah demokrasi tersebut.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM (*TB.SOENMANDJAJA**)
18	6 Maret 2018	Semarang Utara	Tokoh Masyarakat Kec Lindu Aji	Pemberlakuan kembali GBHN adalah hal yang tidak bertentangan dgn UUD 1945 bahkan GBHN dapat mengoptimalkan penggunaan keuangan negara sehingga keuangan negara dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. GBHN perlu dihidupkan kembali guna mencapai tujuan bangsa.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	11 Maret 2018	Semarang	Masyarakat Kabupaten Kebumen	Penataan MPR walaupun diwarnai perdebatan mengenai mengembalikan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara atau tidak, tetapi ada aspirasi kuat untuk memberikan kewenangan kepada MPR membuat ketetapan MPR yang bersifat mengatur. Dengan kewenangan ini MPR bisa menetapkan haluan negara seperti GBHN.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
20	13 Maret 2018	UIN SUNAN KALIJAGA DIY	Dpp Ikaktan Mahasiswa Muhammadyah	Aksi intoleransi dan kekerasan atas nama agama semakin meningkat dan meluas di Indonesia, aksi tersebut merusak toleransi, kekerabatan dan hubungan antar umat beragama karena itu diminta kepada pemerinta melalui kementerian terkait, terutama kepada aparat Kepolisian untuk menindak tegas aktor-aktor yang memprovokasi, menghasut dan memobilisasi warga melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.	DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., MA (*Ali Taher**)
21	15 Maret 2018	Bogor	Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	Penguatan Wawasan Nusantara sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu terus dilakukan.	MOH. ARIEF SUDITOMO, SH., MA (*Djoni Rolindrawan**)
22	16 Maret 2018	Desa PasakKec. Sungai AmbawangKALBAR	Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Al Khaliliyah	Pondok pesantren selain mengajarkan pendidikan agama Islam, perlu memberikan pendidikan umum termasuk kondisi kekinian bangsa. Hal ini penting agar para santri yang belajar mampu membedakan mana yang sesuai dengan nilai Pancasila dan NKRI, juga sebagai alat untuk memfilter paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Para santri juga harus mampu memahami secara utuh kondisi kebangsaan kekinian sehingga pihak yang tidak bertanggungjawab tidak mudah mempengaruhi mereka.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH
23	23 Maret 2018	Magelang	Masyarakat Magelang	Lembaga legislatif (perwakilan) yaitu lembaga yang membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan reprsentasi dari rakyat Indonesia dimanapun berada dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai Lembaga yang mewakili rakyat dan memiliki wewenang untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam membuat undang-undang, maka aspirasi rakyat harus senantiasa dikedepankan.	NENG EEM MARHAMAH ZULIA HIZ (A-45)

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	24 Maret 2018	Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Pengurus Ormas, Parpol, Tokoh Masyarakat dan Agama Serta Tokoh Perempuan	Pemerintah Pusat diharapkan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang arti penting kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kebhinnekaan.	Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM (*ANNA MUAWANAH**)
25	30 Maret 2018	Jambi	Pemuda dan Tokoh Masyarakat Merangin	Ada urgensi kuat bagaimana membumikan kembali nilai nilai Pancasila. sebelum orde reformasi ada kesan kuat tentang "formalisasi" Pancasila dimana Pemerintah memegang kendali kuat dalam upaya membumikan dasar negara sampai ke akar rumput. Kita selaku bangsa dan negara memang sudah saatnya kembali ke Pancasila dan UUD 1945 sebagai upaya menyelamatkan negeri dan bangsa ini dari potensi kehancuran.	M. SYUKUR, SH., MH / SUDIRMAN
26	31 Maret 2018	Kuningan	BEM Fak. Komputer, Univ. Kuningan	Indonesia adalah sebuah *novum,* yang terdiri dari kemajemukan yang berkeinginan menyelesaikan persoalan bersama. Hal itu yang perlu terus-menerus dibina.	YANUAR PRIHATIN
27	4 April 2018	Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan Lampung	Masyarakat Kab. Way Kanan	Pertumbuhan ekonomi global 2018 diperkirakan meningkat dan diikuti dengan kenaikan harga komoditas dunia. Kenaikan ini bersumber dari perbaikan ekonomi negara maju dan negara berkembang yang lebih kuat dari perkiraan semula. Kondisi ini perlu dirasakan adil dan merata oleh berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu diberdayakan, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangan sistem ekonomi kerakyatan.	IR. MARWAN CIK ASAN, MM
28	5 April 2018	Rembang/ Lodan Kulon (Non SPP)	Tokoh Masyarakat Pemuda, Agama dan Madrasah Diniyah	Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dituntut untuk menghormati agama dan kepercayaan lain yang ada di Indonesia, menjaga dan merawat toleransi antar umat beragama; Bersama-sama pula menjaga persatuan Indonesia.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
29	07 April 2018	Desa Hikong Kec. Talibura Kab. Sikka NTT	Dpc Pdi Perjuangan Kab. Sikka	Situasi bangsa saat ini rawan terhadap perpecahan SARA, ancaman dari kelompok radikal, kepentingan pemilik modal dan orang-orang pragmatis yang banyak disebar sampai ke daerah. Oleh karena itu, penyampaian materi sosialisasi 4 pilar dapat dikemas dalam berbagai bentuk sesuai kearifan lokal dan perkembangan teknologi informasi daerah masing-masing sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi.	DR. ANDREAS HUGO PAREIRA

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	9 April 2018	DPP Partai Golkar, Sibolga	Masyarakat Desa Tebing Linggahara-Sumut	Pasang surut eksistensi lembaga MPR pasca kemerdekaan hingga era reformasi dipengaruhi oleh kepentingan politik rezim penguasa. Perubahan kedudukan dan kewenangannya berimplikasi pada pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan amanah rakyat. Kondisi ini harus dipullihkan kembali dengan cara menguatkan kembali esensi demokrasi Indonesia dan diterapkan secara menyeluruh dalam struktur pemerintahan negara dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah yaitu pemerintah.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.
31	10 April 2018	Lab. Batu	Masyarakat Desa Tebing Linggahara-Sumut	Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga yang setara dengan lembaga negara lainnya.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.
32	11 April 2018	Kab. Labuhan batu	Pengurus DPD Partau Golkar Labuhan Batu	MPR RI melaksanakan Sidang Tahunan pasca amandemen UUD 1945 bukanlah merupakan forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara terhadap institusi MPR, melainkan sebagai sebuah media formal ketatanegaraan sebagai media lembaga-lembaga tinggi negara melalui presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.
33	15 April 2018	Sibolga	DPD Golkar Kota Sibolga, Sumut	Upaya strategis yang perlu dilakukan dalam melaksanakan koordinasi gerakan revitalisasi kebangsaan: 1. *Character builder* (pembangun-kembali karakter bangsa) 2. *Character enabler* (pemberdaya karakter) 3. *Character engineer* (perekayasa karakter)	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.
34	18 April 18	Kab. CianjurJawa Barat	Pc Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama Kabupaten Cianjur	Modernisasi menyediakan kemudahan untuk mengakses segala macam pengetahuan. Generasi milenial dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif agar bisa bersaing dalam dunia kerja.	NENG EEM MARHAMAH ZULIA HIZ (A-45)

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	26 April 2018	Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat	Warga dan Tokoh Masyarakat Kel. Cideng	Keterlibatan warga negara (terutama perempuan) secara aktif di dalam proses penegakkan hukum dan konstitusi negara merupakan hal yang sangat penting. Keterlibatan tersebut perlu diawali dengan pemahaman mereka tentang 'diri' mereka sendiri dan tentang kesadaran berkonstitusi itu sendiri. Pemahaman diri yang ditandai dengan kemampuan memaknai perbedaan diri (siklus kesehatan sepanjang hidup) akan menjadi variabel yang memoderasi peningkatan peran perempuan dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi.	KASRIYAH (*DRA. OKKY ASOKAWATI, M.SI**)
36	12 May 2018	Rajeng, Cibinong, Bogor, Jawa Barat	Yayasan Fitra Insani Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat	Para pendiri bangsa menegaskan Indonesia menganut Demokrasi Pancasila namun pada praktiknya kita menerapkan dan mengikuti pola dan tradisi demokrasi liberal, karena itu diminta kepada MPR untuk menegaskan kembali Demokrasi Pancasila di Indonesia.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM (*TB.SOENMANDJAJA**)
37	12 May 2018	Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat	Pondok Pesantren Al-Bina Bojong Gede	Secara normatif, dalam ajaran Islam terdapat prinsip dan elemen dalam demokrasi, meskipun secara generik. Namun secara umum nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dan memberikan kontribusi pada banyak negara. Oleh karena itu, gagasan yang menyatakan bahwa secara empirik Islam tidak *compatible* dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar, sebab di negara non-Muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM (*TB.SOENMANDJAJA**)
38	13 Mei 2018	Kota Tasikmalaya Jawa Barat	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Imm) Kota Tasikmalaya	MPR bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila sesuai Keputusan MPR RI Nomor 1 Tahun 2010. Dalam menjaring aspirasi, MPR harus memahami apa yang dikeluhkan masyarakat dan menjadi jalan untuk memberikan solusi. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, sehingga pengkajian nilai Pancasila juga harus diselaraskan seiring perkembangan jaman namun tidak menyalahi kaidah yang sesungguhnya.	AHMAD ZACKY SIRADJ
39	15 Mei 2018	DKI JTK II	Yayasan Pendidikan Jamiat Kheir, Jakarta	Amandemen UUD NRI 1945 telah mengubah sistem presidensial sesuai dengan dinamika politik dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	DR.H.M. HIDAYAT NU WAHID, MA

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	23 May 2018	Kab. Garut JABAR II	DPD PKS Kab. Garut	Kebanggaan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan suatu keharusan. Selagi identitasnya masih tertulis sebagai warga negara Indonesia, Pancasila harus menjadi bagian dari kehidupan. Selain rakyat yang menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan pemerintah juga terus membangun kebanggaan terhadap Pancasila tersebut.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.
41	26 Mei 2018	Kab. Indramayu Jawa Barat	DPC PKB Indramayu	Sebagai negara kesatuan, masyarakat Indonesia sangat heterogen. Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan pedoman dalam berbangsa. Sejak era reformasi, bangsa Indonesia masih belum mencapai titik kesejahteraan hingga saat ini, meskipun terus ada perkembangan yang signifikan. Dengan kedudukan Pancasila sebagai pedoman hidup, nilai Pancasila harus disosialisasikan lebih konkret mulai dari sila pertama mengenai ketuhanan hingga sila kelima yaitu mengenai keadilan sosial sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia bisa segera terealisasikan.	DEDI WAHIDI
42	27 Mei 2018	Kab. Indramayu Jawa Barat	Yayasan PP Darul Ma'arif Jawa Barat	Indonesia perlu menerapkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta lingkungan hidup dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral kegiatan pembangunan. Proses pembangunan tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa.	DEDI WAHIDI
43	29 Mei 2018	Kota Cirebon Jawa Barat	DPC PKB Kota Cirebon	Masyarakat merasa masih banyak kelompok yang menggunakan simbol kedaerahan dan membuat resah karena dirasa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, jika dilihat menggunakan perspektif Bhinneka Tungal Ika, hal ini bukanlah menjadi tantangan melainkan menjadi ciri khas dalam kemajemukan bangsa. Perlu ditekankan bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 juga dicantumkan hak berkumpul dan berserikat, sehingga	DEDI WAHIDI

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				penting bagaimana adat budaya tetap ada dalam negara kesatuan, dan terikat dalam nilai-nilai Pancasila.	
44	5 Juni 2018	Kuningan	Masyarakat Desa Cikeusik, Kuningan Jabar	Indonesia adalah sebuah *novum,* yang terdiri dari kemajemukan yang berkeinginan menyelesaikan persoalan bersama. hal itu yang perlu terus-menerus dibina.	YANUAR PRIHATIN
45	10 Juni 2018	Kab. Indramayu Jawa Barat	DPC PKB Indramayu	Pendidikan berbasis karakter merupakan pendekatan yang betujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan persoalan hidup, tetapi tetap peka terhadap nilai keramahan sosial. Penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan pada berbagai jenjang, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Diharapkan pendidikan karakter ini dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada melalui metode pengajaran atau cara penyajian bahan pengajaran.	DEDI WAHIDI
46	11 Juni 2018	Kota Cirebon Jawa Barat	Yayasan PP Darul Ma'arif Jawa Barat	Saat ini isu agama menjadi sangat sensitif bahkan ada sebagian masyarakat yang cenderung intoleransi terhadap agama lain. Pendidikan berbasis karakter diperlukan agar tidak salah arah. Untuk menjamin kualitas pendidikan tersebut, pihak yang berperan dalam pendidikan juga harus terjamin kesejahteraannya terutama guru, baik honorer maupun non honorer.	DEDI WAHIDI
47	15 Juli 2018	Karang pawitan, Kab. Garut Jawa Barat	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kabupaten Garut	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kabupaten Garut dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga, mencegah peredaran narkoba, membatasi penyebaran ajaran radikal dan isu-isu identitas yang dapat memecah belah persatuan warga. Untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkan penguatan kapasitas dan penguatan pemahaman hukum dan nilai-nilai Pancasila bagi anggota FKPM karena itu diminta kepada Pemerintah dan DPR untuk memberikan pelatihan pendidikan hukum dan Pancasila.	AHMAD ZACKY SIRADJ

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	22 Juli 2018	Kota Pekalongan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, membangun birokrasi yang bersih dan kompeten, menggeser Sumber Daya Asing dari kelimpahan faktor produksi kedaya tarik investasi dan inovasi, serta membangun modal sosial kuat dan tahan dari rongrongan berbasis SARA.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
49	22 Juli 2018	Kec. Teluti Kab. Maluku Tengah Maluku	Kepala Pemerintah Negeri Yamalutu dan Staf, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Pendidik	Kesenjangan yang terjadi Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor lambannya respon dari pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat. Masih terjadi kesenjangan pembangunan yang sangat tinggi antara pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, terutama di Maluku. Diharapkan pemerintah dapat memenuhi nawacita, yaitu pembangunan yang dimulai dari pinggiran wilayah nusantara, sehingga tidak ada daerah terpencil yang tertinggal.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th
50	25 Juli 2018	Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	Organisasi Masyarakat Muara Dua	Bagaimana sistem ketatanegaraan di Indonesia apabila GBHN di hidupkan kembali.	ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU
51	26 Juli 2018	Desa Kisau, Kec. Muara Dua, Kab. Ogang Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan	Organisasi Masyarakat Muara Dua	Pemerintah kurang mendengar dan memperhatikan aspirasi Rakyat terutama saat musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan nasional karena itu, diminta kepada pemerintah untuk mendengar aspirasi dan usulan rakyat serta mendorong persolan rakyat menjadi agenda pokok pembahasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.	ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU
52	27 Juli 2018	Makassar	Masyarakat LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) SULSEL	Ragam budaya agama dan ras membuat bangsa Indonesia rentan dengan konflik horisontal. Perbedaan harus disikapi sebagai sebuah fakta bernegara yang memiliki ribuan pulau. Perlu adanya wadah pemersatu agar masyarakat yang majemuk tetap hidup rukun dan damai, Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah bangsa menjadi salah satu alat yang ampuh menyatukan keberagaman kita dalam berdemokrasi.	DRS. H. BAHAR NGITUNG, MBA / ABDUL AZIS, S.H.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53	4 Agustus 2018	Desa Manikyang Kec. Selemadeg Kab. Tabanan Bali	Masyarakat Kec. Selemadeg	Saat ini, ketimpangan ekonomi antar daerah sangat terasa, tidak terkecuali Bali. Masalah tersebut memperlihatkan demokrasi di tingkat lokal yang kurang berjalan. Pemerintah daerah tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan, tidak memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat, dan tidak adanya perlindungan atas kerentanan masyarakat. Diharapkan untuk ke depannya, salah satu aspek demokrasi dapat diterapkan, yaitu akses masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.	I MADE URIP M.Si (A-209)
54	11 Agustus 2018	Aek Kanopan Kec Kualuh Hulu Kab Labuhan batu, Labuhan batu Utara	Pengurus Golkar, Pengurus Desa Calon Anggota Dprd	Perlu implementasi dan penyelarasan kembali paradigma Pancasila dalam tata hukum Indonesia dengan mempertimbangkan relasi heuristik mulai dari dasar negara, UUD 45 sampai dengan peraturan perundang-undangan.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.
55	14 Agustus 2018	Desa CluwukKec. TulisKab. BatangJateng X	Pengurus PAC dan Ranting PDIP Kec. Tulis	Sejumlah lembaga telah melakukan berbagai kajian untuk mengggambarkan visi dan peta jalan Indonesia menuju 2045. Namun, rumusan tersebut dianggap lebih sering berisi daftar impian yang tidak didasarkan atas kondisi dan kemampuan objektif negara dan keberhasilannya tergantung pada banyak faktor yang berada di luar kendali dan otoritas suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan semangat para penyelenggara negara dan pemerintahan yang lahir dari investasi terhadap martabat, harga diri, dan greget suatu negara bangsa.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
56	19 Agustus 2018	Kota Siantar Sumatera Utara	Masyarakat Kota Siantar Sumatra Utara	Setelah era reformasi berakhir, Indonesia mengalami banyak masalah termasuk kesenjangan, baik di bidang ekonomi, pendidikan hingga sosial. Pancasila merupakan pegangan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk agar bisa hidup tentram dan damai.	MARTIN HUTABARAT, SH.
57	19 Agustus 2018	Kab. Batubara Sumatera Utara	Dpc Gerindra Batubara	Terkait isu menghidupkan kembali GBHN, pada prinsipnya RPJP serupa dengan GBHN, namun yang menjadi persoalan RPJP tidak pernah disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Meskipun RPJM sebenarnya lebih detail, namun hanya aparatur pemerintah saja yang paham mengenai dokumen tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi terkait RPJP perlu terus digencarkan agar semua	MARTIN HUTABARAT, SH.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pihak paham mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan.	
58	19 Agustus 2018	Kab. Garut Jawa Barat	Mahasiswa KKN STAI Al-Musaddadiyah Garut	Penguatan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan sekolah masih belum maksimal karena pendidikan Pancasila belum menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, seperti sebelumnya mata pelajaran khusus 'Pendidikan Pengamalan Pancasila' (PMP). Perlu disusun konsep dan metode pendidikan Pancasila yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif dalam kurikulum sekolah.	AHMAD ZACKY SIRADJ
59	21 Agustus 2018	Desa Sidorejo Kec. Kedungtuban Kab. Blora Jawa Tengah	Koperasi "Jasa Sinar Tani Mandiri"	Negara seluas Indonesia memerlukan GBHN sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. GBHN dapat dirumuskan melalui 3 cara yaitu, sepenuhnya disusun oleh MPR, disusun oleh lembaga lain namun tetap bersumber pada UUD, dan dipecah dalam dua bagian, yaitu sebagian ditetapkan oleh MPR dan sebagian menjadi bagian dari SPPN. Salah satu dari skenario tersebut harus berjalan agar dapat mewujudkan negara yang ideal.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
60	23 Agustus 2018	Kab. Asahan Sumatera Utara	Masyarakat Asahan, Sumatra Utara	Dewasa ini, pengelolaan masalah keberagaman dan perbedaan di Indonesia semakin minim. Pancasila telah berhasil menjawab persoalan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yakni memberikan identitas bersama dalam kemajemukan kita yang sangat kompleks. Diharapkan ke depannya pun Pancasila tetap terus merekatkan NKRI.	MARTIN HUTABARAT, SH.
61	23 Agustus 2018	Kota Tj. Balai (tambahan)	Masyarakat Tanjung Balai, Sumatra Utara	Setiap warga Indonesia berkewajiban melestarikan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan MPR sebagai lembaga aspiratif harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengkajian sistem ketatanegaraan dan penyelesaian setiap konflik maupun isu berdasarkan nilai-nilai Pancasila.	MARTIN HUTABARAT, SH.
62	25 Agustus 2018	Kota Salatiga Jawa Tengah	Ampi (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia)	GBHN dapat membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi dan misi negara. Penghidupan kembali GBHN menimbulkan pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, secara substansional, aspirasi rakyat mengehendaki reformasi GBHN.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	26 Agustus 2018	Kab. Karo Sumatera Utara	Masyarakat Kab. Karo	Indonesia merupakan negara dengan beragam suku dan budaya. Kita harus belajar dari pengalaman Uni Soviet dan Yugoslavia yang pecah menjadi dua negara karena konflik agama, dimana Indonesia jangan sampai mengalami hal tersebut. Indonesia harus berpegang pada Pancasila agar NKRI tetap utuh dan berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika agar masyarakat Indonesia bisa terus saling menghargai satu sama lain.	MARTIN HUTABARAT, SH.
64	26 Agustus 2018	Kab. Sinjai SULSEL	DPW PKS Sulawesi Selatan	Krisis terhadap nasionalisme merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Bangsa Indonesia. Ada banyak isu yang menumbuhkan rasa sentimen daripada rasa toleransi khususnya isu agama. Bangsa Indonesia harus merefleksi ulang makna dari NKRI bahwa keberagaman dan perbedaan merupakan nyawa dari NKRI itu sendiri.	Dr. ANDI AKMAL P. SP.,MM
65	29 Agustus 2018	Kel. Bendan Duwur Kec. Gajah mungkur Kota Semarang Jateng I	IKIP Veteran Semarang	Dengan adanya rencana pembangunan, para penyelenggara negara mempunyai pegangan dan sasaran serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. MPR telah membuat rancangan GBHN yang diganti nama menjadi PHN. Diharapkan perbaikan PHN dapat menjadikan arah arus pembangunan lebih jelas dan tegas, memiliki kontinuitas atau fungsi yang berkelanjutan pada setiap periode kepemimpinan.	MUJIB ROHMAT
66	31 Agustus 2018	Kec. Ciwidey Kab. Bandung Jawa Barat	DPD PKS Kabupaten Bandung Jawa Barat	Kebanggaan akan kepemilikan dasar negara Pancasila harus dimiliki setiap orang. Termasuk pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus menempatkan eksistensi dari kelima bulir Pancasila sehingga mampu mewudkan Pancasila sebagai pedoman hidup.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.
67	01 Septembe r 2018	Maluku	Masyarakat Dusun Metar, Kab. Buru, Maluku	Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikulturisme perlu terus diperdalam dan diaplikasikan.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th
68	26 Septembe r 2018	Blora	AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia)	MPR perlu kembali diberikan kewenangan untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat mengatur, sehingga MPR bisa menetapkan haluan negara.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
69	1 Oktober 2018	Kec. Tambaksari kab Ciamis	Yayasan Al Ghaniyyah	Adalah penting membuat gerakan cinta tanah air disegala lini agar terjalin kerjasama dalam menghalau ideologi yang berasal dari luar negeri.	YANUAR PRIHATIN

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70	7 Oktober 2018	DKI JTK II	Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad, Jakarta	Amandemen UUD NRI 1945 telah mengubah sistem presidensial sesuai dengan dinamika politik dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	DR.H.M. HIDAYAT NU WAHID, MA
71	13 Oktober 2018	Kab. Padang Lawas Sumatera Utara II	PDM Padang Lawas	Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami pasang surut karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan taraf hidup yang rendah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Diharapkan anggota MPR selaku wakil rakyat dapat terus menyuarakan suara rakyat dan menjalankan fungsi pengawasan untuk turut mengawasi kebijakan pemerintah agar kondisi ekonomi dapat terjaga.	DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., MA (*Ali Taher**)
72	15 October 2018	Jateng X	Masyarakat Kabupaten Batang, Jateng	Untuk mencapai tujuan pembangunan ada pra-kondisi yang harus dicapai lebih dahulu, yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
73	15 October 2018	Jateng X	Masyarakat Kabupaten Batang, Jateng	Arah kebijakan pembangunan tidak hanya didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya bidang ekonomi, tetapi juga berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya asing.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
74	16 Oktober 2018	Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Yayasan Mutiara Mukti Utama	Pemerintah diharapkan berperan aktif memberikan materi sosialisasi penegasan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara kepada pelajar dan mahasiswa agar mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan dapat dipraktikannya dalam setiap perilaku para pelajar dan mahasiswa.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA
75	17 Oktober 2018	Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Yayasan Mutiara Mukti Utama	Peran pemerintah pusat perlu diwujudkan dalam masyarakat yang berjiwa Pancasila dan menghargai kebhinnekaan.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA
76	23 October 2018	Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	Yayasan Karya Insan Berkah	Bagaimana penegakkan supremasi hukum dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana peran Pemerintah Pusat dalam mewujudkan masyarakat yang berjiwa Pancasila dan menghargai kebhinnekaan.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77	24 October 2018	Kab. Tasikmalaya Jawa Barat	Yayasa Karya Insan Berkah	Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamental) untuk mengatur pemerintah negara atau dasar untuk mengatur peneyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosbud, pendidikan, maupun hankam).	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA
78	25 Oktober 2018	Kota Semarang	Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang	Sebagai negara yang ideal, Indonesia harus memiliki 3 landasan, yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Reformasi atau penghidupan kembali GBHN merupakan landasan operasional yang bertugas melaksanakan landasan idiil dan landasan konstitusional. Penguatan MPR dengan pemberian kewenangan membentuk GBHN dapat membantu mewujudkan negara yang ideal.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
79	25 Oktober 2018	Kec. Semarang Barat Kota Semarang	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Semarang	Negara sebaiknya memperbaiki sistem pembangunan agar terarah dan mencapai tujuan bangsa, sehingga perlu berfokus pada haluan negara menuju Indonesia 2045 dengan istilah Tri Jangka. Isi dari Tri Jangka yaitu: 1) Ekonomi - pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang adil, mandiri dan memanfaatkan teknologi; 2) Politik - memantapkan sistem negara yang bersatu, demokratis, etis, dan ideologis; 3) sosial budaya - menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, dengan SDM yang manusiawi, berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
80	27 Oktober 2018	Kab. Jepara	Masyarakat Kab. Jepara	Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi Negara Indonesia yang pluralistik. Pancasila menjunjung kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan.	ABDUL WACHID

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	31 Oktober 2018	Purwodadi, Kab. Grobogan	Perkumpulan Pedagang Kedelai dan Jagung (PPKJG) Purwodadi, Kab. Growongan	Untuk menata ulang tugas dan wewenang lembaga Tinggi Negara terutama antara lembaga MPR dan Mahkamah Konstitusi serta Lembaga Kepresidenan (dalam hal kewenangan penafsiran Konstitusi dan Penyusunan Haluan Pembangunan Nasional) serta antara DPR dan DPD RI (dalam hal penguatan fungsi legislasi DPD) maka diperlukan perubahan kelima UUD 1945 dengan cara adendum.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
82	1 Novembe r 2018	Kab. Blora	Dengan Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora	Karena arah bahwa reaktivasi GBHN disertai dengan penguatan MPR, Maka diperlukan persiapan langkah-langkah untuk mempersiapkan amandemen Undang-undang Dasar, sehingga keputusan ini merupakan domain MPR. Kalau merunut proses yang sudah dipersiapkan sejak MPR periode 2009-2014, yang akhirnya dirumuskan dalam rekomendasi yakni keputusan MPR nomor 4 tahun 2014, secara prosedural sebenarnya sudah berjalan. Bahkan dengan dibentuknya Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR, sudah mempersiapkan dan mengantisipasi jika ada aspirasi yang ditangkap oleh anggota MPR dan diteruskan sebagai usulan amandemen Undang-undang Dasar.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
83	1 Novembe r 2018	Kab. Rembang Jawa Tengah	Dewan Pimpinan Partai Golkar Rembang	GBHN sangat diperlukan karena saat ini acuan dari sistem pembangunan di daerah saling berbenturan dengan pusat sehingga menjadi tidak efektif. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan terhambat dan kesenjangan sosial ekonomi daerah masih terasa. Pemberlakuan kembali GBHN merupakan solusi karena dapat mengoptimalkan penggunaan keuangan negara secara lebih efektif dan efisien.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
84	9-11 Novembe r 2018	Langkat Sumut	Masyarakat Langkat, Sumut	Kesamaan nasib sebagai warga Nusantara di masa penjajahan harus menjadi modal bagi rasa persatuan masyarakat sebuah bangsa dan negara.	MARTIN HUTABARAT, SH.
85	10 Novembe r 2018	Kota Batu, Kec. Simangambat, Kab. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara	Tokoh Masyarakat dan Pengurus Partai Golkar Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara	Diminta kepada MPR untuk meninjau ulang wacana penguatan kewenangan MPR dalam menetapkan TAP MPR dan menyusun GBHN karena wacana itu akan mengurangi kewenangan pemerintah (Presiden) untuk membuat program perencanan pembangunan nasional sesuai janji politiknya serta memperlemah sistim presidensial yang dianut.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	11 Novembe r 2018	kec.Hulu Sihapas	Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara	Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai luhurnya menjadi suatu kesatuan integral-integratif dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jika itu diletakkan kembali, maka kita akan menemukan landasan berpijak yang sama, menyelamatkan persatuan dan kesatuan nasional yang kini sedang mengalami tantangan-tantangan zaman. Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakan utuh dengan pembukaan, di-eksplorasi-kan dimensi-dimensi yang melekat padanya.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.
87	13-14 Novembe r 2018	Jakarta Timur	Dengan Dosen, Mahasiswa, Masyarakat Umum dan Organisasi Kemasyarakatan.	Pemerintah harus mampu melihat secara komprehensif. Perbedaan dan keragaman adalah sebuah kekuatan yang harus mampu dimaksimalkan dan juga dioptimalkan. Menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah menjadi amanah Undang-undang Dasar 1945 secara bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta/asing, mampu memposisikan diri dan tidak memaksakan kehendak pribadi maupun golongan. Sinergritas antara swasta , pemerintah dan masyarakat harus tersusun dengan utuh, rapih dan saling memberikan kontribusi serta manfaat satu sama lain.	I KADEK ARIMBAWA / Prof. Dr. H. DAILAMI FIRDAUS
88	15-17 Novembe r 2018	Kab. Mojokerto, Jatim	Pd Pemuda Muhammadiyah Kab. Mojokerto, Jatim	Untuk membangun dan mendayagunakan IPTEK diperlukan nilai-nilai luhur agar dapat dipertanggungjawabkan, yaitu: 1. *Accountable,* penerapan IPTEK harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, finansial maupun politik. 2. *Visionary,* pembangnan IPTEK memberikan solusi strategis dan jangka panjang. 3. *Innovative,* temuan baru yang bermanfaat.	*DR. (HC) AM. FATWA / Drs. H.A. Budiono, M.Ed.*
89	15-17 Novembe r 2018	Maluku Tengah	Gereja GPM Suli,	Untuk memperkuat lembaga parlemen, terutama memperkuat lembaga DPD sebagai lembaga perwakilan yang anggotanya merepresentasikan rakyat di daerah diperlukan untuk melakukan perubahan ke-5 UUD 1945.	NOVITA ANAKOTTA, S.H.,M.H (HJ. NURMAWATI DEWI BANTILAN, SE /)

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
90	16-18 November 2018	Balikpapan Kalimantan Timur	PGRI Kota Balikpapan	Perlu ditingkatkan daya saing bangsa (*national competitiveness)* untuk menjadi bangsa yang mandiri dengan berlandaskan pada Pancasila. Aktualisasi kemandirian tersebut dapat dilakukan melalui *character enabler, character builders,* dan *character engineer* oleh generasi muda Indonesia. Dengan dukungan dari seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah, diharapkan generasi muda dapat berperan sebagai komponen bangsa yang paling strategis dalam memainkan proses transformasi karakter dan tata nilai Pancasila di era globalisasi.	Dr. H. MAHYUDIN, ST., MM.
91	17 November 2018	Jawa Tengah	Dengan Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kudus Jawa Tengah	Identitas Bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan dan terus menerus berkembang atau seperti yang telah dirumuskan Bung Karno merupakan ekspresi dari roh kesatuan Indonesia, kemauan untuk bersatu dan mewujudkan sesuatu yang bermuatan nyata. Perwujudan identitas bangsa Indonesia tersebut jelaslah merupakan hasil proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan in-formal.	ABDUL WACHID
92	18 November 2018	Jl. Lingkar utara, Piyaman Wonosari, Gunung Kidul, Provinsi Jogjakarta	Kelompok Pendidik	Arah kebijakan pembangunan ekonomi tidak sekedar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan berorientasi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing dari masyarakat itu sendiri.	AHMAD HANAFI RAIS, S.P., MPP
93	18 November 2018	Kab. Bireun	Masyarakat Kabupaten Bireun	MPR berpendapat bahwa seluruh persoalan yang dihadapi bangsa saat ini tidak terlepas dari faktor semakin memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Atas dasar pertimbangan ini pula, MPR menegaskan tugas kepada seluruh anggota MPR untuk menggalakan dan memperkuat kembali nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat. salah satu bentuk kongkrit dari upaya tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara disetiap daerah pemilihan anggota MPR RI.	M. SYUKUR, SH., MH / SUDIRMAN

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	19-21 November 2018	Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara KALTIM	Masyarakat Kec. Tenggarong	Pada dasarnya, hierarki peran pimpinan nasional dalam komponen bangsa adalah sebagai penggerak untuk menjalankan kehidupan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpinan nasional dilandasi paradigma nasional dengan kemampuan: (1) memantapkan integrasi bangsa dan solidaritas nasional; (2) mementingkan stabilitas nasional untuk meningkatkan rasa kebangsaan; (3) memahami perubahan dan melaksanakan pembaharuan dalam manajemen pemerintahan; dan (4) menggunakan pendekatan politik dalam upaya pencarian solusi untuk menangani permasalahan dalam kehidupan masyarakat.	KASRIYAH (*DRA. OKKY ASOKAWATI, M.SI**)
95	20 November 2018	Kota Solo	Forum Penyiaran Solo Raya	Saat ini anggota DPD kurang pro aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah, baik berupa usulan program maupun usulan RUU yang berkaitan dengan urusan daerah kepada DPR karena terbatasnya kewenangan legislasi. Oleh karena itu, diminta kepada Anggota MPR untuk mendorong penguatan kewenangan DPD RI melalui perubahan ke 5 UUD 1945.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
96	20-22 November 2018	Desa Kandolo Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur	Perangkat Desa Kandolo	Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfugsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia tidak boleh bersifat pragmatis, tidak boleh bersifat ideologis, harus menghormati HAM, dilaksanakan secara demokratis, dan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial.	Dr. H. MAHYUDIN, ST., MM.
97	21 November 2018	Koja Jakarta Utara	DPD PKS Kab/Kota Jakarta Utara	Setiap keluarga perlu menyadari pentingnya ketahanan keluarga untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai ideologi yang merusak. Perlu dibangun suasana yang teduh di masyarakat agar terus terjaga dan dipelihara karena saat ini sedang tahun politik, pilihan boleh berbeda namun kebersamaan harus tetap dipelihara.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
98	21 November 2018	Kebon Jeruk, Jakarta Barat	DPD PKS Kab/Kota Jakarta Utara	Penyediaan fasilitas *broadband* selain menumbuhkan sarana kreatifitas juga menaikkan pertumbuhan ekonomi (*technopreneur*).	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
104	22 November 2018	Kab. Ketapang KALBAR	Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kabupaten Ketapang	NKRI tebentuk karena adanya kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerokhanian. Sebagai negara Pancasila, Indonesia menjunjung tinggi agama dan tuhan sebagai sang pencipta segala sesuatu. Ideologi Pancasila juga mengamalkan nilai-nilai yang menghormati keanekaragaman sehingga kehidupan berbangsa dan negara dapat berjalan sesuai konstitusi khususnya NKRI.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH
105	26 November 2018	Paguyuban	Masyarakat Kabupaten Kudus	Penyamaan persepsi tentang Pancasila menjadi hal penting untuk mengawali langkah kedepan dalam menjalankan lima prinsip dasar Pancasila yang diwujudkan dalam setiap langkah kebijakan negara. Penyamaan persepsi atas Pancasila perlu terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara partisipatif dan jauh dari kesan dogmatis akan lebih memperkuat pemahaman penyelenggaraan negara dan masyarakat atas nilai-nilai yang menjadi arah perjalanan bangsa ini.	DARYATMO MARDIYANTO
106	26 November 2018	Sragen	FKMI Surakarta	Dalam semangat konstitutional dan dengan digerakkan oleh semangat nasionalis, berjiwa patriotis, dalam menjalankan pemerintahan negara, dan dalam mengambil kebijakan-kebijakan, perlu mempedomani keempat pilar negara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
107	26 November	Desa Ambar ketawang Kec. Gamping Kab. Sleman D.I. Yogyakarta	Pusat Pelatihan dan Pendidikan Daerah (P3D)	Ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamis yang meliputi segala aspek kehidupan nasional dengan terintegrasi. Fungsi ketahanan nasional tersebut dapat diwujudkan apabila ketahanan nasional dapat menjamin pembangunan nasional berjalan lancar menuju tujuan yang hendak dicapai. Diharapkan pemerintah senantiasa meningkatkan pembangunan sumber daya manusia karena merupakan salah satu bagian penting dari unsur pembentukan ketahanan nasional.	AHMAD HANAFI RAIS, S.P., MPP

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
108	26-27 November 2018	Karanganyar	Nasional Paralimak Comite (NPC) Karanganyar	Pemerintah berkewajiban memenuhi hak dasar dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Pemenuhan hak dasar yang dimaksud adalah untuk menyediakan akses dan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan dan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, memberikan kesempatan yang sama dan setara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah juga berkewajiban melindungi penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi dan tindakan lain yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
109	26-27 November 2018	Kec. Ciwalen - Kec. Warungkondang, Kab. Cianjur, Jawa Barat	Masyarakat Kab, Cianjur	Permodalan bagi usaha kecil dan menengah harus dipermudah, sehingga masyarakat menjadi mudah dalam menjalankan usaha-usaha kecil. Jika hal itu dilakukan maka masyarakat akan berani melakukan usaha kreatif, berlandaskan kemandirian, sehingga mampu mensejahterakan kehidupan masing-masing keluarga dan siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia.	NENG EEM MARHAMAH ZULIA HIZ (A-45)
110	27 November 2018	Desa Sawangan Kec. Tombulu Kab. Minahasa Sulawesi Utara	Masyarakat Desa Sawangan	Desa Sawangan Kecamatan Tombulu kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi kekuatan dalam kehidupan budaya dan sampai saat ini masyarakatnya masih memelihara dan melestarikan musik Kolintang sebagai salah satu musik asli daerah Sulawesi Utara. Pemerintah perlu meningkatkan ketahanan nasional berbasis desa dengan cara penyediaan lahan yang representatif dan akses masuk yang baik, sehingga Desa Sawangan dapat menjadi objek wisata yang memilki dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.	EE. MANGINDAAN

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
111	28 November 2018	Desa Rurukan Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon Sulawesi Utara	Masyarakat Desa Rurukan	Masyarakat Desa Rurukan kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara merasa terganggu dengan hadirnya RUU tentan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan karena turut mengatur tentang sekolah minggu dan katekisasi yang merupakan bagian peribadahan umat Kristiani. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta dan mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan. Seharusnya yang masuk dalam RUU tersebut hanyalah pendidikan formal, sedangkan model pelayanan pendidikan non-formal gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja menjadi bagian dari RUU tersebut.	EE. MANGINDAAN
112	28 November 2018	Bandung Barat	DPD PKS Kabupaten Bandung Barat	Pancasila sebagai pandangan hidup adalah keharusan. selagi identitasnya masih tertulis sebagai warga negara Indonesia, Pancasila haruslah menjadi bagian dari kehidupan.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.
113	28-30 November 2018	Kec. Cisauk Kab. Tangerang Prov. Banten	Perwakilan Mahasiswa, Badan Perwakilan Desa, Perwakilan LSM, Perwakilan Pemuda, dan Masyarakat di Kec. Cisauk.	Pancasila merupakan salah satu dari empat pilar negara yang berfungsi sebagai pedoman hidup rakyat Indonesia. Sebagai negara yang heterogen, Pancasila menjadi satu kesatuan dengan Bhineka Tunggal Ika untuk membangun integritas Indonesia.	H. AHMAD SUBADRI
114	29 November-1 Desember 2018	Kota Magelang	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kab. Tegal	Salah satu arah pembangunan saat ini adalah mengembalikan posisi dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan mereaktivasi GBHN sebagai model atau sistem perencenaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari berbagai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai konstitusi pembangunan, model GBHN akan lebih mempertegas tujuan akhir pembangunan, serta tahapan pencapaian, skala prioritas, apa dan bagaimana pelaksanannya. Selain itu, karena dikonstruksikan sebagai konstitusi, maka GBHN akan bersifat mengikat dan absolut sehingga diharapkan akan dijalankan secara konsisten bagi seluruh pengemban amanat kedaulatan rakyat.	HJ. ASMAWATI, SE., MM. / Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
115	30 November 2018	Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Balikapapan Tengah	Keniscayaan amandemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu hal yang mendesak untuk segera dilakukan dalam rezim reformasi yang mengakomodasi transformasi struktural sistem dan bangunan ketatanegaraan, demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih demokratis. Bangunan sistem ketatanegaraan Indonesia dan sistem politik merupakan urat nadi dalam memutar roda pemerintahan, sehingga perubahan merupakan langkah urgent sebagai upaya menjaga tatanan ideal bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan produktif.	Dr. H. MAHYUDIN, ST., MM.
116	1 Desember 2018	Kota, Sidempuan Sumatera Utara	Pengurus Golkar, Pengurus Partai Golkar Kota Sidempuan, Sumatera Utara	*Trend* penyebaran berita palsu (hoax) di media massa oleh kelompok tertentu terutama saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sangat meresahkan rakyat; Dinilai KUHP dan UU ITE yang ada saat ini berlaku tidak mampu menyasar dan atau menindak para produsen dan menyebar kabar bohong karena itu diminta kepada pemerintah untuk membuat UU yang mengatur tentang perilaku di dunia maya. Selain itu, diminta kepada pimpinan media untuk memperhatikan asas dan prinsip jurnalistik dalam pemberitaannya.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.
117	1 Desember 2018	Labuhan Batu	Labuhan Batu, Sumut	Teori *hierarki* memudahkan untuk menemukan keaseimbangan hukum dan keharmonisan hukum yang selasras dan serasi. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.
118	1-3 Desember 2018	Kec. Gunung Kaler Kab.Tangerang Banten	Perwakilan ORMAS, LSM, Kelompok Pedagang Kecil, dan Masyarakat di Kec. Gunung Kaler	Generasi muda adalah generasi penerus bangsa sehingga dapat menentukan nasib Indonesia kedepannya. Fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga olahraga, dan akomodasi antar desa diperlukan untuk mempermudah akses sesama pemuda untuk melakukan kegiatan yang melatih *softskill* seperti turnamen olahraga dan lain sebagainya.	H. AHMAD SUBADRI

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
119	2-4 Desember 2018	Kota Siantar Sumatera Utara	Masyarakat Siantar	Radikalisme dan terorisme masih menjadi pergumulan kebangsaan kita. Konflik karena kebijakan pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dirasakan belum berkeadilan masih sering terjadi. Pancasila telah mempertahankan baik kesatuan maupun kemajemukan Indonesia secara dinamis. Pancasila merekatkan NKRI.	MARTIN HUTABARAT, SH.
120	2-4 Desember 2018	Kab. Batubara Sumatera Utara	Masyarakat Kab. Batubara	Masyarakat Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara merasa hasil pertanian dan hasil nelayan sulit untuk dipasarkan sehingga berdampak pada terhambatnya aktivitas perekonomian. Masyarakat berharap MPR dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini.	MARTIN HUTABARAT, SH.
121	3 Desember 2018	Indramayu		NKRI Harga Mati adalah Nasionalisme Absolut. Tekad tersebut menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah digoyahkan atau diadu domba oleh cara apapun.Sudah saatnya pemikiran bangsa kita harus berorintasi kedepan dalam artian tidak berpikiran ke arah kepentingan yang sifatnya sementara, sampai harus merelakan saudaranya sendiri untuk dimusuhi. Kepentingan Negara atau kepentingan Bangsa itu harus diatas segalanya, sehingga jangan sampai pesta demokrasi merusak sendi-sendi kebangsaan kita.	DEDI WAHIDI
122	4 Desember 2018	Kabupaten Banggai	Masyarakat Sulawesi Tengah	Peningkatan pemahaman terhadap kemajemukan sosial budaya sebagai pencitraan dari budaya bangsa Indonesia yang semakin dewasa merupakan upaya membangun citra diri didasarkan aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke bhinnekaan yang dimiliki. untuk merealisasikan harapan ini, masyarakat dan segenap komponen bangsa harus lebih dewasa dalam mengaktualisasikan pemahaman nilai-nilai kebhinnekaan.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
123	5 Desember 2018	Kabupaten Banggai	Masyarakat Sulawesi Tengah	Pancasila tidak diragukan memiliki dimensi yang memperkuat identitas bangsa Indonesia, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memang senyatanya, secara riil terdapat dalam kehidupan diberbagai pelosok tanah air, sehingga nilai dasar tersebut benar bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
124	6 Desember 2018	Kabupaten Morowali	Masyarakat Sulawesi Tengah	Keberadaan Pancasila telah terbukti mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tergabung dalam satu ikatan "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya biar berbeda-beda tetapi tetap satu.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
125	7 Desember 2018	Kab. Karo Sumut	Masyarakat Karo	Dengan diaturnya Pancasila pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan negara serta menjiwai ketentuan-ketentuan di dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945.	MARTIN HUTABARAT, SH.
126	7 Desember 2018	Dairi Sumut	Masyarakat Dairi	Pentingnya GBHN dalam pembangunan nasional. GBHN dalam fungsinya sebagai visi misi bangsa Indonesia berguna untuk menentukan arah pembangunann nasional. Jadi, semua pembangunan Indonesia terarah dan terancang jelas di dalam GBHN.	MARTIN HUTABARAT, SH.
127	7 Desember 2018	Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Pemerintah Kelurahan Pematang Wangi	Sosialisasi pemerintah ke masyarakat agar lebih ditingkatkan antara lain mengenai bagaimana hasil pertanian dapat lebih meningkat, ketersediaan air untuk lahan pertanian dalam mengantisipasi datangnya musim kemarau, dan memohon kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan agar warga yang hidup dari sektor pertanian tidak kekurangan lahan dari kegiatan pembangunan untuk perumahan.	ENDRO S. YAHMAN
128	7-9 Desember 2018	Jabar VIII/ Kota Cirebon	Yayasan Darul Ma'arif Indramayu	Penting menanamkan nasionalisme kepada para generasi muda melalui pengamalan Pancasila. Pendidikan karakter sangat diperlukan atas dasar : adanya kebutuhan nyata dan mendesak, proses transisi nilai sebagai proses peradaban, peranan sekolah sebagai pendidik moral yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat, tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang sarat konflik nilai, kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral, kenyataan yang sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai, persoalan moral sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan, dan adanya landasan dan dukungan terhadap moral di sekolah.	DEDI WAHIDI

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
129	7-9 Desember 2018	Kelapa Dua, kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Kelompok Kerja Desa Sehat Cerdas	Para pendiri bangsa menyepakati Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Namun melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR, terkesan mereduksi kedudukan Pancasila, dimana Kedudukan Pancasila disamakan dengan Konstitusi (UUD 1945), NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini jelas mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Bangsa karena itu diminta kepada MPR untuk tidak mengubah kedudukan Pancasila demi politik anggaran. Selain itu, MPR perlu u ntuk menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara.	H. AHMAD SUBADRI
130	8 Desember 2018	Pekon Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Pemerintah Pekon Fajar Agung Barat	Sosialisasi pemerintah ke masyarakat agar lebih di tingkatkan antara lain mengenai bagaimana hasil pertanian dapat lebih meningkat, ketersediaan air untuk lahan pertanian dalam mengantisipasi datangnya musim kemarau, dan memohon kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan agar warga yang hidup dari sektor pertanian tidak kekurangan lahan dari kegiatan pembangunan untuk perumahan, serta pensertifikasian tanah warga dalam program Prona.	ENDRO S. YAHMAN
131	8 Desember 2018	Pekon Banjar Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Pemerintah Pekon Banjarejo	Sosialisasi pemerintah ke masyarakat agar lebih di tingkatkan antara lain mengenai bagaimana hasil pertanian dapat lebih meningkat, ketersediaan air untuk lahan pertanian dalam mengantisipasi datangnya musim kemarau, dan memohon kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan agar warga yang hidup dari sektor pertanian tidak kekurangan lahan dari kegiatan pembangunan untuk perumahan, serta pensertifikasian tanah warga dalam program Prona dan membantu dengan bertindak cepat dan cermat dalam proses penyelesaian konflik pertanahan.	ENDRO S. YAHMAN
132	9-11 Desember 2018	Indramayu	Yayasan Darul Ma'arif Indramayu	Fungsi dan manfaat UUD 1945 bagi warga negara, bangsa dan negara adalah sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.	DEDI WAHIDI
133	9-11 Desember 2018	Balai desa Sumber Petung, Kabupaten Lumajang,	Organisasi Masyarakat Desa Duren	Anggota MPR di harapkan terus melakukan sosialisasi 4 pilar dan ketetapan MPR, Bukan saja kepada Ormas tetapi diharapkan juga kepada pelajar.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Provinsi Jawa Timur			
134	10 Desembe r 2018	Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara II	Masyarakat Mandailing Natal	Dalam Perannya pendidikan tinggi menjadi salah satu penentu. karena dalam konteks daya saing global, peranan pendidikan tinggi sangat penting dalam mendorong percepatan kemajuan bangsa. Lulusan perguruan tinggi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.	DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., MA (*Ali Taher**)
135	10-11 Desembe r 2018	Kab Jombang	Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyah (FKDT) Jombang	Berbagai permasalahan bangsa yang terjadi dsebabkan semakin lunturnya toleransi atas perbedaan dan kemajemukan diatara komponen bangsa. oleh karena itu, seluruh komponen bangsa dalam susunan suprastruktur, infrastruktur dan substruktur politik harus mampu membangun kembali komunikiasi politik yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa untuk mempertahankan nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan.	*DR. (HC) AM. FATWA / Drs. H.A. Budiono, M.Ed.*
136	11 Desembe r 2018	Kec. Muara Batang Toru Kab.Tapanuli Selatan Sumatera Utara II	Pcm Batang Toru Tapanuli Selatan	Sila ke 5 yang berbunyi 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' belum tercapai karena masih banyak ketimpangan yang terjadi mulai dari bidang hukum hingga bidang pendidikan. Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari diterapkannya nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke 5.	DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., MA (*Ali Taher**)
137	12 Desembe r 2018	Desa Pal XI Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara II	PDM Tapanuli Selatan	Sila ke 5 yang berbunyi 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' belum tercapai karena masih banyak ketimpangan yang terjadi mulai dari bidang hukum hingga bidang pendidikan. Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari diterapkannya nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke 5.	DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., MA (*Ali Taher**)
138	12 Desembe r 2018	Kab. Ciamis Jawa Barat	Forum Ketahanan Bangsa (FKB), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda Kab. Ciamis	Banyaknya lapangan kerja dapat membantu pemerintah untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Pembangunan ekonomi yang Pancasilais dapat membantu menciptakan lapangan kerja karena lebih mengedepankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berientasi kerakyatan.	AGUN GUNANDJAR SUDARSA *(AZIZ SYAMSUDDIN**)

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
139	12 Desember 2018	Kab. CiamisJawa Barat	Forum Masyarakat Desa Sejahtera (FMDS) Kab. Ciamis	Banyaknya lapangan kerja dapat membantu pemerintah untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Pembangunan ekonomi yang Pancasilais dapat membantu menciptakan lapangan kerja karena lebih mengedepankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berientasi kerakyatan.	AGUN GUNANDJAR SUDARSA *(AZIZ SYAMSUDDIN*)*
140	12 Desember 2018	Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Lampung I	Pemerintah Kelurahan Way Dadi	Masyarakat Kelurahan Way Dadi kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung menuntut kepastian hukum karena tidak mendapat perlakuan yang adil atas tanah garapan. Konflik atas tanah dengan PT. Way Halim Permai ini sudah berlangsung lama dan mengalami kendala terkait persertifikatan tanah yang diperuntukkan kepada masyarakat. Melalui mekanisme yang ada di DPR, anggota MPR hendaknya dapat menyampaikan kepada pemerintah - cq. Kementerian ATR/BPN dan K/L terkait agar dapat menyelesaikan konflik pertanahan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	ENDRO S. YAHMAN
141	12-14 Desember 2018	DPC PDI-P Kab Demak	DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak	Dari masukan-masukan yang diperoleh selama ini mengerucut pada solusi mendasar bangsa ini untuk meluruskan kembali arah perjuangannya dengan mengembalikan sistem pengelolaan negara kepada tujuan awal didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. hal ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang ahistoris (melupakan sejarah pendiriannya).	DARYATMO MARDIYANTO
142	13 Desember 2018	Desa Talang Mulya Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran Lampung I	Pemerintah Desa Talang Mulya	Terkait beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, diharapkan anggota MPR melalui mekanisme yang ada di MPR, hendaknya menyampaikan kepada pemerintah - cq. Kementerian Dalam Negeri, agar pemerintah memberikan pemahaman dan peningkatan kepada masyarakat dan pemerintahan desa agar paham betul bagaimana caranya mengajukan usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan secara terus menerus sampai betul-betul paham dan mampu melakukannya.	ENDRO S. YAHMAN

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
143	13 Desember 2018	Kabupaten Banggai	Masyarakat Sulawesi Tengah	Bersikap toleran merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun ardi dalam kehidupan umat manusia ini.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
144	13 Desember 2018	Kabupaten Banggai	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemuda	Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
145	13 Desember 2018	Kab. Asahan Sumut	Masyarakat Asahan	Ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi instrumen kebangsaan dan kenegaraan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan ke-Indonesiaan, sehingga hampir semua konflik dan kekerasan di Indonesia dapat teratasi dengan baik.	MARTIN HUTABARAT, SH.
146	13 Desember 2018	Kota Tanjung Balai Sumut	Masyarakat Langkat, Sumut	Pancasila telah memastikan bahwa negara bangsa ini berhasil keluar dari segala ancaman yang berpotensi memporak porandakan negara persatuan karena kebersamaan semua anak bangsa yang majemuk. Pancasila telah memastikan bahwa pembangunan dan modernisasi Indonesia bisa berjalan karena adanya kerjasama dari semua elemen bangsa yang beragam.	MARTIN HUTABARAT, SH.
147	13 Desember 2018	Kab. Bandung Barat Jawa Barat	DPW PKS Jawa Barat	Kebanggaan akan kepemilikan dasar negara Pancasila harus dimiliki setiap orang, termasuk pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus menempatkan eksistensi dari kelima bulir Pancasila sehingga mampu mewujudkan Pancasila sebagai pedoman hidup.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.
148	13 Desember 2018	Kab. Mempawah Kalbar	DPW Partai Nasdem	Pada dasarnya, unsur-unsur yang bisa mengobarkan semangat nasionalisme sehingga NKRI tetap terjaga yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asa kerohanian. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa NKRI merupakan negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
149	13 Desember 2018	Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur Aceh	LSM Komunitas Demokrasi Rakyat Aceh	Liberalisme menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ketimuran. Sistem pendidikan harus menyediakan kurikulum yang memuat pendidikan nilai Pancasila agar dapat memupuk rasa nasionalisme, sehingga dapat memperkuat kembali nilai kebangsaan dan norma agama.	M. SYUKUR, SH., MH / SUDIRMAN
150	14 Desember 2018	Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang	LSM Komunitas Demokrasi Rakyat Aceh	Generasi muda adalah generasi emas penerus bangsa yang menentukan wajah masa depan Indonesia. Globalisasi menyediakan segala sesuatu secara instan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga akan memupuk rasa malas. Penanganan yang konkret dapat dilakukan dengan cara yang lebih persuasif seperti meningkatakan ketersediaan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.	M. SYUKUR, SH., MH / SUDIRMAN
151	14 Desember 2018	Kabupaten Banggai Kepulauan	Masyarakat Sulawesi Tengah	Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
152	14-15 Desember 2018	Kab. Mojokerto, Jatim	Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyah (FKDT) Mojokerto	Permasalahan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah: pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai; pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama di kalangan peserta didik juga kurang memuaskan; pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai; kehidupan beragama disebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama; kehidupan harmoni didalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antar umat beragama.	*DR. (HC) AM. FATWA / Drs. H.A. Budiono, M.Ed.*
153	15 Desember 2018	Kec. Bulagi Kab. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Perempuan di Kec. Bulagi	Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki banyak masyarakat tradisional yang belum berpikir modern dan cenderung primordialis dan intoleran. di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh baik maupun buruk. Pemahaman dan implementasi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam "empat pilar"	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				harus dijaga demi keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.	
154	15-17 Desembe r 2018	Kota Ambon Maluku	Persekutuan Pemuda Keliobar	Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi penting untuk dilakukan karena sangat berkaitan dengan wewenang sebagai anggota DPD yang terbatas. Selain usul penguatan lembaga DPD, pokok-pokok usul perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 yaitu penguatan sistem presidensial, penguatan lembaga perwakilan, penguatan otonomi daerah, calon presiden perseorangan, pemilihan umum nasional dan pilkada, forum previlegiatum, optimalisasi peran MK, penambahan pasal HAM, penambahan bab Komisi Negara, serta penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian.	NOVITA ANAKOTTA, S.H.,M.H (HJ. NURMAWATI DEWI BANTILAN, SE /)
155	24 Desembe r 2018	Jawa Barat	Masyarakat Bogor	Menurut konstitusi, Indonesia adalah negara kesatuan. Namun terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci di dalam UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Wewenang pemerintah pusat ada di 6 urusan wajibnya yaitu: pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter, agama, dan pendidikan.	MOH. ARIEF SUDITOMO, SH., MA (*Djoni Rolindrawan**)
156	2 Januari 2018	KEC. CIBINONG KAB. CIANJUR JAWA BARAT	Masyarakat Kec. Cibinong, Kab. Cianjur	Sosialisasi 4 pilar kepada seluruh elemen bangsa perlu untuk memperkuat integrasi bangsa. Kebiasaan yang sudah berkembang seperti gotong royong, kerukunan umat beragama, kesadaran akan keragaman suku, kesadaran akan perbedaan potensi daerah, dan kesadaran akan banyaknya partai politik perlu terus menjadi identitas bangsa sehingga akan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.	NENG EEM MARHAMAH ZULIA HIZ (A-45)
157	3-5 Januari 2019	SUMATERA UTARA	Masyarakat Siantar, Sumatera Utara	Reformulasi GBHN dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: 1) amandemen UUD; 2) penetapan melalui TAP MPR dengan terlebih dahulu membuat UU MPR; dan 3) perubahan UU RPJP menjadi UU GBHN.	MARTIN HUTABARAT, SH.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
158	4-6 Januari 2019	JATENG X	Pengusaha Konveksi	Arah kebijakan pembangunan ekonomi tidak sekedar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing. Untuk membangun struktur perekonomian yang kokoh perlu penekanan lebih dalam pengembangan ekonomi rakyat dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi yang didominasi oleh usaha besar dan konglomerat. Masalah kekurangan kapital (investasi) bisa dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja, sehingga bisa menciptakan lebih banyak unit usaha dan dapat menyerap tenaga kerja sebagai pelaku ekonomi.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
159	5 Januari 2019	Kab. Pekalongan Jateng	Satgas PDI Perjuangan dan Tokoh Masyarakat	Pancasila diarahkan utk menumbuhkan kepercayaan dan daya juang agar pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar-sila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Pancasila harus menjadi ideologi yg hidup, membawa manfaat riil bagi kehidupan warga, dan melayani baik kepentingan vertical (negara) maupun kepentingan horisontal (warga).Mengatasi krisis multidimensional yang melanda Indonesia, perlu dilakukan revolusi dalam tiga ranah diantaranya mental kultural, ranah political, dan ranah material. Dengan tiga revolusi ini, Pancasila akan menjadi sumber energi untuk melakukan perubahan dan trasnformasi sistem sosial mendasar.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
160	6 Januari 2019	Kec. Taman Kab Pemalang Jateng	Kader Partai dan Masyarakat Beji	Ideologi tanpa pelaksanaan akan hilang makna. Atas dasar itu Pancasila harus dipertegas dalam pasal-pasal dan ayat-ayat UUD serta undang-undang dan peraturan turunannya agar dapat menjadi panutan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161	7-9 Januari 2019	SUMATERA UTARA	Masyarakat Batubara, Sumatera Utara	Dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan, sebagian besar aspirasi menyetujui menghidupkan kembali perencanaan nasional model GBHN. Dalam penyusunan GBHN (dalam kewenangan MPR) dapat melibatkan semua elemen masyarakat Indonesia. MPR dianggap sebagai lembaga yang paling tepat untuk kembali diberi wewenang menetapkan sistem perencanaan nasional model GBHN.	MARTIN HUTABARAT, SH.
162	8 Januari 2019	Kab. Garut	Yayasan YPI Baiturrahman	Sekolah perlu diberi materi sosialisasi penegasan Pancasila sebagai dasar negara agar mampu mengamalkannya dalam setiap perilaku para siswanya dalam keseharian.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA
163	11 JANUARI 2019	BALI	Krama Desa Adat Mambang	Permasalahan sistem ketatanegaraan Indonesia dapat terjadi di lingkup sekolah dan masyarakat. di lingkup sekolah permasalahannya adalah bentuk pembelajaran yang keliru oleh guru karena kompetensi yang tidak memadai, bahan ajar yang keliru, dan kurikulum yang kurang mendukung. Permasalahan di masyarakat adalah penyimpangan pelaksanaan tugas dan wewenang oleh pejabat negara, anggota DPR dan DPRD, serta para penegak hukum.	I MADE URIP M.Si (A-209)
164	12 Januari 2019	Jabar XI	Badan Koordinasi Majlis Ta'lim Masjid (BKMM)	Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas bentuk pendidikan moral ala penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang tidak bersifat doktrinasi/propaganda seperti saat masa pemerintahan Orde Baru. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga merasa bahwa kegiatan penataran P4 masih penting untuk diberikan di sekolah formal dan untuk pasangan yang mau menikah di KUA, sehingga gagasan ini menjadi penting untuk segera direalisasikan.	AHMAD ZACKY SIRADJ
165	12 JANUARI 2019	PALEMBANG	Masyarakat, Tokoh Agama dan Mahasiswa Kota Palembang	Pancasila sebagai patokan regulasi pada kegiatan industri rumahan terhadap ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya bidang pariwisata, tidak bertujuan untuk mematikan perkembangan industri tenaga kerja di Indonesia, melainkan sebaliknya, menstimulus industri tersebut agar berkembang terarah dan selaras dengan lingkungannya, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.	ABDUL AZIS, S.H.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
166	14 Januari 2019	Yogyakarta	Pusat Pelatihan dan Pendidikan Daerah (P3D) Yogyakarta	Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Struktur perkenomian ini dperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, pertambangan, dan jasa-jasa pelayanan yang efektif.	AHMAD HANAFI RAIS, S.P., MPP
167	15-Jan-19	KEC. PAGAK KAB. MALANG JATENG IV	Ibu-Ibu PKK Desa Pagak	Fondasi industri kreatif adalah sumber daya insani Indonesia. Untuk itu, pembangunan industri kreatif perlu difokuskan pada pengembangan potensi SDM agar terlatih dan terberdayakan dalam menumbuhkembangkan pengetahuan dan kreativitas. Perlu juga dibangun rantai nilai, yaitu rantai proses penciptaan nilai yang akan mengatur input berupa akusisi dan konsumsi produk fisikal (*tangible*) sebagai sumber daya (bahan baku).	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
168	15 Januari 2019	KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN LAMPUNG	Tokoh Masyarakat dan Pemuda Kec. Baradatu	Indonesia sebagai negara hukum menggunakan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini juga menjadi dasar sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mengatur tentang lembaga negara serta organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara.	IR. MARWAN CIK ASAN, MM
169	16 Januari 2019	KEC. GUNUNG LABUHAN KAB. WAY KANAN LAMPUNG	Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Perempuan dan Pemuda Kec. Gunung Labuhan	Masyarakat mengharapkan peran MPR untuk terus mengawal Undang-Undang Desa guna penguatan pembangunan desa. Hal ini merupakan salah satu langkah pembangunan ekonomi bangsa yang selama ini terlalu fokus pada pembangunan kota.	IR. MARWAN CIK ASAN, MM
170	17 Januari 2019	NGANJUK JAWA TIMUR	Guru Lembaga Pendidikan Muslimat NU Nganjuk	UUD NRI 1945 yang telah diamandemen 4 kali dirasa masih memiliki beberapa kekurangan seperti pasal-pasal yang multi interpretatif sehingga menimbulkan instabilitas hukum dan politik, serta besarnya kekuasaan yang dimiliki DPR.	Drs. H.A. Budiono, M.Ed.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
171	18 Januari 2019	Kab. Mamasa	Perseketuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa (PPRGTM) Klasis Messawa	Umat Kristen sebagai warga Negara Indonesia bertanggung jawab secara politis bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, Negara, dan masyarakat Indonesia. Umat Kristen antara lain perlu meningkatkan kegiatan pendidikan politik warga, kritis terhadap ketimpangan pembangunan dan penyalahgunaan wewenang, melawan penebaran ujaran kebencian, menjadi provokator damai, dan menyelenggarakan kehidupan beragama yang bebas namun toleran, saling menghormati, dan menghargai.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th
172	19 Januari 2019	DEMAK	Masyarakat Desa Srobyong	Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu saluran pertanggungjawaban pemerintah pada rakyat atas kinerjanya. Hal ini dapat memastikan lembaga publik akuntabel dan kredibel, serta membantu perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).	DARYATMO MARDIYANTO
173	19 Januari 2019	PADANG	Asrama Haji Kota Padang	Perlu dibudayakan upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga berkualitas melalui Internet Sehat dan Aman.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
174	19 Januari 2019	KECAMATAN PADANG BARAT, KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT	DPW PKS Provinsi Sumatera Barat	Perlunya penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar tercipta suatu sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan Pancasila dan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
175	20 Januari 2019	BOGOR	DPC Gerindra Kota Bogor	Pemerintah perlu menyusun peraturan atau konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Inovasi perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kerja sama di luar lingkup pemerintah perlu dijalin, misalkan dengan menggandeng ABG (*Academician Businessmen Government*) dan menggunakan sistem insentif, antara lain lewat keringanan pajak.	AHMAD RIZA PATRIA
176	20 Januari 2019	KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN LAMPUNG	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan Kec. Banjit	Masyarakat merasa anggota legislatif sebagai wakil dari masyarakat masih kurang menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat masih belum merasakan keberadaan wakilnya baik di tingkat nasional maupun daerah.	IR. MARWAN CIK ASAN, MM

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
177	20 Januari 2019	DUSUN AIRLOUW KOTA AMBON MALUKU	AMGPW Airlow	Kegiatan sosialisasi 4 pilar penting untuk dilakukan terutama bagi generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan sekaligus mampu melawan gerakan radikalisme yang berkembang di masyarakat. Waktu sosialisasi pun perlu ditambahkan supaya masyarakat maupun pelajar lebih memahami dengan benar empat konsensus kebangsaan tersebut.	NOVITA ANAKOTTA, S.H.,M.H
178	21 Januari 2019	BOGOR	DPC Gerindra Kota Bogor	Untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif kemajuan teknologi, maka perlu dibuat secara global peraturan-peraturan atau suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna teknologi.	AHMAD RIZA PATRIA
179	21 Januari 2019	Jabar XI	Pengurus FKDT Se-Kab. Garut	Pancasila pada dasarnya jangan disejajarkan dengan Islam, karena Agama Islam adalah Wahyu Allah. Meskipun nilai-nilai Pancasila ada sebagian di dalam ajaran Islam, namun pemahaman ini tidak boleh salah ditempatkan agar tidak terjadi penyimpangan seperti kelompok orang yang anti terhadap Pancasila.	AHMAD ZACKY SIRADJ
180	22 Januari 2019	BOGOR	DPC Gerindra Kota Bogor	Perluasan akses ke perguruan tinggi diperlukan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan pemberian akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki kemampuan akademik.	AHMAD RIZA PATRIA
181	22 Januari 2019	kab. Pekalongan	Permadani (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia)	Penetapan sistem pemilu, baik Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota serta legislatif perlu dituangkan dalam GBHN sebagai bentuk pola pembinaan demokrasi di Indonesia, sekaligus menghindari politik uang sebagai pintu masuk pejabat korup.	Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
182	22-23 Januari 2019	JATENG III	Tokoh Masyarakat	Gerakan membumikan Pancasila sangat penting untuk terus dilakukan karena Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa selalu menghadapi ancaman. Bangsa Indonesia tidak dapat menghindari dinamika globalisasi, termasuk kelompok penyebar paham radikal, sehingga perlu peran komponen bangsa, termasuk masyarakat untuk dapat terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
183	23 Januari 2019	KAB. BATANG JAWA TENGAH	Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	Perencanaan model GBHN diperlukan sebagai integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. GBHN dipandang urgen untuk memastikan bahwa proses pembangunan nasional merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila.	Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
184	23 Januari 2019	KEC. GABUS KAB. GROBOGAN JATENG III	Ustadz, Santri, dan Kelompok Pemuda di Pondok Pesantren Futuhiyyah Pandanharum	Generasi muda perlu menguatkan semangat kebangsaan dengan memahami substansi dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan merupakan pemahaman rakyat atau masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang telah diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Ags 1945. Paham kebangsaan itu tidak menampatkan bangsa Indonesia lebih dari bangsa lain, tetapi menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban manusia.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
185	23 Januari 2019	KEC. GABUS KAB. GROBOGAN JATENG III	Tokoh Masyarakat, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Kepemudaan Kec. Gabus	Generasi muda perlu meningkatkan literasi media sebagai bekal diri untuk mengadapi kemajuan teknologi di era globalisasi. Literasi media tersebut diharapkan dapat membuat pemuda turut serta menyebarkan konten-konten informasi positif dan mengandung manfaat bagi kehidupan kegamaan, berbangsa dan bernegara, terutama juga untuk mencegah penyebaran konten-konten anti Pancasila.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
186	23 Januari 2019	JATICEMPAKA KEC. PONDOK GEDE KOTA BEKASI	Dosen, Mahasiswa, Masyarakat Umum, dan Organisasi Kemasyarakatan (Universitas Islam As-Syafi'iyah)	Karakter bangsa yang terangkum dalam Pancasila menjadi sangat penting untuk terus dihayati, diamalkan, dan dikembangkan supaya terus menjadi pemandu arah pembangunan Indonesia di masa kini, maupun masa yang akan datang.	Prof. Dr. H. DAILAMI FIRDAUS
187	24 Januari 2019	Desa Latulahat, Maluku	Desa Nusaniwe	Ancaman saat ini terhadap sebuah negara tidak mengenal batas negara, bersifat transnasional, non-fisik (ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam), berbentuk asimetris, non linear dan extra-ordinary serta selalu mengeksploitasi kerawanan-kerawanan mnasyarakat (ras, suku, agama). Oleh karena itu, sistem kemanan nasional harus memiliki paradigma baru tentang sistem pertahanan kemanan (*one integrated nasional effort*)	NOVITA ANAKOTTA, S.H.,M.H

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
188	24 Januari 2019	PASIR PUTIH - SUNGAI LOBU KEC. SILANGKITANG KAB. LABUSEL SUMUT II	Masyarakat Pasir Putih dan Sungai Lobu, Kab. Labusel	Reposisi TAP MPR RI perlu dilakukan melalui rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjamin konsistensi dan keselarasan norma pada berbagai tingkatan peraturan perundangan. Hal ini dikarenakan TAP MPR pada dasarnya tidak bersifat mengatur (*regeling*), melainkan penetapan (*beschikking*). Selain itu, terdapat norma di luar *hierarki* yang sesungguhnya bersifat mengatur seperti peraturan lembaga negara utama, peraturan menteri dan lembaga negara setingkat kementerian, dan peraturan kepala daerah.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN
189	24 Januari 2019	SUMUT II	Aula Fajar Dolpa, Labuanbatu Utara; Peserta, Pengurus DPD Golkar Kab. Labuhanbatu Utara dan Simpatisan Partai Golkar Labuhanbatu Utara	Wacana Amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan kajian mendalam dan meminta sumbangan pemikiran dan pendapat dari masyarakat terutama para akademisi.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN
190	25 Januari 2019	SUMUT II	PTPN IV, Desa Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu; Peserta, Karyawan Ptpn Iv	Wacana memperkuat kewenangan MPR terutama untuk memberikan kewenangan membuat naskah Arah Perencanaan pembangunan nasional semacam GBHN perlu dipertimbangkan ulang karena wacana itu berpotensi memperlemah kedudukan dan kewenangan Presiden (eksekutif) dan memperkuat kewenangan parlemen.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN
191	25 Januari 2019	Nganjuk	Majelis Wakil Cabang NU Kec. Tanjunganom	Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di lembaga Parlemen tingkat Nasional sebagai langkah mengakomodir kepentingan masyarakat daerah. Namun demikian, kewenangannya dibatasi sehingga anggota DPD kurang pro aktif memperjuangkan kepentingan daerah karena itu diperlukan penguatan kewenangan DPD RI.	Drs. H.A. Budiono, M.Ed.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
192	25 Januari 2019	BALAI KAMPUNG LANCOK, ACEH UTARA	LSM Komunitas Demokrasi Rakyat Aceh	Terjadinya perubahan UUD 1945, berdampak terhadap perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR. Nilai-nilai kebangsaan pada hari ini semakin memudar dan ditinggalkan sebagai panduan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. persoalan utama yang muncul adalah degradasi moral dan nasionalisme sehingga berimplikasi berbagai masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak terlepas dari faktor semakin memudarnya nilai-nilai kebangsaan.	SUDIRMAN
193	26 Januari 2019	Rembang	Kelompok Ternak Ayam "Berkah" Desa Kutosari Kecamatan Gringsing	Pendidikan di Indonesia perlu dibuat semacam GBHN yang mengatur *road map* pendidikan Indonesia dimasa mendatang. perlu dilakukan upaya dan strategi inovasi dalam sistem pendidikan yang hendaknya diletakkkan dalam GBHN.	Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
194	26 Januari 2019	KAB. SOPPENG SULSEL	Masyarakat Kab. Soppeng	Masyarakat merasa pembangunan tidak merata di segala bidang, terbukti dengan begitu gencarnya pembangunan di segi infrastruktur jalan tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang SDM. Angka pengangguran semakin meningkat, sebaiknya program di bidang kesejahteraan masyarakat semakin difokuskan.	SYAMSUL BACHRI S, MSC
195	26 Januari 2019	Kab. Garut	Yayasan Pembina Generasi Masa Depan, Aula SMP Persada Cilawu, Kab. Garut, Prov Jabar (Peserta, Para Guru dan Siswa, Perangkat Desa, Ibu-Ibu dan Tokoh Pemuda dan Agama)	Penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan (Formal dan non formal) di Indonesia yang tidak merata dan tak terlayani sebagian warga menyebabkan lemahnya daya saing warga dalam mencari lapangan kerja karena itu diminta kepada pemerintah dan DPR untuk memperjuangkan terpenuhinya hak warga untuk memperoleh pendidikan yang layak.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA
196	27 Januari 2019	KEC. BLAMBANGAN UMPU KAB. WAY KANAN LAMPUNG	Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda Kec. Balmbangan Umpu	Masyarakat perlu diberikan pemahaman kembali mengenai peran dan fungsi keberadaan lembaga-lembaga baru hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan tugas serta wewenang lembaga yang sudah ada.	IR. MARWAN CIK ASAN, MM
197	28 Januari 2019	KEC. TANASITOLO KAB. WAJO SULSEL	Masyarakat Wajo, Kec. Tanasitolo	Sistem ketatanegaraan merupakan suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Perlu diterapkan sistem yang adil dan bijaksana sehingga ambisi	SYAMSUL BACHRI S, MSC

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pemerintah terhadap negara ini dapat terwujud dengan optimal.	
198	28 Januari 2019	SUMUT II	Kecamatan Kualuh Leidong, Labuanbatu Utara; Peserta, Pengurus Ranting Partai Golkar, Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dan Simpatisan Partai Golkar Labuhanbatu Utara	Wacana penataan dan memperkuat kewenangan MPR untuk meminta pertanggungjawaban pimpinan lembaga negara, khususnya Presiden tidak relevan karena Presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN
199	28 Januari 2019	SUMUT II	Desa Pinarik, Kec. Dolok Sigompulon, Kab. Padang Lawas Utara; Peserta, Pengurus Partai Golkar Kecamatan Dolok Sigompulon	Praktek politik Identitas telah memutuskan semangat kekeluargaan, persatuan, dan rasa solidaritas serta mengikisnya semangat nasionalisme menjadi ancaman eksistensi negara karena itu segera mengambil tindakan secepatnya untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi Negara Republik melalui jalan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN
200	28 Januari 2019	DESA KAPLONGAN KEC. KEDOKANBUNDER KAB. INDRAMAYU JABAR VIII	Yayasan Darul Ma'arif Indramayu	Pengamalan Pancasila bagi generasi muda dapat dilakukan dengan cara 'Menunjukkan Sikap Positif terhadap Pancasila", melalui refleksi sejarah; upacara bendera; memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa; pembelajaran pendidikan kewarganegaraan; pengenalan tokoh sejarah; dan memakai serta mencintai produk hasil produksi dalam negeri.	DEDI WAHIDI
201	29 Januari 2019	KEC. SLEMAN KAB. SLEMAN D.I. YOGYAKARTA	Pusat Pelatihan dan Pendidikan Daerah (P3D) Yogyakarta	Prinsip-prinsip dimensi ekonomi pembangunan perlu terus menjadi ciri dalam proses pembangunan bangsa. Dimensi-dimensi pembangunan ekonomi berkelanjutan antara lain: (1) pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial; (2) pembangunan yang menghargai keanekaragaman; (3) pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif; dan (4) pembangunan yang menuntut perspektif jangka panjang.	AHMAD HANAFI RAIS, S.P., MPP

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
202	29 Januari 2019	KAB. REMBANG JATENG III	IPNU, IPPNU, dan IPM Cabang Lasem	Langkah-langkah strategis yang diperlukan supaya pesantren dan pemuda berperan dalam menjaga konstitusi NKRI, yaitu: (1) pada kebijakan makro nasional, regional, dan global diperlukan rekonstruksi instrumen hukum yang adil, fair, dan transparan atas tindakan kekerasan, khususnya menyangkut kelompok masif agama, dimana tekanan global atas gerakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok jaringan muslim hendaknya tidak menyudutkan masyarakat muslim secara luas; dan (2) diperlukan pendidikan alternatif bagi pelajar dan komunitas pesantren dalam mengembangkan nilai pluralitas.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
203	29 Januari 2019	KAB. REMBANG JATENG III	Aktivis Pendidikan Ma'arif NU Lasem	Pelaksanaan demokrasi perlu semakin dikuatkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan demokrasi semakin ditentukan oleh 'kekuatan uang' sehingga demokrasi dalam pengertian kedaulatan rakyat semakin tereliminasi. Rakyat semakin menjadi 'pembeli demokrasi' dalam 'pasar pemilihan' sehingga pemimpin yang lahir lebih didominasi para pemilik modal tanpa mempertimbangkan akhlak dan perulaku sosial serta komitmen kebangsaannya.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
204	30 Januari 2019	KAB. REMBANG JATENG III	Aktivis Pendidikan SMK Avicena Lasem Rembang	Nilai sebuah ideologi dapat diterapkan di kehidupan masyarakat dengan memahami bahwa ideologi terutama Pancasila bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif, dalam arti mampu mengadaptasi perubahan sesuai dengan aspirasi bangsa. Selain masyarakat yang perlu terus mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, MPR juga memiliki tugas untuk mengawal ideologi tersebut.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
205	31 Januari 2019	SUMUT II	Pengurus dan Warga Kelurahan Sitinjak, Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan	Prinsip dan asas beberapa UU (UU BUMN dll) yang disahkan di DPR tidak konsisten dan koheren dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu dilakukan evaluasi dan penataan sistim Peraturan Perundang-Undangan.	H. RAMBE KAMARUL ZAMAN
206	31 Januari 2019	Sambungmacan, Sragen, JATENG IV	Tokoh Agama dan Masyarakat Se-Kecamatan Sambungmacan	Bangsa Indonesia perlu menghilangkan "*apriori primordial*", guna menghilangkan rasa emosi dan kesadaran membangun kerukunan umat beragama.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
207	31 Januari 2019	KEC. GUNUNG LABUHAN KAB. WAY KANAN LAMPUNG	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Perempuan Kec. Gunung Labuhan	Masyarakat berharap kesejahteraan dapat lebih ditingkatkan, terutama terkait pelayanan kesehatan BPJS dan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk.	IR. MARWAN CIK ASAN, MM
208	2 Februari 2019	KAB. BANGGAI KEPULAUAN SULAWESI TENGAH	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Perempuan di Kab. Banggai Kepulauan	Sosialisasi dialog antar agama perlu terus dilakukan sebagai benteng pertahanan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai aliran sesat.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
209	5 Februari 2019	DESA TEUPIN KEC. LHOKSUKON KAB. ACEH UTARA ACEH	Masyarakat Desa Teupin	Penguatan jati diri dan karakter bangsa membutuhkan gerakan nasional yang diikuti oleh seluruh anggota masyarakat secara berkesinambungan yang disertai dengan komitmen yang tinggi. Jati diri dan karakter bangsa tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi pada taraf wacana, melainkan tercermin dari perilaku seluruh elemen masyarakat.	MUSLIM, SHI., MM.
210	5 Februari 2019	Jabar XI	Tokoh Masyarakat Cisewu	Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai identitas dan jati diri. Pancasila tersebut turut membentuk cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun saat ini, keadilan dianggap belum merata. Hal ini bukan dikarenakan pemerintah tidak mengusahakannya, namun karena banyak faktor. Salah satunya adalah keterbatasan yang perlu dibenahi, termasuk penegakan hukum yang juga masih dianggap belum adil dan menyeluruh.	AHMAD ZACKY SIRADJ
211	6 Februari 2019	Desa Blukat Tebai Bireun, ACEH		Kualitas nilai Pancasila sebagai suatu ideologi tidak perlu diragukan. Agar tetap mengakar dalam kehidupan, maka: (a) ideologi tersebut harus difahami, dan bagaimana sikap dan perilaku masyararakat terhadapnya; (b) terdapat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan ideologi tersebut tanpa menghilangkan jatidiri ideologi dimaksud, dan; (c) seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu membudaya dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara masih memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan, memantapkan, memapankan, dan mengokohkan Pancasila. Untuk itu perlu adanya	MUSLIM, SHI., MM.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				usaha secara serius, dengan jalan mengimplementasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	
212	7 Februari 2019	Gampong Menasah Masjid, Lhokseumawe, ACEH	Masyarakat Gampong Menasah Masjid, Lhokseumawe	Menurut Paula Freire, perubahan selalu dimulai dari sebuah kata, namun kata yang baik dan efektif itu haruslah mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu: refleksi dan aksi. Untuk itu ditawarkan konsep praksis (*praxis*) sebagai gabungan keduanya dalam satu kata (*word*). Karena itu menurutnya, revolusi hanya dapat dilakukan bukan dengan kata-kata yang verbalis maupun aktivistis melainkan kata-kata yang mengandung aksi (praksis).	MUSLIM, SHI., MM.
213	9 FEBRUARI 2019	ACEH	Dpw Pks Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	Pembagian kekuasaan penyelenggara negara di Indonesia berdasarkan 3 cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif (presiden dan wakilnya), legislatif (DPR,DPD,MPR) serta kekuasaan yudikatif (MA,MK,KY). Dengan tiga cabang kekuasaan tersebut idealnya dapat menciptakan prinsip *check and balances* sehingga dapat membentuk ketatanegaraan demi mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
214	9 FEBRUARI 2019	LUENG BATA, KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH	DPD PKS Kota Banda Aceh	Penggunaan Internet sehat perlu ditanamkan semenjak dini melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat agar menghindari kebiasaan jelek di dunia nyata akan terbawa di dunia maya dan tidak menimbulkan efek negatif di masyarakat	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
215	10 Februari 2019	Kota Tentena, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah	Pimpinan, Yayasan, Dosen dan Mahasiswa UNKRIT di Kabupaten Poso	Pendidikan di Indonesia, perlu terus di tingkatkan dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dari tingkat pra Taman	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi	
216	10 Februari 2019	NTT I	Seminari Lela	Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah sangat penting sebagai upaya pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan dasar. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa dan daerah.	DR. ANDREAS HUGO PAREIRA
217	10 FEBRUARI 2019	SULSEL	Tokoh Masyarakat di Desa Ciromanie Sulawesi Selatan	Seiring berjalannya waktu dan Indonesia mengalami berbagai sistem pemerintahan saat ini, Indonesia yakin bahwa Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial dirasa masih cocok untuk diterapkan, akan tetapi kenyataannya dalam UUD 1945 merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem parlementer, sehingga para ahli menyatakan bahwa Indonesia cenderung merupakan sistem quasi presidensial (presidensial semu). organ negara di Indonesia pada masa reformasi mengalami pergeseran, dari yang semula menganut sistem pembagian kekuasaan, bergeser kearah *Distribution of power*.	SYAMSUL BACHRI S, MSC
218	10 Februari 2019	Kab. Temanggung	Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) Kab.Tegal	Perlunya GBHN atau model lain yang maknanya seperti GBHN untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi berasaskan kekeluargaan.Tahapan pelaksanaan dan sasaran akhir lebih jelas difahami untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat khususnya di daerah, untuk menopang keberhasilan pembangunan perekonomian nasional.	Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
219	11 Februari 2019	Kab. Purworejo	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pekalongan	Penguatan MPR dengan Pemberian kewenangan untuk membentuk ketetapan, bisa dibarengi dengan penguatan DPD sebagai bagian yang tak terpisahkan dari MPR, dan menyempurnakan posisi MPR sebagai gabungan dari DPR, lembaga perwakilan dibidang politik, dengan DPD yang	Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				merupakan perwakilan dari segi teritorial atau kewilayahan.	
220	11 Februari 2019	DESA LEGO KEC. BOAWAE NTT I	Masyarakat Kampung Lego	Pancasila sebagai dasar negara mendapat tantangan bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, melalui gerakan bersenjata maupun pergulatan di lembaga-lembaga yang secara konstitusional dibentuk oleh negara. Salah satu solusinya adalah Pancasila bukan hanya harus dijiwai saja, tetapi juga harus tercermin dalam setiap peraturan hukum di Indonesia.	DR. ANDREAS HUGO PAREIRA
221	11 Februari 2019	Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah	Pimpinan dan Anggota Jemaat Gereja Protestan Indonesia Banggai Kepulauan (GPIBK) Kab. Banggai	Negara perlu memberikan upaya perbaikan dalam menyikapi kondisi saat ini yaitu semakin maraknya kekerasan yang kadangkala mengatasnamakan agama, namun justru bertentangan dengan nilai luhur agama itu sendiri serta semakin maraknya tingkat kriminalitas yang di lakukan remaja.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
222	11 Februari 2019	ASAHAN SUMATERA UTARA	Masyarakat Asahan	Dalam konteks pembangunan nasional, pendekatan yang dianggap dapat memperkuat ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan adalah wacana menghidupkan kembali GBHN. Pendekatan GBHN dianggap dapat menjadi payung ke-Indonesiaan dan koridor ketatanegaraan dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.	MARTIN HUTABARAT, SH.
223	11 Februari 2019	SUMATERA UTARA	Masyarakat Kisaran, Sumatera Utara	GBHN penting untuk dihidupkan kembali karena proses penyusunannya dapat melibatkan semua elemen masyarakat Indonesia. Selain itu, GBHN mempunya kekuatan hukum yang mengikat seluruh lembaga negara, dan karenanya seluruh lembaga negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai kewenangannya. Selain itu, muatan GBHN haruslah penjabaran dari seluruh sektor pembangunan yang mencerminkan kedaulatan di segala bidang berdasarkan Pancasila.	MARTIN HUTABARAT, SH.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
224	11 Februari 2019	Kota Tasikmalaya	Yayasan Riyadlul Hidayah (Aulah Sekolah Riyadlul Hidayah) Kec. Bunggur Sari Kota Tasikmalaya, Garut, Jabar ; Peserta (Para Guru dan Siswa).	Meningkatnya kasus kekerasan atas nama agama, perusakan fasilitas Ibadah dan pelarangan serta pembatasan aktifitas ibadah telah meresahkan warga serta merusak hubungan antar agama dan keyakinan di Indonesia. Oleh karena itu, diminta kepada anggota MPR untuk mengevaluasi kembali kebijakan (dalam bidang keagamaan) yang diskriminatif dan atau merugikan kelompok agama dan kepercayaan lainnya serta melindungi hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA
225	11 Februari 2019	JATIM	Majelis Wakil Cabang Nu Kec.Patianrowo, Kab. Nganjuk	Hasil amandemen UUD 1945 harus diamandemen ulang (kembali ke khittah Indonesia 1945) karena tidak sesuai dengan Muktamar NU 1984 di Situbondo bahwa NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final perjuangan bangsa Indonesia.	Drs. H.A. Budiono, M.Ed.
226	12 Februari 2019	KALBAR	DPW Nasdem	Secara luas makna Pancasila sebagai ideologi ini merupakan sebuah visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemaunisaan, persatuan, kerakyatan dan kedailan. Selain itu, Pancasila juga bisa digunakan sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Tindakan yang menentang Pancasila sebagai dasar negara harus mendapat sanksi hukum	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH
227	12 Februari 2019	Kota Tasikmalaya	Yayasan Karya Insan Berkah (Aula Sekolah Yayasan KIP) Kota Tasikmalaya, Jabar, Peserta, Para Guru dan Siswa	Mengakar dan meluasnya ideologi radikal di luar Ideologi Pancasila yang berpotensi memecah belah integrasi sosial politik perlu dicegah. Oleh karena itu, diminta untuk mempertegas dan membatasi setiap upaya penyebaran ideologi radikal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diminta pro aktif menegaskan dan membumikan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
228	12 Februari 2019	DESA SARASEDU KEC. GOLEWA NTT I	Masyarakat Desa Sarasedu	Sosialisasi 4 pilar perlu dilaksanakan dengan strategi khusus untuk mengantisipasi situasi bangsa yang saat ini rawan terhadap perpecahan SARA. Ancaman dari kelompok radikal, kepentingan pemilik modal, dan orang-orang pragmatis yang banyak disebar melalui media sosial yang bertujuan merusak kebangsaan dan kebhinekaan tampak semakin tidak terbendung dan sampai ke daerah. Oleh karena itu, metode penyampaian materi dapat dikemas dalam berbagai bentuk sesuai kearifan lokal daerah masing-masing sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi.	DR. ANDREAS HUGO PAREIRA
229	12 FEBRUARI 2019	KEC. BLAMBANGAN PAGAR KAB. LAMPUNG UTARA LAMPUNG	Tokoh Masyarakat Kec. Blambangan Pagar	Masyarakat berharap anggota legislatif yang mewakili daerahnya dapat melakukan terobosan agar tercipta parlemen yang bersih, beintegritas, bebas korupsi, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, diharapkan anggota terpilih juga dapat memiliki kiat dan strategi untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah Blambangan Pagar.	IR. MARWAN CIK ASAN, MM
230	12 Februari 2019	Desa Kaplongan, Kecamatan Karanganpel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Yayasan Darul Ma'arif Indramayu	Pengamalan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia tak terlepas dari upaya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sifat Nasionalisme dan Patriotisme adalah kunci untuk mempersatukan seluruh kalangan masyarakat Indonesia	DEDI WAHIDI
231	12 Februari 2019	TASIKMALAYA	Dpd Pks Kota Tasikmalaya	UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dan sumber hukum tertinggi dengan muaranya adalah Pancasila. Konstitusi bagi kehidupan bernegara berfungsi memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.
232	12 Februari 2019	Kab Seram Bagian Barat, Desa Kamariang, Ambon	Amgpm Kamariang Kab Sbb	Dalam menangkal aksi-aksi radikalisme yang terjadi di masyarakat haruslah melakukan penguatan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu penguatan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sehingga tidak ada paham apapun yg masuk ke negara kita	NOVITA ANAKOTTA, S.H.,M.H

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
233	13 Februari 2019	KAB. NGANJUK JATIM	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Nganjuk	Terdapat beberapa pemikiran berkembang terkait wacana UUD NRI Tahun 1945, yaitu: (1) pemikiran yang setuju kembali ke UUD 1945 dengan varian tanpa ada kompromi, dengan sedikit penyempurnaan dan amandemen 1 hingga 4 dianggap tidak ada; dan (2) melanjutkan amandemen ke-5, tinggal perbaikan pelaksanaan saja yang perlu dilakukan.	Drs. H.A. Budiono, M.Ed.
234	14 Februari 2019	Kab. Kebumen	Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)	Pendidikan di Indonesia perlu dibuat semacam GBHN yang mengatur road map pendidikan Indonesia dimasa mendatang. Perlu dilakukan upaya dan strategi inovasi dalam sistem pendidikan yang hendaknya diletakkkan dalam GBHN.	Dr. BAMBANG SADONO, S.H., MH
235	14 Februari 2019	Jakarta Timur	Aula Serbaguna UIA, Peserta, Dosen, Mahasiswa, Masyarakat Umum, dan Organisasi Kemasyarakatan (Universitas Islam As-Syafi'iyah)	Dalam penyelenggaraan Pemilu terutama Pilkada, sebagian penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) dalam menjalankan tugasnya tidak netral, mandiri dan idependen dan serta melanggar asas dan prinsip Pemilu. Ketidaknetralan ini terjadi karena dalam proses penyeleksiannya tidak transparan dan mudah diintervensi oleh penguasa untuk meloloskan calonnya karena itu diperlukan mengevaluasi dan menata ulang tata cara penyeleksian penyelenggara Pemilu.	
236	14 Februari 2019	JATICEMPAKA KEC. PONDOK GEDE KOTA BEKASI	Dosen, Mahasiswa, Masyarakat Umum, dan Organisasi Kemasyarakatan (Universitas Islam As-Syafi'iyah)	Untuk menjaga jarak antara demokrasi dan korupsi, pembatasan akses para pelaku alias koruptor kembali ke alam demokrasi menjadi sebuah pilihan yang menarik. di satu sisi, pembatasan dapat menjaga demokrasi tetap steril, di sisi lain juga diharapkan mampu memunculkan kejeraan bagi si pelaku. Perlu dijaga keteguhan serta keselarasan ritme penegakan hukum kasus korupsi di semua lini, diawali dengan jaksa KPK yang secara konsisten memasukkan pencabutan hak politik dalam tuntutannya, dan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi menghasilkan vonis yang senafas.	

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
237	15 Februari 2019	KARO SUMATERA UTARA	Masyarakat Karo	Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia serta bersumber dari pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, ideologi Pancasila milik semua rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, rakyat Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	MARTIN HUTABARAT, SH.
238	15 Februari 2019	DAIRI SUMATERA UTARA	Masyarakat Dairi	Walaupun selama era reformasi keberagaman mengalami banyak masalah, tetapi lambat laun terlihat semakin minimal. Harus diakui tidak mudah mengelola keberagaman dan perbedaan, apalagi dengan kompleksitas keberagaman Indonesia. Akan tetapi, Pancasila berhasil menjawab persoalan pokok tersebut, yakni memberikan identitas bersama dalam kemajemukan yang sangat komplek.	MARTIN HUTABARAT, SH.
239	17 FEBRUARI 2019	SULSEL	Tokoh Masyarakat di Desa Ciromanie Sulawesi Selatan	Seiring berjalannya waktu dan Indonesia mengalami berbagai sistem pemerinthan saat ini, Indonesia yakin bahwa Negara Kesatuan yang bebentuk Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial dirasa masih cocok untuk diterapkan, akan tetapi kenyataannya dalam UUD 1945 merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem parlementer, sehingga para ahli menyatakan bahwa Indonesia cenderung merupakan sistem kuasi presidensial (presidensial semu). organ negara di Indonesia pada masa reformasi mengalami pergeseran, dari yang semula menganut sistem pembagian kekuasaan, bergeser kearah *Distribution of power.*	SYAMSUL BACHRI S, MSC

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
240	21 FEBRUARI 2019	KEC. MUNGKID KAB. MAGELANG JAWA TENGAH	Forum Guru Muhammadiyah Kab. Magelang	Pembangunan ekonomi berkelanjutan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut: (1) terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jas menjadi perekat ketahanan ekonomi; (2) pendatan perkapita dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5%; dan (3) kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.	AHMAD HANAFI RAIS, S.P., MPP
241	25 Februari 2019	Kab. Tasikmalaya	Yayasan Al- Hilal Tanjungjaya, (Aula SMK Tanjungjaya) Kota Tasikmalaya, Jabar, Peserta, Para Guru dan Siswa	Pemerintah berkewajiban melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan menghukum para pelaku kekerasan karena itu diminta kepada pemerintah dan anggota DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan produk hulum lainnya yang bertujuan untuk melindungi Perempuan dan Anak dari kekerasan.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA
242	26 Februari 2019	Kab. Tasikmalaya	Yayasan Gunapansirna, (Aula Gunapansirna) Kota Tasikmalaya, Jabar, Peserta, Para Guru dan Siswa	Agar Pemerintah mengevaluasi kembali penyaluran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan data penerima KIP karena penerapannya tak sesuai dengan sasarannya. Selain itu perlu ada sosialisasi mekanisme dan kriteria penerima (pelajar dan mahasiswa) KIP.	SITI MUFATTAHAH, P.S., MBA
243	27 FEBRUARI 2019	KAB. SUMBAWA NTB	Akademisi dan Mahasiswa Universitas Samawa, Sumbawa Besar	Kontradiktif kedudukan MPR sebagai lembaga permusyawaratan karena anggota hanya terdiri dari unsur wakil rakyat terpilih melalui mekanisme politik formal, tokoh masyarakat melalui mekanisme kearifan lokal tidak terwadahi. Perlu dipikirkan juga penyesuaian wewenang MPR sebagai *consultative assembly* menjadi *joint session*.	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD
244	27 Februari 2019	LAMPUNG I	Lampung I	Pancasila haruslah menjadi pijakan dan membantu untuk mewujudkan tujuan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan seluruh masyarakat.	ZULKIFLI HASAN

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
245	28 Februari 2019	LAMPUNG I	Lampung I	Kedudukan MPR telah sama dengan lembaga negara lain, sehingga dalam sistem ketatanegaran tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi dari yang lain. MPR tetap memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar.	ZULKIFLI HASAN
246	28 Februari 2019	Penajam Paser Utara KALTIM	KPPI Kaltim	Mazhab Historis sudah mengajarkan bahwa suatu negara tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya dan belajar dari pengalaman itu. Dalam kajian ketatanegaraan, generasi muda tidak perlu terjebak dalam sentimen politik Orde Lama, Orde Baru atau asal tampil beda. Kita pahami dan tarik pelajaran sejarah masa lalu dan sisi-sisi yang baik kita pertahankan. Sisi buruk harus dikoreksi dan sisi baiknya harus diadopsi.	KASRIYAH
247	1 Maret 2019	LUWU SULAWESI SELATAN	Lembaga Iseh, Kab. Luwu	Perlu dipikirkan penggunaan kembali GBHN dan penguatan peran MPR guna menjaga stabilitas program pembangunan, tanpa berbenturan dengan visi misi Presiden terpilih. Hal yang dapat ditempuh adalah dengan membuka peluang untuk dilakukan kembali amandemen UUD.	AMRAN, SE
248	1 Maret 2019	Berau, KALTIM	Masyarakat Berau, Kutai Timur, Kaltim	Harmonisasi perundang-undangan: Harmonisasi Vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi Horisontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijk regelgeving*).	KASRIYAH

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
249	1 Maret 2019	LAMPUNG I	Lampung I	Dampak dari era demokrasi yang menjurus kepada tuntutan sebuah kebebasan yang berlebihan tanpa diimbangi atau diiringi dengan pengetahuan tentang prinsip demokrasi yang memadai, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan masyarakat luas dan sering berkembang menjadi ketegangan antar kelompok yang ada dalam masyarakat. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam "empat pilar" kehidupan berbangsa dan bernegara inilah yang menjadi pengokoh tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.	ZULKIFLI HASAN
250	2 Maret 2019	LAMPUNG I	Lampung I	Perbuatan "penyebaran kebencian" atau biasa yang dikenal *hate speech*, memang tidak terkait langsung dengan kegiatan mengganti ideologi negara, namun tidak dipungkiri terkait dengan masalah *national security*. KUHP sudah mengaturnya, namun perlu diperkuat dan diperluas cakupannya. Perlunya pengaturan yang lebih jelas dan tepat mengenai aktifitas-aktifitas publik masyrakat, seperti berorganisasi, berkumpul dan berekspresi.	ZULKIFLI HASAN
251	2 Maret 2019	Sangatta, Kutai Timur, KALTIM	Masyarakat Sangatta, Kutai Timur, Kaltim	Wacana untuk menggunakan kembali GBHN seiring upaya menguatkan peran MPR, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut; *pertama*, harus diatur secara jelas siapa yang berwenang membuatnya. *Kedua*, dalam bentuk hukum apa GBHN dituangkan. *Ketiga*, jika menggunakan GBHN akan ada pertanggungjawaban Presiden kepada MPR maka akan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang selama ini dianut. Ada baiknya jika menggunakan GBHN sebab jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan dan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai amanat konstitusi, maka Presiden dan Wakil Presiden "pilihan MPR" dapat melanjutkan program pembangunan yang bersumber dari GBHN tanpa adanya benturan visi dan misi. untuk itu, pengaturannya harus dikembalikan ke UUD NRI 1945, amandemen ulang merupakan keniscayaan.	KASRIYAH

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
252	2 Maret 2019	Luwu	Lembaga Masyarakat Pesisir	Keanekaragaman bangsa harus didudukan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman harus dinilai sebagai aset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralitas ini merupakan *Sunnatullah*. Dalam menegakkan pluralitas, hendaknya selalu mengacu pada prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945, bahwa yang diutamakan adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan individu.	AMRAN, SE
253	2 Maret 2019	Sragen, JATENG IV, JATENG IV	Masyarakat Sragen	Reformasi telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan perubahan sistem politik dan ketatanegaraan dalam bentuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan hingga 4 (empat) kali amandemen.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
254	2 Maret 2019	Jumapolo, Karanganyar, JATENG IV	Aktivis Perempuan	Partisipasi wanita dalam pembangunan partisipatif masih belum maksimal karena masih terkendala seperti kebiasaan, kesiapan, dan kesediaan melibatkan diri dalam proses pembangunan partisipatif.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
255	2 Maret 2019	Kab Pemalang, Jateng	Paguyuban Masyarakat Kec Bodeh	Indonesia masuk sebagai salah satu negara berpenduduk besar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yg cukup tinggi. Tantangan saat ini adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, membangun birokrasi yang bersih dan kompeten, menggeser sumber daya saing dari kelimpahan faktor produksi ke daya tarik investasi dan inovasi serta membangun modal sosial yang kuat dan tahan dari rongrongan berbasis SARA sesuai Pancasila.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
256	2 Maret 2019	Desa Kaplongan, Kecamatan Karanganpel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Lembaga Pendidikan Ma'arif SMA NU Kaplongan	Perlu upaya terus menerus untuk mewujudkan dan memperkuat serta mempertahankan keragaman bangsa Indonesia dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air.	DEDI WAHIDI
257	2 MARET 2019	BANTEN	Forum Lintas Pemuda Tangerang Raya	Pelaksanaan pemilu serentak merupakan upaya untuk membangun sistem demokrasi yang efektif. Dalam jangka panjang, pemilu serentak juga dapat menguatkan sistem presidensial karena kemenangan calon presiden cenderung diikuti perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya.	Drs. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
258	3 Maret 2019	LAMPUNG I	Lampung I	Sejak dicabutnya TAP MPR Nomor II/ MPR/1978, sebenarnya kita mengalami masa kekosongan konsepsional mengenai pengembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sampai saat ini, belum ada peraturan perundangan yang menjelaskan isi, makna atau kandungan Pancasila. Kekosongan ini menyebabkan tafsir Pancasila hanya sebatas pada UUD 1945 dan hasil-hasil amandemennya. Pokok-pokok pikiran dalam amandemen UUD 1945 dan TAP MPR sebenarnya sudah jelas, namun pokok-pokok pikiran tersebut menjadi sirna tatkala memasuki wilayah UU. sejauh ini belum ada upaya serius untuk mensosialisasikan Pancasila.	ZULKIFLI HASAN
259	3 Maret 2019	Balikpapan Utara, Balikpapan, KALTIM	Masyarakat Balikpapan Utara, Balikpapan, Kaltim	Reformulasi perencanaan pembangunan nasional yang tepat saat ini adalah mengembalikan kembali GBHN. Wacana menghidupkan kembali GBHN oleh MPR semata-mata hanya untuk memberikan pedoman pembenagunan nasional agar menjadi lebih terarah dan konsisten, namun tetap berpegang teguh pada kerangka sistem presidensial di Indonesia. Artinya, bagaimanapun nanti kedudukan GBHN yang baru tidak menimbulkan pengaruh terhadap kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara seperti di masa UUD Tahun 1945 sebelum perubahan, dan tidak mempengaruhi pertanggungjawaban politik Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR. Hal ini dikarenakan bahwa hierarki norma hukum tidak selalu berkorelasi dengan hierarki organ negara. karena kalau seperti itu, tentunya sistem presidensial Indonesia menjadi lemah. Dengan TAP MPR yang berkedudukan di atas Undang-undang,GBHN yang baru nanti harus menjadi acuan dalam pembentukan dokumen perencanaan pembangunan di bawahnya.	KASRIYAH
260	3 Maret 2019	Desa Kaplongan, Kecamatan Karanganpel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Lembaga Pendidikan Ma'arif SMK NU Kaplongan	Perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum di Indonesia, agar masyarakat mengerti bahwa hukum adalah panglima dalam menyelesaikan masalah-masalah	DEDI WAHIDI

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.	
261	3 Maret 2019	CIANJUR	DPC Gerindra Kabupaten Cianjur	Dalam mendayagunakan Iptek diperlukan nilai-nilai; *Accountable:* penerapan Iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak politis; *Visionary:* pembangunan Iptek memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi taktis di masa kini, tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberi implikasi terbatas; *Innovative:* Nilai luhur pembangunan Iptek adalah berorientasi pada segala sesuatu yang baru; *Excellence:* keseluruhan tahapan pembangunan Iptek mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, implikasi pada bangsa harus baik, yang terbaik atau berusaha menuju yang terbaik.	AHMAD RIZA PATRIA
262	4 Maret 2019	DESA PEKON SIDOHARJO KEC. PRINGSEWU LAMPUNG	Pemerintah dan Masyarakat Pekon Sidoharjo, Kec. Pringsewu	Melalui saluran-saluran komunikasi yang dimiliki, anggota MPR hendaknya mampu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk dapat menjaga situasi dan kondisi sosial politik Negara kita agar tetap kondusif untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persaingan dalam Pemilu tidak perlu menjadi permusuhan yang dapat merusak hubungan persaudaraan sebangsa.	ENDRO S. YAHMAN
263	5 Maret 2019	Kab. Mamasa	Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Langkea	MPR adalah lembaga politik yang pasti mengakomodir usulan dari berbagai pihak tetapi keputusannya sangat politis. hak kita sebagai rakyat adalah mengevaluasi mereka setiap lima Tahun, apakah layak untuk terus menerima mandat dari kita sebagai rakyat yang berdaulat.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th
264	5 Maret 2019	Kab. Mamasa	Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Toraja Mamasa Jemaat Salu Kepopo	Dalam UUD 1945 sebelum di amandemen terdapat pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir sebab terlalu "luwes" dan "fleksibel". Salah satu pasal yang bisa multitafsir adalah pasal 7 tentang Presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, setuju apabila masa jabatan dibatasi hanya 2 (dua) kali masa jabatan.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
265	5 Maret 2019	CIANJUR	DPC Gerindra Kabupaten Cianjur	Pemerintah perlu menyusun peraturan atau konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Inovasi perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kerja sama di luar lingkup pemerintah perlu dijalin dengan menggandeng ABG (*Academician Businessmen Government*), misal dengan menggunakan sistem insentif, antara lain lewat keringanan pajak.	AHMAD RIZA PATRIA
266	6 Maret 2019	CIANJUR	DPC Gerindra Kabupaten Cianjur	Pemerintah perlu menyusun peraturan atau konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Inovasi perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kerja sama di luar lingkup pemerintah perlu dijalin dengan menggandeng ABG (Academician Businessmen Government), misal dengan menggunakan sistem insentif, antara lain lewat keringanan pajak.	AHMAD RIZA PATRIA
267	10 Maret 2019	KAB. BANDUNG	DPD PKS Kabupaten Bandung	Pancasila sebagai dasar negara menjiwai pembentukan pembukaan pasal-pasal dari UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai konstitusi tertulis, UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi. Produk-produk hukum seperti ketetapan MPR, Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang muaranya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.
268	11 Maret 2019	KECAMATAN BALEENDAH. KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT	DPD PKS Kabupaten Bandung	Peranan Konstitusi bagi kehidupan negara untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan Pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
269	12 Maret 2019	KALBAR	Pengurus RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat	Realitas Rakyat Indonesia yang beragam suku, agama dan ras telah bersepakat untuk membentuk Negara Bangsa Indonesia dan bersepakat pula untuk hidup bersama dengan semangat persaudaraan dan kesetaraan. Namun demikian, semangat kebersamaan itu mulai terkikis seiring politisasi identitas demi kepentingan politik pragmatis. Untuk menghindari keterpecahan antar warga berbasis identitas, kami mengusulkan kepada MPR untuk merancang sistem Pemilu yang membatasi politisasi identitas (mengatur tata cara kampanye dan pembatasan isu SARA dalam kampanye serta mengatur sanksi yang tegas kepada para pihak yang memprovokasi dan memecah belah warga dengan isu SARA. Selain itu, kami juga meminta kepada anggota MPR untuk pro aktif memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai perekat Bangsa kepada masyarakat.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH
270	12 Maret 2019	JATENG I	Pemerintah Desa Ngampel Kulon, Kab. Kendal	Ekonomi pembangunan merupakan proses solutif guna membentuk sistem ekonomi yang stabil dengan pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Interaksi antar wilayah perlu didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan yang kokoh, serta peningkatan produktivitas melalui inovasi IPTEK, kelembagaan ekonomi, dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.	Drs. FADHOLI
271	13 Maret 2019	Kota Kendal, Propinsi Jawa Tengah	Pendidik dan Anak Didik SMU NU 1 Kendal	Masyarakat masih mengeluhkan kondisi pendidikan di Indonesia, antara lain biaya pendidikan yang dirasa sangat memberatkan dan model pendidikan yang sangat sulit untuk diikuti. Hal ini menyebabkan daya saing bagi sekolah yang memiliki tingkat pengajaran untuk anak didiknya masih belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.	MUJIB ROHMAT

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
272	13 Maret 2019	Enrekang	Lembaga PKBM Banne Padang	Perlu dipahami secara memadai makna Empat Pilar, Sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif, dan bijaksana terhadap Empat Pilar dimaksud, dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara singkat perlu disampaikan makna arti Pilar Pancasila, Pilar UUD 1945, Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pilar Bhineka Tunggal Ika yang dilukiskan secara indah dan nyata dalam lambang negara Garuda Pancasila.	AMRAN, SE
273	14 Maret 2019	KAB. NGANJUK JATIM	Kelompok Kerja Guru (KKG) Penjaskes Olahraga SD Se-Kabupaten Nganjuk	Salah satu masalah mutu pendidikan di Indonesia adalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan para guru yang masih membutuhkan perhatian lebih serius oleh pemerintah. Kondisi di Nganjuk sendiri, rata-rata lembaga pendidikan di jenjang SD masih kekurangan guru berstatus pegawai negeri, sehingga tingkat rasionya tidak seimbang.	Drs. H.A. Budiono, M.Ed.
274	14 Maret 2019	Enrekang	PKBM Tunas Bangsa	Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia selalu mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain.	AMRAN, SE
275	14 Maret 2019	Jabar XI	Terdiri Dari Berbagai Unsur Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Kec. Kersamanah Kab, Garut	Adat sunda mengenal rasa silih asah, silih asih, dan silih asuh, yang dipahami bahwa merawat kebhinekaan maka merawat Negara juga. Masyarakat sebaiknya tidak saling menghujat dan mencela kelompok atau golongan yang berbeda. Terkhusus untuk umat Islam, jika dicermati pada sebagian perumus Pancasila pada sidang BPUPKI merupakan ulama, sehingga sila-sila Pancasila begitu selaras denga nilai-nilai ajaran Islam dan menjadi penting untuk terus dihayati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	AHMAD ZACKY SIRADJ

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
276	14 Maret 2019	Kota Kendal, Propinsi Jawa Tengah	Pendidik dan Anak Didik SMU NU 02 Rowosari, Kabupaten Kendal	Masyarakat masih mengeluhkan kondisi pendidikan di Indonesia, antara lain biaya pendidikan yang dirasa sangat memberatkan dan model pendidikan yang sangat sulit untuk diikuti. Hal ini menyebabkan daya saing bagi sekolah yang memiliki tingkat pengajaran untuk anak didiknya masih belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.	MUJIB ROHMAT
277	14 Maret 2019	Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah, Kabupaten Semarang	Masyarakat merasa pendidikan pesantren masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Masyarakat berharap pendidikan pesantren bisa disejajarkan dengan pendidikan umum serta bisa mendapatkan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.	MUJIB ROHMAT
278	14 Maret 2019	KEL. TALISE KEC. MANTIKULORE SULTENG	Warga dan Tokoh Masyarakat Kel. Talise, Kec. Mantikulore	Negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama warganya, namun sesama warga wajib memegang prinsip hormat terhadap kemerdekaan beragama, yaitu mengimani Tuhan dan memeluk nilai-nilai kemanusiaan. Untuk pemantapan kehidupan beragama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat membina dan diteladani. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas kehidupan umat beragama melalui kebijakan dan sebagai penengah apabila terjadi pertentangan antar pemeluk agama.	SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.
279	14-15 Maret 2019	KALTIM	Majelis Ta'lim Al-Mubaraq Lembah Permai, Kota Bontang	Perubahan dinamika masyarakat dan bangsa menuntut penyesuaian atas segala sendi hukum dan politik Negara Indonesia, termasuk adaptasi UUD 1945. Amandemen ke-5 UUD merupakan suatu hal yang mendesak untuk segera dilakukan dalam rezim reformasi guna mengakomodasi transformasi struktural sistem dan bangunan ketatanegaraan, demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.	Dr. H. MAHYUDIN, ST., MM.
280	15 Maret 2019	Enrekang	PKBM Salu Bulo	Konflik Sosial Budaya sering terjadi karena kemajemukan Suku, Budaya, dan Agama yang tidak teratasi dengan baik dan adil sehingga diperlukan Pilar yang mampu memahami dan mempersatukan kemajemukan bangsa secara baik dan adil untuk mewujudkan toleransi, kerukunan sosial,	AMRAN, SE

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kebersamaan, dan kesetaraan Bangsa.	
281	15 Maret 2019	SULTENG	Masyarakat Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Peserta, Toko Masyarakat, Agama, Perempuan dan Pemuda	Arah dan kebijakan ekonomi nasional yang bercorak liberal telah mengabaikan asas dan prinsip ekonomi Pancasila sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, masyarakat mengusulkan untuk menegaskan dan menghidupkan kembali Ekonomi Pancasila di Indonesia.	SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.
282	15 Maret 2019	SULTENG	Masyarakat Kelurahan Ujana, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Peserta, Pengurus RT, RW, Toko Masyarakat, Agama, Perempuan dan Pemuda	Pemerintah dengan dukungan MPR terus meningkatkan program membumikan dan memasyaratkan Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal Ika). Hal ini dilakukan dengan harapan rakyat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara tersebut dan menolak ideologi lain yang dapat mengancam Persatuan dan Kesatuan Indonesia.	SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.
283	15 Maret 2019	KOTA SALATIGA JATENG I	Akademisi (Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW)	Pokok-pokok pikiran haluan negara perlu mencantumkan desain arah pembangunan hukum, salah satunya adalah sistem peraturan perundang-undangan yang terencana dan terpadu dengan pembangunan nasional. Adapun pra-syarat dalam pembangunan materi hukum nasional yaitu: 1) dasar atau landasan pembangunan materi hukum adalah 4 pilar; 2) orientasi pembangunan materi hukum adalah Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*); dan 3) tujuan pembangunan hukum adalah terwujudnya keadilan sosial, penghargaan akan kemanusiaan, terwujudnya kesejahteraan umum, dan terjaminnya kepastian hukum. Selain itu, pembangunan hukum juga perlu melakukan adaptasi dengan kondisi terkini, salah satunya adalah perlu dibuka ruang bagi transplantasi hukum modern, hukum adat, dan hukum agama ke dalam hukum nasional, sejauh tidak mengusik eksistensi hukum nasional yang berorientasi Pancasila dan berwawasan Nusantara.	MUJIB ROHMAT

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
284	16 Maret 2019	DKI JAKARTA	DPRA PKS Bangka	Sistem pemerintahan Indonesia cenderung pada presidensial. Namun, sedikit banyak ada unsur sistem pemerintahan parlementer yang digunakan di Indonesia. Dalam perkembangan sistem pemerintahan presidensil di negara Indonesia (setelah amandemen UUD 1945) terdapat perubahan dalam sistem ketatanegaraan (kedudukan lembaga-lembaga negara), sistem politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan keamanan, dan sebagainya.	DR.H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA
285	16 Maret 2019	Jabar XI	Pengurus PKH dan Penerima E-Waroeng KUBE Jasa 10 Kelurahan Se-Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya	Jati diri adalah keyakinan dan cita-cita, seperti halnya dalam kehidupan bangsa kita terdapat cita-cita bangsa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dan harus kita rawat dan perjuangkan terus. Berkaitan dengan cita-cita kita dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga, terdapat cita-cita yang harus diperjuangkan juga yaitu mewujudkan ketahanan keluarga yang baik.	AHMAD ZACKY SIRADJ
286	18 Maret 2019	Jabar XI	Tokoh Masyarakat , Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan Kecataan Mangkubumi, Serta Para Guru Pesantren Riyadlush Shorfiyyah Kota Tasikmalaya.	Semua bangsa di dunia memiliki Ideologi yang secara sederhana merupakan nilai dasar sebuah cita-cita. di Indonesia, cita-cita bangsa tersebut dapat diukur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat perlu terus mengamalkan nilai Pancasila tersebut agar tercermin kebersamaan yang menghormati perbedaan.	AHMAD ZACKY SIRADJ
287	18 Maret 2019	KECAMATAN MEDAN BARAT, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA	DPD PKS Kota Medan	Terjadi pergeseran pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya menjadi dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
288	18 Maret 2019	KECAMATAN MEDAN BARAT, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA	DPW PKS Provinsi Sumatera Utara	Selain berdampak positif, Internet mempunya dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa yang berlandaskan Ideologi Pancasila.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
289	18 Maret 2019	DESA PANIKI KAB. SITARO SULAWESI UTARA	Masyarakat Desa Paniki, Kab. Sitaro	Pemerintah pusat perlu memikirkan sebuah kebijakan dalam upaya perekrutan CPNS, khususnya terakit dengan mengutamakan perekrutan bagi putera daerah. Hal ini menjadi penting, karena dengan semakin banyaknya putera daerah yang memiliki kemampuan direkrut sebagai pegawai pemerintah, maka secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran yang secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	EE. MANGINDAAN
290	19 Maret 2019	SULAWESI UTARA	Mayarakat Talise	Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pada tahap implementasinya masih sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang belum sesuai dengan harapan. Penyebabnya masih banyak yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, kelompok maupun golongannya sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak.	
291	19 Maret 2019	Kab. Mamasa	Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa	UUD merupakan hukum tertinggi dan juga ditegaskan tentang prinsip negara berdasarkan Hukum. kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD sehingga pada akhirnya kesejahteraan Rakyat secara merata dapat dicapai.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th
292	20 Maret 2019	Kab. Mamasa	Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa	Sistem Ketatanegaraan harus terus di evaluasi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga pada akhirnya kesejateraan rakyat secara merata dapat dicapai. harus diakui bahwa cukup banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi harus diakui pula bahwa masih banyak yang harus diperbaiki.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th
293	26 Maret 2019	Kab Pekalongan, Jateng	Paguyuban Masyarakat Kec Wiradesa	NIlai-nilai Pancasila tidak dapat menjadi sumber acuan sikap dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini lambat laun, Pancasila akan kehilangan maknanya sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Didorong oleh keprihatinan yang meluas terhadap kondisi ini, muncul berbagai gagasan untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
294	26-28 Maret 2019	Banjarmasin	Pengurus Ormas, Tokoh Masyarakat dan Agama, Tokoh Perempuan, Pengurus Parpol	Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses pembentukan Pancasila sangat lama, Pancasila memuat aspek keagamaan dan keduniawian, Pancasila berkembang dari pemikiran-pemikiran baru dalam kehidupan bernegara.	Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
295	27 Maret 2019	Kab. Batang, Jateng	Paguyuban Masyarakat Desa Reban	Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup, membawa manfaat riil bagi kehidupan warga, dan melayani baik kepentingan vertical (negara) maupun kepentingan horisontal (warga).Dalam kontestasi antarideologi yg terjadi saat ini, Pancasila harus memiliki peran vital untuk tetap menjadi sumber pemersatu bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pacuan peradaban antar bangsa. Salah satunya adalah lembaga MPR yang terus diperjuangankan eksistensinya dalam menyebarkan ideologi Pancasila.	PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
296	1-Apr-19	KECAMATAN BALEENDAH. KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT	DPD PKS Kabupaten Bandung	Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peratutan yang lebih tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.
297	1-3 April 2019	Desa Sipayo, Kabupaten Parigi Mautong, Propinsi Sulawesi Tengah	Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Warga Masyarakat Desa Sipayo, Kab. Parigi Mautong	Maysrakat butuh adanya campur tangan pemerintah dalam mengurangi dan membatasi tindak kriminal yang dilakukan oleh anak muda dengan suatu kebijakan yang benar-benar dapat di rasakan oleh masyarakat dari segi kenyamanan.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
298	2-Apr-19	KECAMATAN BALEENDAH. KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT	DPD PKS Kabupaten Bandung	Perlunya implementasi Undang-Undang sebagai tata laksana jalannya kehidupan bernegara sehingga ada kontrol yang kuat dari masyarakat pada pelaksanaan ketatanegaraan dari elemen terkecil sampai pusat.	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.
299	2-Apr-19	Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah	Pimpinan, Pengajar dan Mahasiswa Akademi Kebidanan (Akbid) Graha Ananda di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.	Profesi kebidanan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya mengenai regulasi yang dapat melindungi tenaga kebidanan ketika berada di lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
300	2-Apr-19	Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah	Dengan Pendeta, Guru Sekolah Minggu dan PAUD di Kab. Morowali Utara	Pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk pendidikan usia dini yang harus segera dilaksanakan pada saat ini dan untuk di masa akan datang.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
301	3-Apr-19	KECAMATAN BALEENDAH. KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT	DPD PKS Kabupaten Bandung	Pentingnya Konstitusi dipahami oleh masyarakat agar mampu secara efektif memberikan kontrol kepada pemerintah sehingga Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	DR. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				1945 dapat tegas diimplementasikan.	
302	6 April 2019	Desa Ngadipurwo, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah VI	Pondok Pesantren Al Hikmah	Penyebaran paham radikal yang mengatasnamakan agama di Indonesia semakin meluas karena kurang pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa oleh karena itu setiap warga negara wajib menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
303	6-Apr-19	DESA KERTAWANGUNAN KAB. KUNINGAN JAWA BARAT	Himpunan Mahasiswa Kader Desa Kertawangunan	Pendidikan Pancasila penting untuk dipahami oleh anak didik. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik akan mampu memanusiakan manusia Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki IPTEK dan seni yang dipelajarinya. Diharapkan bahwa negara Indonesia unggul dalam penguasaan IPTEK dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya bahwa ia lahir dari keragaman budaya bangsa.	YANUAR PRIHATIN
304	10 April 2019	Jateng VI	DPC Generasi Muda Pembangunan Indonesia (Gmpi), Purworejo, Jateng	Jika masyarakat mampu menggabungkan antara negara integralistik dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala aspek niscaya bangsa Indonesia akan mampu menuju taraf hidup yang sejahtera.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
305	10 April 2019	Jateng VI	Pondok Pesantren Nuril Anwar, Desa Maron, Loano, Purworejo, Jateng	Penyebab memudarnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia antara lain karena faktor internal yaitu kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah dan tertinggalnya Indonesia dari bangsa lain dalam banyak bidang; faktor eksternal adanya pengaruh negatif dari arus globalisasi dan modernisasi.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI
306	10 April 2019	Jateng VI	Pondok Pesantren Al Falah, Desa Kaliboto, Bener, Purworejo, Jateng	Pemahaman wawasan kebangsaan yang benar merupakan syarat mutlak untuk dapat mengelola perubahan yang terjadi baik di dalam negeri maupun dunia. Kemampuan itulah yang menjadi pembeda antara bangsa yang maju dan bangsa yang tertinggal.	MOHAMAD ARWANI THOMAFI

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
307	11-Apr-19	Kab. Sopeng Sulsel	Tokoh Masyarakat di Desa Ciromanie Sulawesi Selatan	Sistem ketatanegaraan sebelum Amandemen UUD 1945 memiliki Kelebihan dari sistem ketatanegaraan setelah amandemen ialah sistem ketatanegaraannya lebih terarah dan pemerintah hanya fokus pada target yang telah ditentukan sebelumnya serta kekurangannya tidak ada campur tangan rakyat dalam menentukan kebijakan sehingga dalam pembuatan sistem ketatanegaraan hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa. Sedangkan, sesudah amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Republik Indonesia lebih mengutamakan aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa.	SYAMSUL BACHRI S, MSC
308	13-Apr-19	Bima, NTB	Akademisi dan Mahasiswa, Bima	Perlu meninjau kembali pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia yang menggunakan Pembangunan paradigma pendidikan nasional berorientasi kerakyatan agar mampu berkompetisi secara global dengan cara menyediakan kurikulum dan infrastruktur pendidikan yang terstandarisasi.	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD
309	13-Apr-19	Bima, NTB	FM Center	Perlunya mengkaji kembali makna permusyawaratan dalam praksis sistem ketatanegaraan kita agar kekhasan demokrasi Indonesia dapat terpelihara. Oleh karena itu, agenda amandemen UUD dapat menghadirkan kembali MPR yang benar-benar dapat merupakan lembaga "permusyawaratan" yang dalam pengambilan keputusannya senantiasa dijiwai "hikmat kebijaksanaan".	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD
310	15-Apr-19	KAB. BONE SULSEL	Tokoh Masyarakat Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	Ketika pemerintah dihadapkan pada suatu pilihan dalam menentukan kebijakan yang begitu besar pengaruhnya pada negeri ini, diharapkan lebih fokus implementasinya pada suatu target sehingga pemerintah lebih mudah dalam implementasinya. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menerapkan sistem ketatanegaraan yang adil dan bijaksana, serta memusatkan tujuan pada suatu target yaitu Negara Republik Indonesia menjadi lebih baik.	SYAMSUL BACHRI S, MSC

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
311	19 April 2019	GORONTALO	Masyarakat Desa Tenilo, Kec. Limboto Barat	Dengan mengakarnya nilai 4 pilar di dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan tercipta sistem kehidupan yang teratur dan terarah. Sebagai nilai instrumental, nilai-nilai kebangsaan tersebut melandasi pengelolaan pemerintahan negara maupun dalam membangun hubungan dengan negara lain. Sebagai jati diri bangsa, nilai tersebut berwujud sikap dan perilaku yang nampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST.,M.SI
312	20-Apr-19	Krueng Mane, Aceh Utara, ACEH	Masyarakat Krueng Mane, Aceh Utara	Maju tidaknya sebuah negara dilihat dari pembangunan nasionalnya. Pembangunan nasional yang baik akan mempengaruhi kesejahteraan rakyatnya di segala sektor. Sedangkan dalam penerapannya di Indonesia, pembangunan nasional masih belum mencerminkan negara maju karena masih banyak masyarakat yang kesejahteraannya rendah.	MUSLIM, SHI., MM.
313	21-Apr-19	Juli Krueng Simpo, Bireun, ACEH	Masyarakat Juli Krueng Simpo, Bireun	Negara adalah pemikul tanggung jawab utama dalam hal pendidikan karakter bagi warga negara dengan merumuskan serta mengimplementasikan model pendidikan karakter bangsa yang sesuai dengan kondisi kekinian dengan berdasarkan pada putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013. Pemerintah perlu memikirkan alternatif untuk membentuk sebuah lembaga khusus guna merumuskan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa.	MUSLIM, SHI., MM.
314	22-Apr-19	Langsa, ACEH	Masyarakat Kota Langsa	Sejauh mengenai Pancasila sebagai suatu ideologi faktor pertama mengenai kualitas nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak perlu diragukan, tetapi faktor: (a) bahwa ideologi tersebut difahami, dan bagaimana sikap dan perilaku masyararakat terhadapnya; (b) terdapat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan ideologi tersebuttanpa menghilangkan jatidiri ideologi dimaksud, dan; (c) seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu membudaya dan diamalkan dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; masih memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan, memantapkan, memapankan, dan mengokohkan	MUSLIM, SHI., MM.

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pancasila. untuk itu perlu adanya usaha secara serius, dengan jalan mengimplementaskan Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.	
315	22-24 April 2019	Kampung Bebanir Bangun, Kec. Sambaliung, Provinsi Kalimantan Timur	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung	Semboyan Bhineka Tunggal Ika mempunyai peran terhadap bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional ditengah masyarakat yg majemuk.	
316	29-Apr-19	KECAMATAN TEGAL TIMUR,KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH	DPD PKS Kabupaten Tegal	Pancasila sebagai dasar negara menjiwai pembentukan pembukaan dan pasal-pasal dari UUD NRI Tahun 1945. Sebagai konstitusi tertulis, UUD menjadi sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan UUD yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
317	30-Apr-19	KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH	DPD PKS Kabupaten Tegal	Pengamalan Pancasila harus menjalankan nilai-nilai yang bewujud norma etik secara pribadi dan kelompok dalam bertingkah laku dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
318	3 MEI 2019	Bima, NTB	Akademisi dan Mahasiswa dan Stikes Yahya STIE Bima	DPD perlu dioptimalisasi perannya sebagai representasi daerah dengan memperkuat kedudukannya sebagai kamar kedua dan melakukan penyeimbang (*double check*) dalam proses-proses legislasi, penganggaran dan pengawasan yang berpersfektif daerah dan menjadi jembatan harmonisasi hubungan pusat dan daerah.	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
319	4 Mei 2019	Lampung	Masyarakat Tanggamus, Lampung; Kader Partai Politik dan Tokoh Pemuda	Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat kepada Masyarakat seperti program Keluarga Harapan (PHK), Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak tepat sasaran. Banyak penerima yang tidak memenuhi syarat dan ada pula warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut karena kekurangan informasi, menggunakan data kelompok sasaran yang tidak valid karena itu kami meminta kepada anggota MPR (anggota DPR RI) untuk mengingatkan kepada kementerian terkait untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	ENDRO S. YAHMAN
320	7 Mei 2019	Kab. Morowali Utara	Desa Tomata, Kec. Mori Atas, Peserta, Pengurus Desa dan Tokoh Agama, Pemuda dan Perempuan dan Warga Desa Tomata.	Terbatasnya Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Puskesmas yang berada di Desa Tomata dan keberadaan Rumah Sakit yang jauh dari Desa Tomata menyulitkan warga untuk mengakses pada pelayanan Kesehatan, terabai hak atas kesehatan karena itu diminta kepada MPR (sebagai Anggota DPR dan DPD RI) dan Pemerintah untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang baik bagi Masyarakat Desa Tomata dan Warga Molowali pada umumnya.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS
321	7 Mei 2019	Kab. Poso	Gedung Serbanguna Kota Poso	Profesi Tenaga kesehatan (Bidan dan Dokter) merupakan jasa yang semakin berkembang dan sangat kompetitif antar Negara paskah terbukanya era perdagangan bebas, kerjasama ekonomi antar negara, untuk menghadapi persaingan (terutama dalam bidang kesehatan) tersebut diperlukan pelatihan dan kursus bersertifikat bagi tenaga kesehatan guna memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, penguatan basis ilmu pengetahuan (kesehatan) dan teknologi kesehatan agar tenaga kesehatan (Bidan dan dokter) menjadi tenaga yang handal dan profesional di bidangnya.	Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

NO	TGL	TEMPAT	Kelompok Masyarakat	ASPIRASI MASYARAKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
322	14 Mei 2019	Kab. Balangan Kalsel	Pengurus Ormas, Tokoh Masyarakat dan Agama, Tokoh Perempuan, Pengurus Parpol	Peran bersama antar komponen bangsa, pemerintah, swasta dan masyrakat benar-benar diperlukan untuk membangun dan menggiring semangat dan wawasan kebangsaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang didesain untuk menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan ditunjang oleh pandangan wasantara.	Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM
323	20-22 MEI 2019	SULAWESI SELATAN	Desa Uloe, Kec. Dua Boccoe, Peserta, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakt, Pemuda dan Perempuan Serta Masyarakat Desa Uloe	Rakyat dapat aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, menyebarkan masalah yang dialami dan dirasahkannya kepada Wakil rakyat di Parlemen dan Pemerintah. Dalam penyampaian Aspirasi tersebut, terutama aspirasi yang berkaitan dengan kritik dan atau protes kepada Pemerintah (Penguasa), dapat dengan mudah dikirminalisasi oleh penguasa atau aparat keamanan bahkan dapat memblokir dan atau membatasi penggunaan media sosial dengan dalih melanggar UU ITE. Sehubungan dengan itu, agar MPR (sebagai anggota DPR dan DPD) untuk mengingatkan kepada pihak terkait agar menghormati hak warga atas kebebasan menggunakan media sosial, kemerdekaan menyampaikan pendapat, hak warga atas memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar dan hak warga atas keadilan.	H. ANDI IWAN DARMAWAN A, S.E.
324	22 Mei 2019	Sulawesi Barat	Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa (PPGTM) Jemaat Sumarorong, Kab. Mamasa	Sistem Ketatanegaraan harus terus di evaluasi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga pada akhirnya kesejateraan rakyat secara merata dapat dicapai. harus diakui bahwa cukup banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi harus diakui pula bahwa masih banyak yang harus diperbaiki.	PROF. JOHN PIERIS,SH.,MH / Pdt. MARTHEN, M.Th
325	13-15 Juni 2019	KALTIM	Forum RT Sepinggan Balikpapan Selatan-Balikpapan	Rasa nasionalisme harus dimiliki tiap-tiap anak bangsa. Jangan biarkan derasnya arus globalisasi membuat kita melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia, hingga menghilangkan rasa nasionalisme yang ada dalam diri kita.	